

**LAPORAN KEGIATAN**

**KAJIAN PENGUKURAN  
INDEKS KEBIJAKAN  
LUAR NEGERI INDONESIA**

2022





***Kementerian PPN/  
Bappenas***

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGUKURAN  
INDEKS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA**

**DIREKTORAT POLITIK LUAR NEGERI DAN KERJASAMA  
PEMBANGUNAN INTERNASIONAL**

**KEMENTERIAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/BAPPENAS**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

# KAJIAN PENGUKURAN INDEKS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

Tahun Anggaran 2022

Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310

Telp: (021) 3905650 Fax: (021) 31934659 Website: [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Penanggung Jawab

Wisnu Utomo

Nourma Nusanti

Penyusun

Karina Aprildhatin

M. Endrasta Wicaksono

Winda Noviana

## Daftar Isi

<b>Daftar isi</b> .....	<b>i</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Ruang Lingkup .....	2
1.4. Keluaran .....	2
1.5. Metodologi.....	2
1.6. Pelaksanaan Kegiatan.....	4
1.7. Jadwal Kegiatan .....	4
1.8. Sistematika Penulisan .....	5
<b>Bab II Pelaksanaan Kegiatan</b> .....	<b>6</b>
2.1. Rangkaian Kegiatan .....	6
<b>Bab III Hasil Pelaksanaan Kegiatan</b> .....	<b>7</b>
3.1. Realisasi Anggaran Kegiatan .....	7
3.2. Penyelenggaraan Kegiatan .....	7
<b>Bab IV Penutup</b> .....	<b>13</b>
4.1. Kesimpulan .....	13
4.2. Saran .....	13
<b>Lampiran</b> .....	<b>14</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar belakang

Untuk mengukur tercapai tidaknya sasaran dan arah kebijakan pembangunan, Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk membangun alat ukur yang objektif dan dapat diandalkan. Dari RPJMN I tahun 2005-2009, RPJMN II 2010-2014 dan RPJMN III 2015-2019, telah terjadi proses perbaikan indikator program dan kegiatan untuk mengukur kinerja diplomasi Indonesia. Upaya ini tidak mudah mengingat sifat dari berbagai aktivitas yang dilakukan dalam diplomasi tersebut lebih merupakan proses yang seringkali tidak langsung menghasilkan keluaran yang konkret, dan targetnya yang cenderung bersifat kualitatif. Di samping itu, indikator yang dirumuskan lebih berfokus pada input politik luar negeri, dan belum mencakup pengukuran dari segi *outcome*.

Pemerintah, melalui Kementerian PPN/Bappenas, telah menyusun Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia. Penggunaan indeks tersebut dimaksudkan agar memastikan pelaksanaan diplomasi RI lebih membumi, berpihak kepada rakyat dan memberikan manfaat yang nyata. Di samping itu, penilaian ini diharapkan juga dapat memperlihatkan kinerja kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia secara menyeluruh, tidak hanya oleh Kementerian Luar Negeri semata. Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia diharapkan dapat menjadi payung besar bagi berbagai indikator kinerja kebijakan luar negeri, dan menjadi refleksi nilai manfaat kebijakan luar negeri serta diplomasi Indonesia, yang diterima oleh semua pihak.

Bappenas melihat evaluasi indeks ini penting dan diperlukan untuk memastikan praktek *evidence-based policy making*, khususnya terkait isu kebijakan luar negeri, yang dilakukan tepat dan dapat menjadi pertimbangan bagi pengalokasian sumberdaya pembangunan. Adapun penamaan indeks darisebelumnya Indeks Diplomasi Indonesia diubah menjadi Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia seiring dengan pembahasan yang berjalan serta mencakup seluruh instansi Pemerintah. Terkait tugas dan fungsi Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional - Bappenas untuk melakukan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional sebagai mitra Kementerian Luar Negeri berinisiatif untuk menyusun kembali dan mereviu Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia.

Penyusunan indeks ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi - Bappenas, pada tahun 2016 dan Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional pada tahun 2017,2018,2019,2020, dan 2021. Pada tahun 2021 telah dilakukan recalibrasi dan penyusunan indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2020 untuk menilai kinerja dan kebijakan luar negeri dan diplomasi Pemerintah tahun sebelumnya. Namun demikian, penyelenggaraan diseminasi dan kolaborasi Indeks kepada para pemangku kepentingan

belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya refocusing anggaran Kementerian PPN/Bappenas akibat fenomena pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pada tahun 2022 diharapkan Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia dapat berjalan optimal dengan penyelenggaraan penilaian panel ahli di keempat dimensi serta sosialisasi dan diseminasi hasil kajian Indeks.

## 1.2. Tujuan

Kegiatan penyusunan Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia ini bertujuan untuk menghasilkan penilaian dampak kebijakan luar negeri sebagai salah satu sumber *evidence-based policy* dan masukan penyempurnaan kebijakan luar negeri.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan kajian ini antara lain melakukan studi dokumen; melakukan FGD, wawancara mendalam, diskusi, seminar; melakukan analisis dan menyusun penilaian, serta peninjauan kemungkinan penyusunan proyeksi Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam jangka menengah ke depan.

## 1.4. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

- *Executive Summary* Indonesia Foreign Policy Index (Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia)
- Infografis Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia
- Outline Simulasi Perhitungan Indonesia Foreign Policy Index (Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia)

## 1.5. Metodologi

### Metoda Pelaksanaan

Seluruh komponen kegiatan ini dilakukan dengan metode swakelola yang melibatkan seluruh Staf Direktorat Polugri dan KPI, staf direktorat terkait di Bappenas, dan staf kementerian/lembaga yang menjadi mitra Direktorat Polugri dan KPI. Secara garis besar metode tersebut dilakukan dengan cara:

- i. Studi dokumen, untuk analisis data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain : Data Perlindungan WNI/BHI di luar negeri, Nilai Ekspor yang menggunakan SKA preferensi dengan negara mitra, Jumlah pendapatan dari wisatawan asing, jumlah sengketa kasus perdagangan, jumlah artikel tentang Indonesia dari 20 media asing, jumlah WNA pelamar beasiswa Indonesia, jumlah negara yang mendukung inisiatif Indonesia, jumlah pernyataan Indonesia dalam menyikapi isu global dan lain sebagainya;
- ii. Mengadakan Focused Group Discussion (FGD) dan Wawancara mendalam dengan pakar dan praktisi untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan dari empat dimensi untuk penyusunan dan evaluasi indeks;
- iii. Melakukan koordinasi intensif dan kontinu dengan KIL mitra terkait penyusunan dan evaluasi indeks;
- iv. Melakukan analisis, merumuskan indeks dan menyusun laporan;

- v. Mengkomunikasikan hasil indeks penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan terkait.

Unit pelaksana dari tugas ini adalah Direktorat Polugri dan KPI, Bappenas dengan melibatkan berbagai stakeholders terkait baik mitra kerja maupun instansi terkait lainnya. Penyusunan Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021 ini didukung oleh satu tenaga ahli dan satu surveyor.

Kualifikasi dari tenaga ahli adalah sebagai berikut:

- i. Berpendidikan S2 dengan pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 10 tahun.
- ii. Menguasai permasalahan kebijakan luar negeri dan perencanaan kebijakan
- iii. Mempunyai pemahaman yang cukup terkait metodologi dan indeksasi

Sedangkan surveyor harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- i. Berpendidikan S1 dengan pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 5 tahun;
- ii. Mempunyai pemahaman yang cukup terhadap persoalan-persoalan politik terutama menyangkut kebijakan luar negeri.

#### Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

##### Diskusi Internal

- Pada tahap pelaksanaan direncanakan akan ada diskusi internal yang diselenggarakan sebulan dua-tiga kali pertemuan
- Dalam hal ini diskusi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati dan pembahasan substansi yang berkembang.

##### Studi Dokumen: Penilaian Indikator dari penyusunan sebelumnya

- Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan setiap bulan untuk mendukung pembahasan substansi dengan kelengkapan data dan kondisi termutakhir

##### Series Meeting dan Diskusi Terbatas

- Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan setiap bulan untuk mendukung pembahasan substansi dengan kelengkapan data dan kondisi termutakhir

##### Konsultasi dengan Expert Panel

- Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan untuk melakukan penilaian dan memvalidasi data yang digunakan untuk mengisi indikator setiap elemen.

##### Penyusunan Penilaian berdasar Indikator

- Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan untuk mengisi hasil penilaian di seluruh indikator setiap elemen

##### Penyusunan Indeks

- Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan untuk mengisi hasil penilaian di seluruh indikator setiap elemen Diseminasi dan Publikasi Hasil Penilaian

- Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan untuk mempublikasikan hasil penilaian Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap kinerja kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia di tahun 2021.

### 1.6. Pelaksana Kegiatan

Unit pelaksana dari tugas ini adalah Direktorat Polugri dan KPI, Bappenas dengan melibatkan berbagai *stakeholders* terkait baik mitra kerja maupun instansi terkait lainnya. Penyusunan Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia ini didukung oleh satu tenaga ahli dan satu surveyor. Juga dilibatkan panel ahli dari masing-masing Dimensi Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia.

### 1.7. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan, dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022, dengan alur rencana pada matrik dibawah

## PENYUSUNAN INDEKS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDOENSIA TA 2022

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyempurnaan TOR dan Penyempurnaan SK												
2	Pembentukan Tim Penyusun Indeks: Rekrutmen Tenaga Ahli												
3	Diskusi Internal												
4	Studi Dokumen: Penilaian Indikator dari penyusunan sebelumnya.												
5	<i>Series of Discussion:</i> Membahas												

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Pembobotan dan Penilaian												
6	Konsultasi dengan <i>Expert Panel</i>												
7	Penyusunan Penilaian berdasar Indikator												
8	Penyusunan Indeks												
9	Penjajakan proyeksi Indeks												
9	Diseminasi dan Publikasi Hasil Penilaian												
10	Penyusunan Laporan Akhir												

### 1.8. Sistematika Penulisan

Laporan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berupa uraian latar belakang, tujuan dan urgensi, ruang lingkup, keluaran, metodologi, pelaksana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan dan sistematika penulisan.

Bab II Pelaksanaan Kegiatan, berupa uraian pelaksanaan kegiatan Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021.

Bab III Hasil Pelaksanaan Kegiatan, berupa penjabaran hasil dari kegiatan Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021.

Bab IV Penutup, berupa uraian kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021 yang memuat saran dan tindak lanjut

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 2.1. Rangkaian Kegiatan

Kegiatan Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia dilaksanakan selama 12 bulan, mulai Januari dengan Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Acara Kegiatan  
Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	11 Januari 2022	Diskusi Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021
2	15 Februari 2022	Input data tahap 1
3	30 Februari 2022	Input data tahap 2
4	18 Maret 2022	Input data tahap 3
5	31 Maret 2022	Input data tahap 4
6	21 April 2022	Diskusi Penyusunan Indeks Kebijakan Luar Negeri 2021 dan Proyeksi 5 Tahun ke Depan
3	12 Juli 2022	Diskusi Internal Progress Penyusunan Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia TA 2021
4	2 Agustus 2022	Pembahasan Penyusunan Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021
5	11 Agustus 2022	Pertemuan Diskusi Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia bersama Dit Infomed, Kemenlu
6	15 Agustus 2022	Diskusi Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia Tahun 2021 pada Dimensi Ekonomi
7	22 Agustus 2022	Diskusi Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia Tahun 2021 pada Dimensi Sosial Budaya
8	29 Agustus 2022	Konsinyering Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia
9	30 Agustus 2022	Diskusi Persiapan Panel Ahli Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia TA 2021
10	31 Agustus 2022	Konsinyering Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia Reviu Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia Diskusi Finalisasi Penilaian Panel Ahli Dimensi Ekonomi Keamanan dan Sosial Budaya Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia TA 2021
11	5 September 2022	Diskusi Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia Tahun 2021 pada Dimensi Kepemimpinan
12	16 September 2022	Diskusi Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia Tahun 2021 pada Dimensi Kepemimpinan
13	11 Oktober 2022	Diskusi Finalisasi Perhitungan Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia TA 2021
14	19 Oktober 2022	Diskusi Penyampaian Hasil Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021
26	15 Desember 2022	Penyusunan laporan akhir

Laporan hasil kegiatan disusun dengan menggunakan analisis deskriptif berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Penyusunan indeks dilakukan melalui studi dokumen, FGD dan wawancara mendalam, diskusi terbatas, serta rapat internal.

## BAB III

### HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 3.1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan penyusunan kegiatan Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Untuk melaksanakan Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia didukung dengan anggaran sebesar Rp 350.000.000,00 sebagaimana rincian pada tabel dibawah

Tabel Anggaran Kegiatan Pengukuran  
Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia

No	Belanja	Pagu
	<b>Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia</b>	<b>350.000.000</b>
1	Belanja Bahan	24.450.000
2	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	6.000.000
3	Belanja Konsultan	75.000.000
4	Belanja Jasa Profesi	94.600.000
5	Belanja Jasa Lainnya	67.985.000
6	Belanja Perjalanan Biasa	81.965.000

#### 3.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional melakukan serangkaian rapat internal, diskusi terbatas, serta FGD dan wawancara mendalam. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengundang eminent persons dalam memberikan rekomendasi dan masukan atas proses penyusunan ulang Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Berikut hasil kegiatan yang telah dilakukan:

Tabel Hasil Pelaksanaan Kegiatan

No	Tanggal	Kegiatan	Temuan Utama
1	11 Januari 2022	Diskusi Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendiskusikan tata kerja dan target penyusunan IFPI tahun 2021</li><li>• Mendiskusikan potensi penyusunan proyeksi IFPI dalam jangka Panjang-menengah ke depan</li><li>• Pemetaan target penyampaian permohonan data kepada instansi terkait</li><li>• Pemetaan data yang telah tersedia dan belum tersedia</li><li>• Melakukan peninjauan FGD Penilaian Panel Ahli Dimensi Sosial-Budaya (diperbaharunya SOP IFPI yang menyertakan panel ahli dimensi sosial budaya)</li></ul>
2	15 Februari 2022	Input data tahap 1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penginputan data 2021 dari data hasil pencarian mandiri maupun dari yang telah diterima dari instansi terkait</li></ul>

No	Tanggal	Kegiatan	Temuan Utama
6	30 Februari 2022	Input data tahap 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penginputan data 2021 dari data hasil pencarian mandiri maupun dari yang telah diterima dari instansi terkait</li> </ul>
7	18 Maret 2022	Input data tahap 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penginputan data 2021 dari data hasil pencarian mandiri maupun dari yang telah diterima dari instansi terkait</li> </ul>
8	31 Maret 2022	Input data tahap 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penginputan data 2021 dari data hasil pencarian mandiri maupun dari yang telah diterima dari instansi terkait</li> </ul>
9	21 April 2022	Diskusi Penyusunan Indeks Kebijakan Luar Negeri 2021 dan Proyeksi 5 Tahun ke Depan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skenario proyeksi IFPI 5 tahun ke depan: Proyeksi nilai indikator, proyeksi nilai dimensi, proyeksi nilai indeks</li> <li>• Data kuantitatif menggunakan tiga pendekatan nilai proyeksi: 1) Forecast; 2) Upper Confidence Bound; 3) Lower Confidence Based</li> <li>• Jika data tersedia dalam 10 tahun terakhir, data yang digunakan untuk membangun proyeksi berdasarkan 10 tahun terakhir. Jika hanya tersedia 3 tahun terakhir, maka data yang digunakan berdasarkan tiga tahun terakhir.</li> <li>• Untuk yang mengandalkan panel, nilai proyeksi disamakan dengan nilai terakhir</li> <li>• Daftar Indikator yang diproyeksikan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indikator 7. Tingkat pemanfaatan kerja sama perdagangan internasional</li> <li>○ Indikator 8. Tingkat pertumbuhan ekspor Indonesia</li> <li>○ Indikator 9. Jumlah kedatangan wisatawan asing</li> <li>○ Indikator 11. Realisasi FDI/investasi asing</li> <li>○ Indikator 13. Tingkat kekuatan paspor Indonesia</li> <li>○ Indikator 17. Keikutsertaan film Indonesia dalam festival film internasional</li> <li>○ Indikator 20. Jumlah WNI di organisasi internasional</li> <li>○ Indikator 23. Jumlah pasukan perdamaian yang dikirim pemerintah Indonesia</li> <li>○ Indikator lain menggunakan nilai IFPI tahun 2020, baik nilai panel ahli maupun data yang belum lengkap</li> </ul> </li> <li>• Catatan diskusi: perlu diperhatikan cascading proyeksi guna menjaga</li> </ul>

No	Tanggal	Kegiatan	Temuan Utama
			validitas (mengingat indeks bersifat komposit)
10	12 Juli 2022	Diskusi Internal Progress Penyusunan Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia TA 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peninjauan dan laporan ketersediaan data dari sumber-sumber yang kredibel</li> <li>• Simulasi proyeksi indeks lima tahun ke depan</li> <li>• Diskusi persiapan agenda mendatang (FGD dan pertemuan dengan Sekjen Kemenlu)</li> <li>• Simulasi nilai indeks terkini dan forecasting indeks <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Alternatif pendekatan proyeksi: 1) berbasis hasil nilai indikator (sudah melalui pembobotan); 2) berbasis nilai akhir indeks</li> </ul> </li> </ul>
11	2 Agustus 2022	Pembahasan Penyusunan Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan ringkasan eksekutif dimulai dari umum ke khusus (pemulihan pandemic, percepatan ekonomi, gejala ketegangan di Ukraina)</li> <li>• Perbaikan untuk proyeksi: 1) mengecek data series 10 tahun ke belakang; 2) mempertajam informasi, justifikasi dan asumsi dari setiap proyeksi indikator; 3) proyeksi data riil (bukan data yang telah merupakan hasil pembobotan/ hasil dari rentang); 4) penajamkan penjelasan pada data upper, middle, lower; 5) revisit kembali indikator yang masih perlu untuk diproyeksikan</li> <li>• Penyiapan bahan untuk pertemuan diskusi IFPI dengan Infomed Kemenlu</li> </ul>
12	11 Agustus 2022	Pertemuan Diskusi Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bersama Dit. Infomed Kemenlu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Infomed pada Dimensi Sosial Budaya, khususnya pada Elemen Media, Indikator 14 (Pemberitaan Indonesia pada media asing)</li> <li>• Identifikasi dukungan Dit. Infomed ke depan bagi IFPI dan juga potensi hasil IFPI bagi intervensi kebijakan berbasis <i>evidence</i> ke depan.</li> </ul>
13	15 Agustus 2022	Diskusi Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia Tahun 2021 pada Dimensi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan nilai</li> <li>• Kalibrasi nilai untuk indikator: 1) Indikator 10. penanganan hambatan perdagangan internasional; dan 2) Indikator 12. Tingkat keselarasan kesepakatan perjanjian kerja sama ekonomi di tingkat internasional ke dalam peraturan domestic (regulatory coherence)</li> <li>• Diputuskan untuk menghapus indikator Nilai Direct Investment Abroad</li> </ul>

No	Tanggal	Kegiatan	Temuan Utama
			(investasi langsung ke luar negeri) mengingat keterbatasan akses data yang tersedia.
14	22 Agustus 2022	Diskusi Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia Tahun 2021 pada Dimensi Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan nilai</li> <li>• Kalibrasi nilai untuk indikator keikutsertaan film Indonesia dalam festival film Indonesia</li> <li>• Diputuskan untuk tidak menggunakan penilaian panel ahli pada indikator lainnya (selain indikator 17) mengingat sifat topik dimensi sosial budaya yang sangat expertise-specific (untuk menghindari penilaian yang berlandaskan pada asimetri informasi)</li> </ul>
15	29 – 31 Agustus 2022	Konsinyering Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel Ahli Dimensi Keamanan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengumpulan nilai</li> <li>○ Kalibrasi nilai untuk indikator: 1) Indikator 1. Agresi, invasi dan aneksasi; 2) Indikator 2. Dukungan asing terhadap kelompok separatis dan/atau agenda separatism; 3) Indikator 3. Tingkat ancaman pelanggaran wilayah NKRI; 4) Indikator 4. Tingkat ancaman dari dampak belum terselesaikannya perundingan perbatasan; 5) Indikator 5. Dukungan asing terhadap aksi terorisme di NKRI; 6) Indikator 6. Tingkat keberhasilan Pelindungan WNI di Luar negeri.</li> </ul> </li> <li>• Reviu perhitungan pada dimensi ekonomi dan sosial budaya</li> <li>• Pengecekan metodologi IFPI Bersama dengan BPS <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Usulan untuk perbaikan metode konversi rentang 1-100 menjadi 1-10</li> <li>○ Penjajakan perhitungan menggunakan metode MIN-MAX</li> <li>○ Catatan terkait dengan penilaian panel ahli: isu kurang representative (opsi untuk memperluas cakupan penilaian masing-masing dimensi menggunakan survey)</li> <li>○ Perlunya untuk revisi ulang validitas proyeksi IFPI (proyeksi perlu dilakukan dengan asumsi yang tepat dan dilakukan pada masing-masing nilai riil di masing-masing indikator)</li> </ul> </li> </ul>

No	Tanggal	Kegiatan	Temuan Utama
16	5 September 2022	Diskusi Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia TA 2021 pada Dimensi Kepemimpinan I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan nilai</li> <li>• Kalibrasi nilai untuk indikator: 1) Indikator 18. Tingkat inisiatif pemerintah Indonesia menyikapi isu global dan regional; 2) Indikator 21. Tingkat keterpilihan untuk menjadi tuan rumah event international strategis; dan 3) Indikator 22. Posisi strategis yang diduduki oleh Indonesia dalam organisasi internasional</li> </ul>
17	16 September 2022	Diskusi Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia TA 2021 pada Dimensi Kepemimpinan II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi pengukuran IFPI Dimensi Kepemimpinan II Bersama dengan Dewi Fortuna Anwar</li> <li>• Pengumpulan nilai</li> <li>• Kalibrasi nilai untuk indikator: 1) Indikator 18. Tingkat inisiatif pemerintah Indonesia menyikapi isu global dan regional; 2) Indikator 21. Tingkat keterpilihan untuk menjadi tuan rumah event international strategis; dan 3) Indikator 22. Posisi strategis yang diduduki oleh Indonesia dalam organisasi internasional</li> </ul>
18	11 Oktober 2022	Diskusi Finalisasi Perhitungan Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia TA 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan skeleton Executive Summary Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia TA 2021</li> <li>• Finalisasi perhitungan IFPI TA 2021 dengan perhitungan MIN-MIX: perlu pengecekan ulang perhitungan masing-masing skenario</li> <li>• Skenario 1 nilai indeks 7,44</li> <li>• Skenario 2 nilai indeks 7,38</li> <li>• Scenario 3 nilai indeks 6,84 (MIN MAX)</li> <li>• Skenario 4 nilai indeks 6,77 (MIN MAX)</li> <li>• Beberapa outstanding issues: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indikator 8 Pertumbuhan ekonomi sementara dapat menggunakan min max benchmark (nilai tidak terlalu jauh dari menggunakan rentang. Min: Korsel 27,11% dan Max Afsel dengan 40,64%)</li> <li>○ Indikator 9 kedatangan wisman bias menggunakan metode awal karena Indonesia menggunakan rentang 100 menjadi rentang 10</li> <li>○ Indikator 13 paspor Indonesia tidak perlu menggunakan min max</li> <li>○ Indikator 14 pemberitaan media tidak perlu menggunakan min max (rentang 100 menjadi 10)</li> <li>○ Indikator 15 jumlah WNA penerima beasiswa perlu dicek</li> </ul> </li> </ul>

No	Tanggal	Kegiatan	Temuan Utama
			<p>kembali data beasiswa MIKTA/BRICS/ dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indikator jumlah pembelajar Bahasa Indonesia terdapat wacana untuk dilihat berdasarkan growth/ kombinasi nilai panel ahli</li> <li>○ Indikator 17 keikutsertaan film tidak perlu menggunakan min max karena menggunakan rentang 100 menjadi 10</li> <li>○ Indikator 21 Jumlah WNI di OI tidak perlu menggunakan min max</li> <li>○ Indikator 23 Jumlah PKO dapat menggunakan min max dengan menggunakan benchmark MIKTA BRICS (terdapat salah perhitungan apda tahun 2020, perlu diperbaiki)</li> <li>○ Indikator 24 perlu dicek kembali alternative perhitungan</li> </ul>
19	19 Oktober 2022	Diskusi Penyampaian Hasil Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia TA 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi perbaikan draft Executive Summary IFPI TA 2021</li> <li>• Finalisasi infografis IFPI TA 2021</li> </ul>
20	15 Desember 2022	Penyusunan Laporan Akhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalisasi Executive Summary dan infografis IFPI TA 2021</li> <li>• Penyampaian sofffile dan hardfile Executive Summary dan Infografis IFPI TA 2021 kepada para panel ahli dan instansi terkait</li> <li>• Penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Kajian Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia</li> </ul>

## BAB IV

### Penutup

#### 4.1. Kesimpulan

Proses penyusunan pasca revidi, pengumpulan data dan pengaplikasian alternatif intervensi pada simulasi merupakan inti dari kegiatan Pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Pada praktiknya, indeks yang bertujuan untuk melakukan pengukuran berbasis bukti **dampak kebijakan luar negeri** dapat memberikan gambaran awal atas realitas kebijakan luar negeri Indonesia baik dari spektrum keamanan, ekonomi, sosial-budaya, hingga kepemimpinan dan tata kelola global.

Setelah menyusun Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang telah disempurnakan, baik dari sisi metodologi, formula perhitungan, dan kualitas data yang dikumpulkan. Hasil dari IFPI 2021 sudah dapat dikatakan sudah dapat memberikan cuplikan pencapaian *outcome* kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia lintas dimensi dan actor sepanjang tahun 2021, khususnya mencerminkan kemampuan kebijakan luar negeri dan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional dalam menavigasi tantangan selama Pandemi Covid-19.

Namun demikian, masih **terdapat kendala dalam aspek penyusunan proyeksi** IFPI dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Hal ini dikarenakan perlunya waktu yang lebih banyak dalam rangka mencari metodologi proyeksi yang tepat guna menjaga validitas data proyeksi.

#### 4.2. Saran

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pengukuran Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada tahun 2023 (untuk pengukuran IFPI tahun 2022), dapat dilakukan beberapa saran dan rekomendasi pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Menargetkan penyelesaian pengukuran IFPI 2022 pada Semester I Tahun 2023 agar hasil indeks dapat dimanfaatkan lebih optimal dalam intervensi kebijakan;
- b. Mencari alternatif bagi data yang belum tersedia pada Semester I Tahun 2023;
- c. Melakukan kembali peninjauan penyusunan proyeksi IFPI dengan melibatkan BPS sejak awal;
- d. Melakukan potensi peninjauan pembuatan Kelompok Kerja per dimensi guna memberikan ruang kepada stakeholder untuk menuangkan pendapat dan penilaiannya secara komprehensif dan inklusif;
- e. Menyelenggarakan kembali penyampaian hasil Indonesia Foreign Policy Index tahun 2022 dan juga memaparkan metodologi penyusunan indeks guna memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

# Lampiran

# INDEKS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA INDONESIA FOREIGN POLICY INDEX

2021

**“Accelerating Recovery,  
Overcoming Uncertainty”**



***Indonesia Foreign Policy Index 2021:  
Accelerating Recovery, Overcoming Uncertainty***

**Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021**

**Mempercepat Pemulihan, Mengatasi Ketidakpastian**

**Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan**

**Kementerian PPN/ BAPPENAS**

**2022**

# INDEKS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA 2021

## Ancaman Hak Berdaulat di Natuna Utara



Sumber: Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), 2021



Sejumlah Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara, ZEE Indonesia (di wilayah sengketa Ri-Vietnam, non sengketa, dan wilayah bawah garis batas LK Indonesia)

Kapal Tiongkok (kapal ikan, kapal survei / kapal riset, kapal China Coast Guard (CCG), dan kapal militer), terdeteksi melakukan intrusi di wilayah ZEE Laut Natuna Utara

### PON Papua 2021

Suksesnya penyelenggaraan PON XX Papua yang terdiri dari 64 Cabang Olahraga dan diadakan di 4 Kabupaten / Kota di Papua.

## DIMENSI KEAMANAN

### Perundingan Batas Maritim



17 Perundingan Batas Maritim dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam

Sumber: Kemenuk (2021)

### Penafsiran Ulang UNCLOS

Upaya penafsiran ulang UNCLOS terkait *nine-dash-line* oleh China menjadi tantangan penegakkan hukum internasional dan prinsip kebebasan navigasi.

Sumber: The Diplomat (2021)



## Pelindungan WNI



1.388 diantaranya adalah ABK



dari situasi krisis di Kabul, Afghanistan



dan 4 sandera dibebaskan dari kelompok Abu Sayyaf, Filipina Selatan



Sumber: Kemenuk (2021)

## Pertumbuhan Ekspor Negara MIKTA BRICS

Russia	44,12
Afrika Selatan	40,64
Turki	39,14
Indonesia	38,49
India	32,62
Brazil	32,61
Australia	29,80
China	29,77
Korea Selatan	27,11
Meksiko	19,97

Sumber: Exports of Goods and Services, World Bank (2021)

Tahun 2021, Indonesia berhasil melakukan pengamanan nilai ekspor sebesar USD 2,2 Miliar atau Rp 31,7 Triliun.

Sumber: Kemendag (2021)



Ekspor IMA tahun 2021 tumbuh sebesar 38% dibanding tahun 2020.

20 kasus hambatan perdagangan berhasil dihindari

## DIMENSI EKONOMI

### 5 Besar Negara Asal FDI TA 2021



Sumber: BKPIM (Jan, 2022)

Realisasi FDI tahun 2021 meningkat 10% dari tahun 2020 dari Rp. 412,8 Triliun menjadi Rp. 454 Triliun

Terselenggaranya the First Joint Working Group (JWG) on Palm Oil antara ASEAN dan Uni Eropa guna mengkompanyakan minyak sawit sebagai bagian dari minyak nabati yang berkelanjutan bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

Sumber: Kemenuk (2021)

## Upaya Pemulihan Pariwisata Indonesia

### 10 Besar Kunjungan Wisman Tahun 2021



Sumber: BPS (Per 5 Sept 2022)



## Persiapan Presidensi G-20 2022

Indonesia mendukung 26 posisi strategis di organisasi internasional, penerimaan posisi G20, Dewan HAM PBB, anggota dewan IMO, Executive board WHO & UNESCO, Anggota Dewan Badan Pangan dan Pertanian FAO, dsb.

Indonesia meneruskan estafet presidensi G20 secara simbolis pada sesi penutupan KTT G-20 Roma, di La Nuvoletta, Roma, Italia 31 Oktober 2021



## DIMENSI KEPEMIMPINAN

### Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia

Kepada Antigua dan Barbuda, India, Mozambik, Zimbabwe, Suriname, Madagaskar, Timor Leste, Palau, Papua New Guinea, Afghanistan, dan Saint Vincent dan Grenadine



Sumber: Lampiran Pidato (2022)

### Regional Initiative

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Leaders Meeting (ALM), 24 April 2021 dan menghasilkan 5 Point Consensus guna merespon situasi Myanmar

OECD 0,7

Berkembang 0,3

Rata-Rata Persentase Jumlah Bantuan dari PNB Per Kapita

US\$ 200rb

Bantuan kemanusiaan melalui AHA Center sebagai tindak lanjut kesepakatan ALM

## Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

Co-chair bersama Inggris pada agenda COP 26 (UNFCCC) Forest, Agriculture and Commodity Trade Dialogue guna mempromosikan perdagangan komoditas pertanian berkelanjutan yang mengedepankan perlindungan hutan dan ekosistem pendukungnya.

### Indonesia Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050

Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih awal

Mengurangi emisi gas rumah kaca 29% (tanpa syarat dan mandiri) dan 41% (dengan dukungan internasional) pada 2030

Sumber: Indonesia LTS-LCCR 2050 (2021), Katadota (2021)

### Kategori Sektor:



## Film Indonesia Raih International Award

Indonesian Film 'Yuni' wins the Platform Prize at Toronto International Film Festival

"Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas" wins the Golden Leopard for the Best Picture at Torino Film Festival 2021 under its International title "Vengeance is Mine, All Other Pay Cash"

Juga ditayangkan di beberapa Festival Film Internasional Lain, seperti: Berlin, Busan, Cannes, Shanghai, Sundance, Toronto, dan Venice.



## DIMENSI SOSIAL BUDAYA

### Musisi Indonesia Go International

Beberapa musisi muda Indonesia yang saat ini berkarya di luar Negeri: Rich Brian, Niki Zefanya, Warren Hue, dan Stephanie Poetri.

Keempatnya sama-sama tergabung dalam 88rising, salah satu label musik asal USA.



### Pemberitaan Indonesia Pada Media Asing



Indonesia memiliki jumlah pemberitaan terendah di antara negara MIKTA BRICS tahun 2021

10% Pemberitaan sentimen positif upaya dan kerja sama penyediaan vaksin Covid-19; FDI ke Indonesia, upaya perdamaian di Myanmar, kerjasama bilateral dan multilateral; Peran di G-20, upaya menekan deforestasi

Sumber: 35 Media, Kienu (2021)

## Beasiswa

### 5 Besar Negara Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang

Afganistan	20
Pakistan	20
Tanzania	19
Yemen	18
Thailand	12

Sumber: Kemendikbudristek (2021)



### Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)

SELAMAT SIANG

APA KABAR?

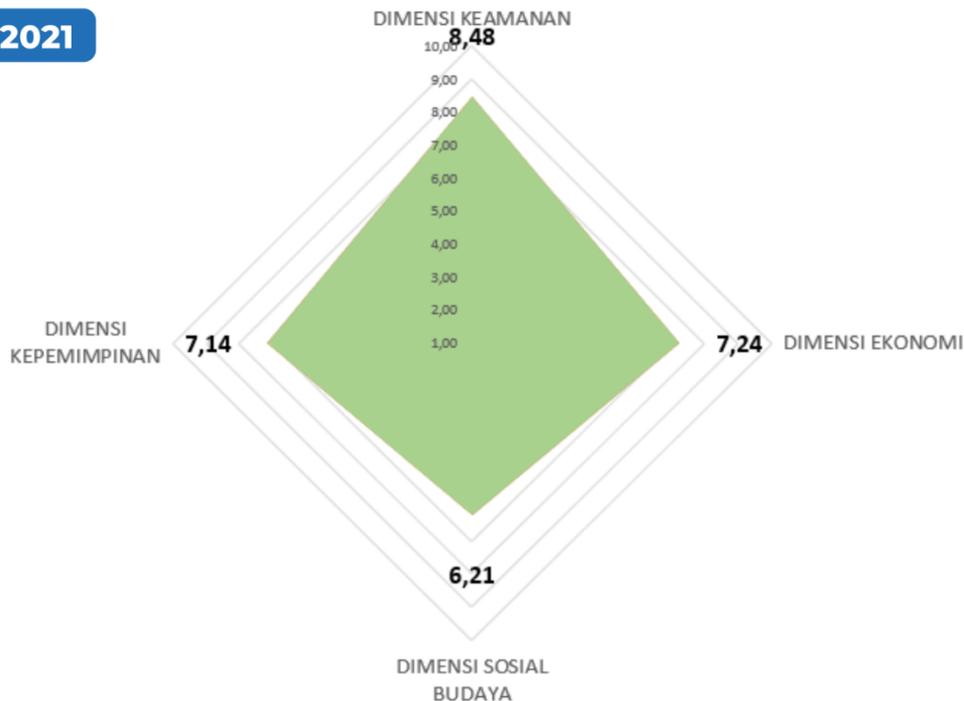
Terdapat kenaikan pembelajar BIPA sebesar 21,39% di tahun 2021, dari 8,854 menjadi 10.730 pembelajar

Timor Leste menjadi Negara dengan Pembelajar BIPA Terbanyak

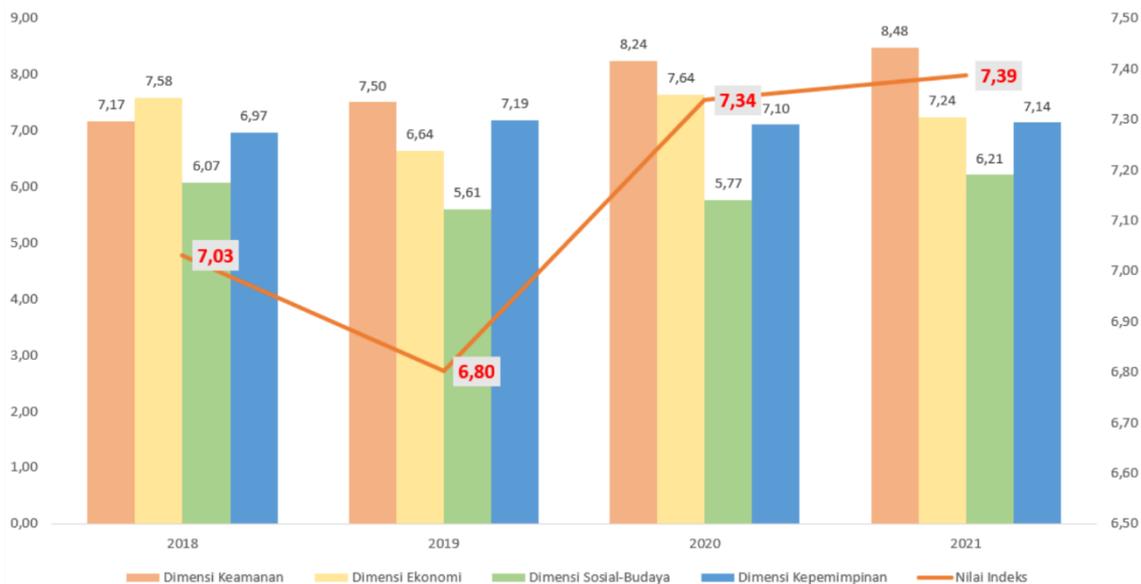
Sumber: Pusat Pengembangan dan Pembelajaran Bahasa dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2021)



## Nilai Indeks KLNI 2021



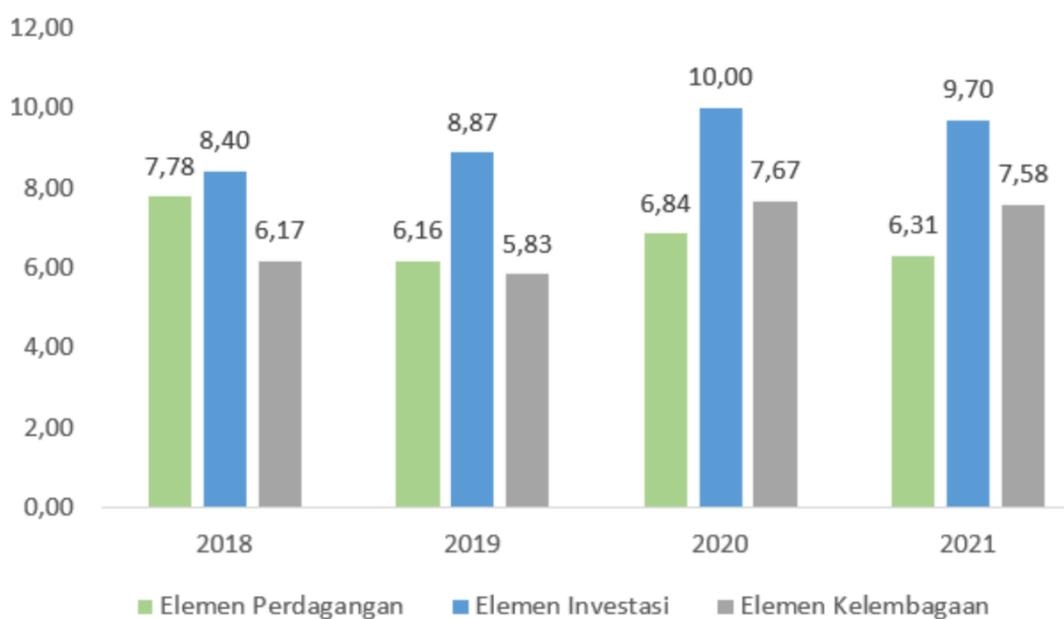
## Tren Nilai Indeks KLNI 2018-2021



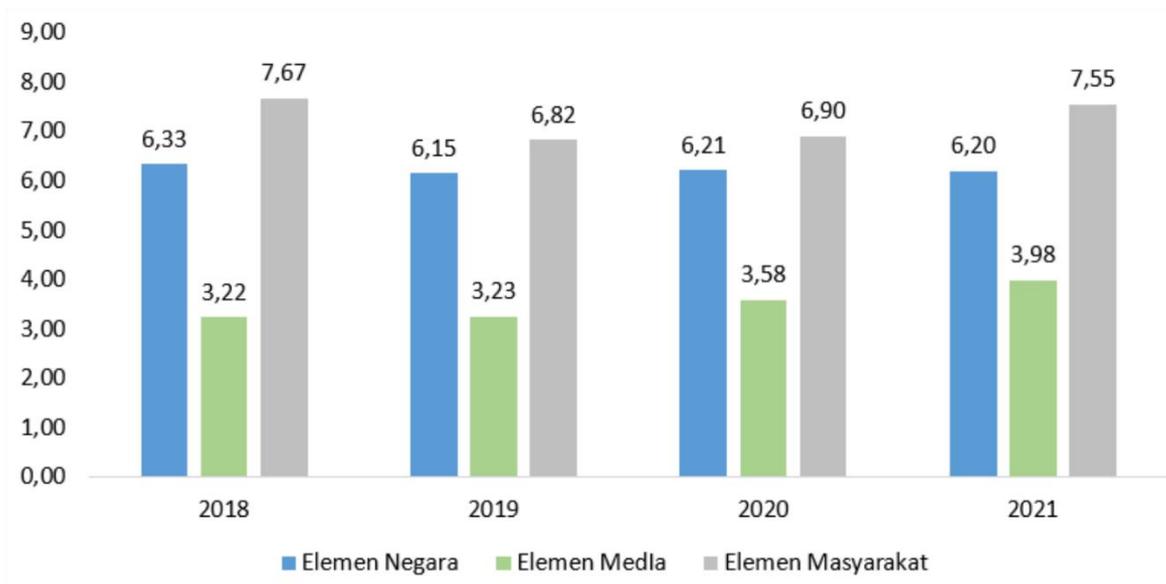
## Nilai Elemen Dimensi Keamanan 2018-2021



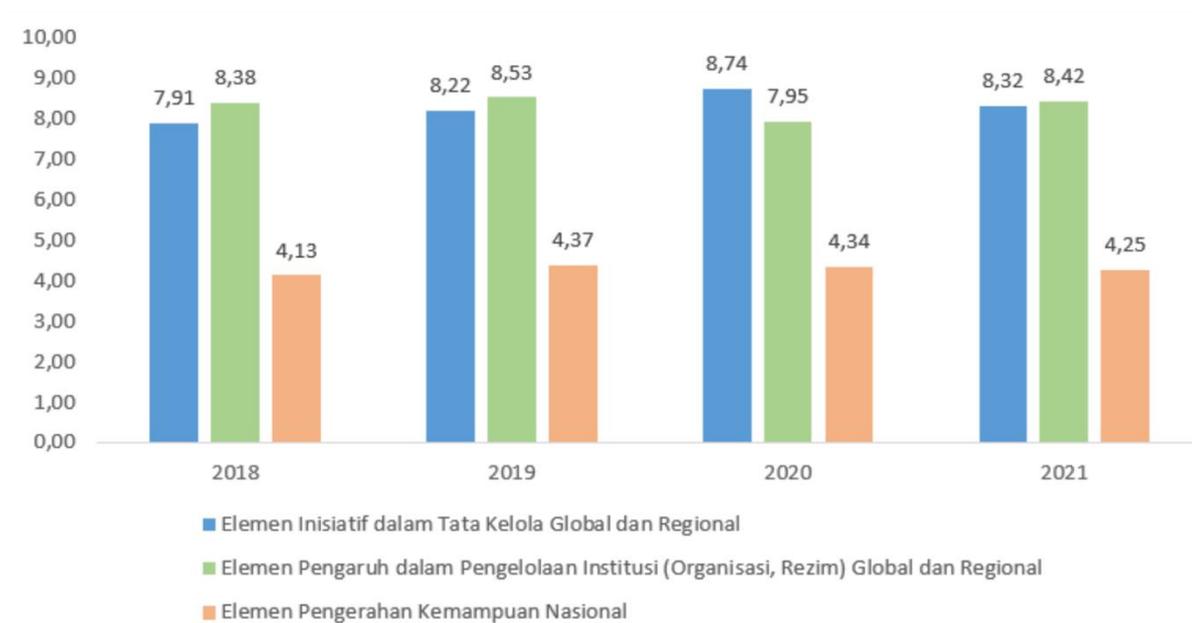
## Nilai Elemen Dimensi Ekonomi 2018-2021



## Nilai Elemen Dimensi Sosial-Budaya 2018-2021



## Nilai Elemen Dimensi Kepemimpinan 2018-2021



## Ringkasan Eksekutif

Tahun 2021 adalah tahun yang dimulai dengan optimisme, namun kemudian diwarnai dengan ketidakpastian. Setahun setelah pandemi COVID-19, optimisme mulai muncul pada awal tahun seiring dengan berbagai perkembangan di akhir tahun 2020, termasuk berhasil ditemukannya beragam vaksin dan pemulihan ekonomi dunia yang berangsur-angsur membaik. Kondisi ini tentu saja memberikan pengaruh yang berdampak pada pergaulan internasional, yang masih ditandai dengan keterbatasan mobilitas, disrupsi pada rantai pasokan (*supply chain*), serta beragam tantangan lainnya. Tidak hanya itu, pandemi bukanlah satu-satunya permasalahan yang menghadirkan ketidakpastian dalam hubungan internasional, ditandai dengan peningkatan ketegangan geopolitik di antara negara-negara Besar (AS-Tiongkok, Rusia-Eropa). Pada saat yang bersamaan, komitmen untuk menyelesaikan persoalan global menggunakan prinsip multilateralisme juga terasa menurun, seiring dengan banyaknya kritik pada beragam institusi internasional yang berfungsi kurang optimal.

Dengan berbagai ketidakpastian tersebut, Indonesia dan juga dunia telah belajar beradaptasi pada dunia yang diwarnai dengan pandemi. Mobilitas internasional tetap diupayakan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Berbagai forum diplomasi diselenggarakan secara jarak jauh maupun *hybrid*. Kondisi pandemi secara langsung berdampak pada akselerasi transisi ke ekonomi digital secara signifikan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. Kondisi-kondisi yang demikian itu tentunya mempengaruhi praktik dan capaian kebijakan luar negeri Indonesia, yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan nasional, sebagaimana tergambar dalam Pembukaan UUD NKRI 1945.

Nilai IFPI 2021 menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, menggambarkan bahwa secara umum pencapaian kebijakan luar negeri Indonesia cenderung stabil dalam kategori “Garuda Mengangkasa”. Seperti juga pada IFPI 2020, IFPI 2021 juga menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia telah memberikan hasil yang baik di berbagai aspek, namun masih belum sesuai dengan potensinya yang lebih besar lagi. Kemampuan berbagai pemangku kebijakan luar negeri Indonesia menavigasi berbagai ketidakpastian yang dihadirkan oleh pandemi serta ketegangan geopolitik, seperti ditunjukkan oleh peningkatan nilai di berbagai indikator, patut untuk diberikan apresiasi yang layak. Pada saat bersamaan, berbagai upaya untuk mendorong pencapaian yang lebih optimal di berbagai indikator perlu untuk diupayakan. Nilai IFPI 2021 ini juga menunjukkan bahwa kebijakan luar

negeri Indonesia turut berkontribusi pada upaya percepatan pemulihan dari pandemi. Peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama global untuk menangani pandemi, termasuk untuk mewujudkan keadilan vaksin global, merupakan kontribusi penting tidak hanya bagi Indonesia sendiri tapi juga bagi seluruh negara berkembang. Keterlibatan Indonesia sebagai Co-Chair dalam COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group (EG) adalah salah satu contoh yang patut diapresiasi. Pada tahun 2021, Indonesia juga menerima estafet presidensi G20 dari Italia, menghadirkan peluang peran internasional yang semakin besar. Beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan nilai baik secara nominal maupun nilai indeks menunjukkan bahwa tahun 2021 ditandai dengan pulihnya kembali berbagai sektor yang berkaitan dengan hubungan internasional, seperti terlihat dalam pertumbuhan ekspor yang tinggi, kembali meningkatnya partisipasi dalam festival film internasional, hingga kesuksesan penyelenggaraan berbagai event internasional.

Pada saat yang bersamaan, kebijakan luar negeri Indonesia juga terdampak oleh pandemi itu sendiri, yang ternyata masih enggan pergi. Optimisme percepatan pemulihan yang mewarnai awal tahun 2021 harus berhadapan dengan kenyataan bahwa virus penyebab COVID-19 bermutasi dan menghadirkan berbagai varian yang berbahaya, termasuk varian Delta yang menyebar di Indonesia pada bulan Juni-Juli 2021. Angka wisatawan asing yang turun dibandingkan tahun sebelumnya dan angka realisasi investasi yang masih di bawah target menunjukkan hal ini. Penting pula untuk mencatat bahwa pemulihan pandemi juga tidak selalu berarti positif. Beragam ancaman keamanan seperti pelanggaran wilayah serta dukungan pada terorisme dan separatisme yang relatif berkurang selama pandemi juga mulai menggeliat meningkat. Tiongkok, salah satu kekuatan besar yang terlibat di kawasan, juga tercatat semakin asertif di Laut Cina Selatan.

Meskipun secara umum menunjukkan kapasitas untuk beradaptasi dengan ketidakpastian yang dihadirkan oleh berlarutnya pandemi dan peningkatan ketegangan geopolitik, ada berbagai sektor yang memerlukan perhatian dan upaya yang lebih serius. Beberapa di antaranya merupakan problem yang telah persisten bahkan sebelum pandemi, seperti visibilitas Indonesia di media internasional yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara *middle power* dan *emerging economies* lainnya, jumlah WNI yang bekerja di organisasi internasional yang masih terbatas, bantuan luar negeri yang belum terkelola dengan optimal, hingga keselarasan regulasi domestik dan kesepakatan perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang masih terkendala. Untuk mengupayakan hal ini, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di antara institusi pemerintah maupun dengan pihak-pihak di luar pemerintahan menjadi penting.

## Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif .....	1
Daftar Isi .....	3
Daftar Singkatan .....	4
Daftar Grafik dan Tabel .....	6
A. Latar Belakang .....	7
B. Apa itu Indonesia Foreign Policy Index? .....	8
C. Landasan Konseptual .....	8
D. Metodologi.....	10
D.1 Tipologi Nilai IFPI .....	18
F. Hasil Penilaian Indonesia Foreign Policy Index 2021 .....	17
F.1 Nilai IFPI 2021: Garuda (Masih) Mengangkasa.....	17
F.2 Nilai Dimensi Keamanan.....	20
F.3 Nilai Dimensi Ekonomi .....	26
F.4 Nilai Dimensi Sosial-Budaya.....	33
F.5 Nilai Dimensi Kepemimpinan .....	39
G. Kesimpulan .....	45
H. Rekomendasi.....	47
Referensi .....	53

## Daftar Singkatan

UUU NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
IFPI	: <i>Indonesia Foreign Policy Index</i>
G20	: <i>Group of 20</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
RI	: Republik Indonesia
SKA	: Surat Keterangan Asal
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
WNA	: Warga Negara Asing
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
BSBI	: Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia
BIPA	: Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
ASEAN	: <i>Association of South East Asia Nations</i>
PKO	: <i>Peace Keeping Operations</i> / Pasukan Penjaga Perdamaian
PNB	: Pendapatan Nasional Bruto
HAM	: Hak Asasi Manusia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RCHA	: <i>Regional Conference on Humanitarian Assistance</i>
K/L	: Kementerian / Lembaga
ZOPFAN	: <i>Zone of Peace, Freedom and Neutrality</i>
PNG UFFWP	: <i>Papua New Guinea Union for Free West Papua</i>
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
PM	: Perdana Menteri
PON	: Pekan Olahraga Nasional
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
IOJI	: <i>Indonesia Ocean Justice Initiative</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
JAD	: <i>Jemaah Ansharut Daulah</i>

JT	: <i>Jemaah Tabligh</i>
ABK	: Anak Buah Kapal
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
RCEP	: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
IJEPA	: <i>Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement</i>
MIKTA	: Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia
BRICS	: Brazil, Russia, India, Cina, Afrika Selatan
SARA	: Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan
KNB	: Kerja sama Negara Berkembang
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
COP26	: <i>Conference of the Parties – 26</i>
SU PBB	: Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
DK	: Dewan Keamanan
MotoGP	: Moto GranPrix
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
IMO	: <i>International Maritime Organization</i>
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
CoC	: <i>Code of Conduct</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia

## Daftar Grafik dan Tabel

Grafik 1: Tren Persebaran Kasus COVID-19 Sepanjang Tahun 2021 .....	18
Grafik 2: Nilai <i>Indonesia Foreign Policy Index</i> 2021 – 7,39 .....	19
Grafik 3: Tren Nilai <i>Indonesia Foreign Policy Index</i> 2018 – 2021 .....	19
Grafik 4: Nilai Elemen Dimensi Keamanan <i>Indonesia Foreign Policy Index</i> 2018 – 2021 ...	21
Grafik 5: Nilai Indikator Dimensi Keamanan <i>Indonesia Foreign Policy Index</i> 2018 – 2021.	22
Grafik 6: Nilai Elemen Dimensi Ekonomi <i>Indonesia Foreign Policy Index</i> 2018 – 2021 .....	27
Grafik 7: Nilai Indikator Dimensi Ekonomi <i>Indonesia Foreign Policy Index</i> 2018 – 2021 ...	28
Grafik 8: Presentase Pemanfaatan SKA Tahun 2018 - 2021 .....	29
Grafik 9: Pertumbuhan Ekspor Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Brazil, India, dan Afrika Selatan Tahun 2018-2021 .....	30
Grafik 10: Jumlah Kedatangan Wisatawan Asing (Juta Orang) ke Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Brazil, India, dan Afrika Selatan Tahun 2018-2021 (Juta Orang) .....	31
Grafik 11: Penanganan Hambatan Perdagangan Internasional.....	32
Grafik 12: Realisasi FDI / Investasi Asing .....	33
Grafik 13: Nilai Elemen Dimensi Sosial Budaya <i>Indonesia Foreign Policy Index</i> 2018 – 2021 .....	34
Grafik 14: Nilai Indikator Dimensi Sosial-Budaya <i>Indonesia Foreign Policy Index</i> 2018 – 2021.....	35
Grafik 15: Pemberitaan Indonesia pada Media Asing Tahun 2018-2021.....	36
Grafik 16: Jumlah Penerima Beasiswa Indonesia tahun 2018-2021 .....	37
Grafik 17: Nilai Elemen Dimensi Kepemimpinan <i>Indonesia Foreign Policy Index</i> 2018 – 2021.....	39
Grafik 18: Nilai Indikator Dimensi Sosial Budaya <i>Indonesia Foreign Policy Index</i> 2018 – 2021.....	40
Grafik 19: Jumlah Warga Negara Indonesia di Organisasi Internasional.....	42
Grafik 20: Jumlah Pasukan Perdamaian (PKO) yang dikirim pemerintah Indonesia .....	45
Tabel 1: Definisi Operasional Indeks Kebijakan Luar Negeri Tahun 2021 .....	12
Tabel 2: Tipologi Nilai <i>Indonesia Foreign Policy Index</i> .....	45
Tabel 3: Jumlah Penanganan Hambatan Perdagangan Internasional (Trade Remedies, Hambatan Teknis Perdagangan, Kasus WTO) Tahun 2018-2021 .....	33

## *Indonesia Foreign Policy Index 2021:*

### **‘Mempercepat Pemulihan, Berdamai dengan Ketidakpastian’**

#### **A. Latar Belakang**

Tahun 2021 adalah tahun ketika harapan harus berdamai dengan kenyataan. Setahun setelah pandemi COVID-19 dimulai dan beragam dampaknya mendisrupsi berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, optimisme mulai menyeruak pada awal tahun. Banyak pihak, termasuk pemerintah berbagai negara, termasuk Indonesia, berharap bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun pemulihan dari pandemi. Optimisme ini ditopang dengan berbagai perkembangan di akhir tahun 2020, termasuk berhasil ditemukannya beragam vaksin dan pemulihan ekonomi dunia yang berangsur-angsur membaik. Pada perjalanannya, optimisme tersebut kemudian harus dikoreksi oleh berlanjutnya pandemi yang bahkan menjadi semakin mematikan, seiring dengan mutasi yang terjadi pada virus penyebab COVID-19.

Kondisi ini tentu saja memberikan pengaruh yang berdampak pada pergaulan internasional, yang masih ditandai dengan keterbatasan mobilitas, disrupsi pada rantai pasokan (*supply chain*), serta beragam tantangan lainnya. Tidak hanya itu, pandemi bukanlah satu-satunya permasalahan yang menghadirkan ketidakpastian dalam hubungan internasional, ditandai dengan peningkatan ketegangan geopolitik di antara negara-negara Besar (AS-Tiongkok, Rusia-Eropa). Pada saat yang bersamaan, komitmen untuk menyelesaikan persoalan global menggunakan prinsip multilateralisme juga terasa menipis, seiring dengan banyaknya kritik pada beragam institusi internasional yang berfungsi kurang optimal.

Dengan segala ketidakpastian tersebut, Indonesia –dan juga dunia- telah belajar beradaptasi pada dunia yang diwarnai dengan pandemi. Mobilitas internasional tetap diupayakan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Berbagai forum diplomasi diselenggarakan secara jarak jauh maupun hibrid. Kondisi Pandemi secara langsung berdampak akan akselerasi transisi ke ekonomi digital secara signifikan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Kondisi-kondisi yang demikian itu tentunya mempengaruhi praktik dan capaian kebijakan luar negeri Indonesia, yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan nasional, sebagaimana tergambar dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Upaya-upaya mewujudkan tujuan nasional harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak terisolasi dari berbagai perkembangan lingkungan internasional yang dinamis. Kebijakan Luar Negeri yang tanggap, tangguh, dan konsisten untuk memajukan

kepentingan nasional adalah kunci penting untuk menjaga supaya perkembangan atau disrupsi di tingkat global tidak berdampak kontraproduktif pada pencapaian tujuan nasional, atau bahkan mampu mengubahnya menjadi peluang kemajuan.

Untuk membantu mendapatkan gambaran yang terukur mengenai pencapaian kebijakan luar negeri Indonesia tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyusun Indonesia Foreign Policy Index (IFPI) yang telah dimulai perhitungannya sejak tahun 2019 (untuk penilaian Indeks tahun 2018) sebagai *pilot* penghitungan indeks ini. Instrumen ini yang diharapkan secara praktis dapat digunakan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan akan arah kebijakan serta strategi kedepan yang lebih terukur dan tepat sasaran. Setelah itu, penghitungan IFPI telah dilaksanakan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk masing-masing tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 ini, IFPI digunakan untuk mengukur pencapaian kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2021.

## **B. Apa itu Indonesia Foreign Policy Index?**

*Indonesia Foreign Policy Index* (IFPI) merupakan indeks komposit yang dirancang untuk menggambarkan secara komprehensif akan pencapaian akan dampak kebijakan luar negeri pada berbagai dimensi dan kontribusinya pada pencapaian tujuan nasional.

Pengukuran IFPI tersusun atas indikator-indikator yang terbagi dalam empat dimensi, yaitu dimensi keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan kepemimpinan.

## **C. Landasan Konseptual**

Dalam literatur akademik, *foreign policy* ini didefinisikan sebagai:

*“the sum of official external relations conducted by an independent actor (usually but not exclusively a state) in international relations”*

“Gabungan semua hubungan eksternal resmi yang dilaksanakan oleh suatu aktor independen (biasanya tapi tidak terbatas pada negara) dalam hubungan internasional.”

(Christopher Hill, 2016: 4)

Untuk melihat definisi *foreign policy* yang tepat menurut perundang-undangan yang berlaku, penyusun merujuk kepada Undang Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pada BAB I Pasal 1 Ayat 1, terdapat konsep ‘Hubungan Luar Negeri’ yang didefinisikan sebagai “*setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga*

*negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau negara Indonesia.”* Selain itu, pada BAB I Pasal 1 Ayat 2, terdapat konsep ‘Politik Luar Negeri’ yang didefinisikan sebagai *“kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.”*

Melihat kedua konsep tersebut dan membandingkannya dengan definisi akademis *foreign policy* yang telah dibahas sebelumnya, cukup jelas bahwa konsep ‘Hubungan Luar Negeri’ tidak sesuai dengan konsep *foreign policy* karena cakupannya jauh lebih luas, yaitu meliputi yang dilakukan pemerintah maupun aktor-aktor lainnya seperti *“badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau negara Indonesia.”* Selain tidak sesuai secara konseptual, penggunaan konsep hubungan luar negeri juga tidak sesuai dengan tujuan penyusunan dan penggunaan indeks, karena akan membuat cakupannya sangat luas sehingga sulit untuk diukur.

Sementara itu, konsep ‘Politik Luar Negeri’ sangat sesuai dengan konsep ‘*foreign policy*’ (kebijakan luar negeri): ‘*Sum of official external relations*’ sesuai dengan *“kebijakan, sikap, dan langkah....dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subyek hukum internasional lainnya.”* ‘*Conducted by an independent actor*’ dalam konteks ini dijelaskan sebagai *“Pemerintah Republik Indonesia.”* Sementara itu, *“dalam rangka menghadapi masalah internasional”* sesuai dengan *‘in international relations.’* Meskipun demikian, selain memberikan definisi spesifik untuk konteks Politik Luar Negeri Indonesia, UU ini juga memberikan tambahan mengenai aspek tujuan, yaitu *“guna mencapai tujuan nasional.”* Keselarasan definisi konseptual ini juga ditunjang dengan kesesuaian dengan tujuan penyusunan dan penggunaan indeks, yaitu untuk menjadi instrumen yang cukup komprehensif untuk mengukur capaian dan efektivitas politik luar negeri Indonesia dan menjadi masukan bagi proses *evidence-based policy making*, khususnya dalam ranah kebijakan luar negeri.

Berdasarkan pemahaman tersebut, indeks ini berangkat dari pendefinisian Kebijakan Luar Negeri sebagai segala kebijakan, sikap dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam melakukan hubungan dengan aktor-aktor eksternal seperti negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, untuk mencapai tujuan nasional. Dengan pemahaman demikian, maka tujuan nasional dijadikan jangkar untuk menilai pencapaian kebijakan luar negeri Indonesia.

## D. Metodologi

Indeks ini disusun berdasarkan empat tujuan nasional sebagai panduan utama. Keempat tujuan nasional tersebut selaras dengan beragam kajian akademik yang secara umum melihat bahwa tujuan nasional (*national objectives*) yang kemudian diturunkan menjadi kepentingan nasional (*national interest*) meliputi beberapa dimensi, yaitu keamanan, ekonomi, serta *soft power* (Nye, 1999; Rajan, 1953; Pham, 2008; Shembilku, 2004). Dalam konteks penyusunan Indeks ini, tujuan nasional Indonesia kemudian disarikan menjadi empat dimensi utama, yaitu keamanan, ekonomi, sosial-budaya, serta kepemimpinan.

Untuk menjembatani antara “dimensi tujuan nasional” menjadi “indikator” yang spesifik, diperlukan identifikasi terhadap elemen-elemen yang menyusun dimensi tersebut. Elemen-elemen dari dimensi disusun berdasarkan kajian literatur dan analisis terhadap kegunaan praktisnya. Dalam hal ini, konsep-konsep akademik seperti “*security*”, “*economic diplomacy*”, “*public diplomacy*”, dan “*leadership*” digunakan sebagai panduan awal untuk “memecah” masing-masing dimensi ke dalam elemen-elemen yang kemudian dapat diturunkan menjadi indikator-indikator di masing-masing elemen.

Langkah ini sesuai dengan metode yang dikenal sebagai *bricolage*. Berasal dari istilah yang secara umum mengacu pada penciptaan karya dengan memanfaatkan bahan-bahan atau sarana yang sudah ada, *bricolage* dalam metode ilmu sosial merupakan bentuk pendekatan kualitatif yang mengkombinasikan berbagai teori, metode, interpretasi, atau paradigma untuk mendekati dan menjawab masalah yang diteliti. Menurut Denzin dan Lincoln sebagaimana dikutip dalam Rogers (2012), pendekatan atau metode yang digunakan di dalam *bricolage* untuk mengumpulkan data atau melakukan analisis ditentukan oleh *contextual contingencies* yang dihadapi peneliti. Sebagaimana disinggung di atas, *contextual contingency* terkait keunikan tujuan nasional masing-masing negara serta fokus kepada *outcome* atau hasil kebijakan luar negeri menyebabkan tidak adanya metode baku penurunan tujuan nasional menjadi konsep dan indikator. Perlu diketahui bahwa tujuan nasional Indonesia bukanlah konsep yang *well defined*—selain penyebutan dalam Pembukaan UUD 1945, konsep ini tidak pernah didiskusikan secara mendalam melalui produk hukum lainnya. Hal ini mengharuskan tim penyusun mencari sumber-sumber lain baik akademik maupun legal, untuk menerjemahkan tujuan nasional ke dalam konsep-konsep di atas.

Selain *bricolage*, atas hasil diskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), penyusunan indeks juga menerapkan normalisasi nilai indikator. Normalisasi diterapkan sebelum agregasi data dilakukan. Sebab indikator dalam kumpulan data kerap memiliki unit pengukuran yang

berbeda. Normalisasi nilai yang digunakan dalam indeks ini adalah metode *Min-Max*. *Min-Max* memungkinkan pengukuran indikator memiliki rentang nilai yang identik (0, 1) dengan mengurangi nilai minimum dan membaginya dengan rentang nilai indikator (Freudenberg, 2003; Jacobs et al, 2004 dalam OECD, 2008). Metode *Min-Max* diterapkan pada indikator 8 (tingkat pertumbuhan ekspor Indonesia) dan 23 (jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim pemerintah Indonesia) dengan pertimbangan ketersediaan data yang ada.

Untuk menentukan indikator-indikator, tim penyusun mengikuti kriteria-kriteria berikut: (1) relevansi: indikator tersebut memiliki ‘nilai manfaat’ sesuai dengan kebutuhan penyusunan indeks; (2) akurasi: indikator dapat diukur dengan data yang dapat digunakan untuk secara tepat memperkirakan atau menggambarkan kuantitas atau karakteristik yang hendak diukur; (3) kesesuaian waktu: waktu ketersediaan data dari indikator tersebut sesuai dengan kerangka waktu penyusunan indeks; (4) ketersediaan: indikator tersebut dapat dinilai dengan data yang dapat diakses dari sumber yang valid; (5) interpretabilitas: indikator tersebut dapat dengan mudah dipahami dan digunakan untuk menganalisis keadaan yang digambarkan; dan (6) koherensi: indikator-indikator tersebut terhubung secara logis dan konsisten (d disesuaikan dari OECD and JRC of European Commission, 2008). Untuk menilai aspek-aspek tersebut, tim penyusun melakukan rangkaian diskusi dengan panel ahli dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Proses konsultasi tersebut kemudian menghasilkan anatomi IFPI yang terdiri dari 4 Dimensi, 11 Elemen, dan 24 Indikator.

Tabel berikut ini adalah indikator-indikator dalam IFPI/IFPI beserta definisi operasionalnya. Masing-masing indikator kemudian dinilai sesuai dengan sifat dari masing-masing indikator, baik menggunakan penilaian dari panel ahli, data statistik yang relevan, atau kombinasi di antara keduanya.

**Tabel 1: Definisi Operasional Indeks Kebijakan Luar Negeri Tahun 2021**

No.	Nama Indikator	Definisi Operasional
<b>Dimensi Keamanan</b>		
<b>Elemen Keutuhan Wilayah</b>		
1	Agresi, Invasi dan Aneksasi	Peristiwa/insiden/situasi yang menunjukkan adanya ancaman yang dilakukan secara terbuka dalam bentuk operasi militer, gelar pasukan maupun upaya-upaya provokasi di wilayah teritorial dan/atau perbatasan langsung NKRI oleh negara lain terhadap keutuhan wilayah.
2	Dukungan Asing terhadap Kelompok Separatis dan/atau Agenda Separatisme	Peristiwa/insiden/situasi yang menunjukkan adanya dukungan, bantuan kelembagaan dan/atau pendanaan yang berasal dari aktor yang mewakili negara maupun aktor non-negara di negara lain terhadap kelompok separatis dan/atau agenda separatisme.  “Kelompok Separatis” adalah “Kelompok yang menghendaki kemerdekaan dan atau pemisahan suatu wilayah dari Indonesia.” “Agenda Separatis” adalah upaya untuk memerdekakan dan atau memisahkan suatu wilayah dari Indonesia. Contoh: Organisasi Papua Merdeka (Kelompok), Kemerdekaan Papua (Agenda).
3	Tingkat Ancaman Pelanggaran Wilayah NKRI	Penilaian panel ahli terhadap tingkat ancaman peristiwa/insiden/situasi pelanggaran wilayah NKRI yang dilakukan negara lain dalam bentuk klaim atas wilayah NKRI (baik dalam bentuk pernyataan maupun klaim melalui peta wilayah kedaulatan) dan/atau intrusi provokatif termasuk oleh kapal/pesawat asing.
4	Tingkat Ancaman dari Dampak Belum Tersesainya Perundingan Perbatasan	Penilaian panel ahli terhadap tingkat ancaman yang muncul sebagai dampak belum diselesaikannya perundingan perbatasan dengan mempertimbangkan jumlah dan skala peristiwa/insiden.
<b>Elemen Pelindungan</b>		
5	Dukungan Asing terhadap Aksi Terorisme di NKRI	Penilaian panel ahli terhadap peristiwa/insiden/situasi yang menunjukkan adanya dukungan, bantuan kelembagaan dan/atau pendanaan yang berasal dari aktor yang mewakili negara maupun aktor non-negara di negara lain terhadap tindakan terorisme di wilayah NKRI.

6	Tingkat Keberhasilan Upaya Pelindungan dan Pelayanan wni di Luar Negeri	Kombinasi tingkat realisasi penyelesaian kasus dengan penilaian panel ahli terhadap tingkat keberhasilan upaya pelindungan dan pelayanan WNI di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah RI yang meliputi penanganan kasus (penyelesaian dan/atau pendampingan), pencegahan kasus, serta upaya pelayanan publik lainnya untuk menjamin hak-hak WNI di luar negeri.
<b>Dimensi Ekonomi</b>		
<b>Elemen Perdagangan</b>		
7	Tingkat Pemanfaatan Kerja Sama Perdagangan Internasional	Tingkat Pemanfaatan Kerja Sama Perdagangan Internasional dihitung dari persentase jumlah ekspor Surat Keterangan Asal (SKA) barang preferensi ke negara preferensi dibandingkan total ekspor nasional barang preferensi ke negara preferensi.
8	Tingkat Pertumbuhan Ekspor Indonesia	Persentase tingkat kenaikan atau penurunan ekspor (mencakup barang dan jasa) Indonesia dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan nilai tertinggi dan nilai terendah negara-negara <i>benchmark</i> (Meksiko, Korea Selatan, Turki, Brazil, India, dan Afrika Selatan).
9	Jumlah Kedatangan Wisatawan Asing	Jumlah kedatangan wisatawan asing ke Indonesia dalam satu tahun dibandingkan dengan rata-rata jumlah kedatangan wisatawan asing ke negara-negara yang dijadikan <i>benchmark</i> (Meksiko, Korea Selatan, Turki, Brazil, India, dan Afrika Selatan)
10	Penanganan Hambatan Perdagangan Internasional	Kombinasi tingkat penanganan kasus dumping, subsidi, safeguard, dan hambatan teknis perdagangan yang berhasil dimenangkan dan dihentikan dengan penilaian panel ahli terhadap pencapaian penanganan kasus dumping, subsidi, safeguard, dan hambatan teknis perdagangan di negara tujuan ekspor mencakup kasus pada tingkat bilateral dan multilateral (WTO).
<b>Elemen Investasi</b>		
11	Realisasi FDI/Investasi Asing	Persentase investasi asing masuk ke Indonesia dalam tahun tersebut dibandingkan target nasional pada tahun tersebut.
<b>Elemen Kelembagaan</b>		

12	Tingkat Keselarasan Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi di Tingkat Internasional ke dalam Peraturan Domestik ( <i>regulatory coherence</i> )	Penilaian panel ahli terhadap keselarasan antara kesepakatan perjanjian kerja sama ekonomi di tingkat internasional ke dalam peraturan domestik.
<b>Dimensi Sosial Budaya</b>		
<b>Elemen Negara</b>		
13	Tingkat Kekuatan Paspor Indonesia	Tingkat kekuatan paspor Indonesia dihitung dari skor paspor Indonesia (visa-free dan visa-on-arrival) dibandingkan rata-rata skor negara-negara <i>benchmark</i> (Meksiko, Korea Selatan, Turki, Brazil, India, dan Afrika Selatan) dalam <i>Henley Passport Index</i> .
<b>Elemen Media</b>		
14	Pemberitaan Indonesia pada Media Asing	Tingkat/jumlah pemberitaan Indonesia pada media asing/internasional dibandingkan dengan rata-rata jumlah pemberitaan negara-negara yang dijadikan <i>benchmark</i> (Meksiko, Korea Selatan, Turki, Brazil, India, dan Afrika Selatan) pada periode tahun tertentu.  Pemberitaan tersebut diolah melalui big data dengan pencarian kata kunci perdagangan, investasi, pariwisata, politik, pertahanan, keamanan.
<b>Elemen Masyarakat</b>		
15	Jumlah WNA Penerima Beasiswa Indonesia	Jumlah penerima program-program beasiswa untuk Warga Negara Asing (WNA) yang ditawarkan pemerintah Indonesia, meliputi Dharmasiswa (Kemendikbud), Kemitraan Negara Berkembang (Kemendikbud), dan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) (Kemenlu) dibandingkan dengan rata-rata nilai ideal dari beasiswa Fulbright, Chevening, dan Australia Awards
16	Jumlah Pembelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Jumlah pembelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) pada kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibandingkan target pemerintah periode waktu tertentu.

17	Keikutsertaan Film Indonesia dalam Festival Film Internasional	Jumlah keikutsertaan film Indonesia dalam festival film internasional dibagi rata-rata jumlah keikutsertaan film Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Brazil, India, dan Afrika Selatan dalam festival film internasional dikombinasikan dengan penilaian panel ahli.
<b>Dimensi Kepemimpinan</b>		
<b>Elemen Inisiatif dalam Tata Kelola Global dan Regional</b>		
18	Tingkat Inisiatif Pemerintah Indonesia Menyikapi Isu Global dan Regional	Penilaian panel ahli terhadap jumlah (kuantitas) serta kualitas inisiatif dalam menyikapi isu global dan regional.  “Isu” adalah persoalan persoalan sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan, atau lingkungan yang dapat memberikan dampak pada hubungan internasional di tingkat global dan regional.
19	Tingkat Penerimaan Forum Internasional dan/atau Negara Lain terhadap Inisiatif Indonesia terkait Kerja Sama Internasional tertentu	Perbandingan agregat jumlah negara sasaran yang menyatakan mendukung suatu inisiatif/agenda/posisi yang dipromosikan oleh Indonesia dengan agregat jumlah negara sasaran inisiatif Indonesia pada tahun tersebut. “Negara Sasaran” adalah negara yang diajak untuk mendukung inisiatif.
<b>Elemen Pengaruh dalam Pengelolaan Institusi (Organisasi, Rezim) Global dan Regional</b>		
20	Jumlah WNI di Organisasi Internasional	Kombinasi jumlah WNI yang menduduki posisi manajerial menengah ( <i>mid-level</i> ) hingga senior ( <i>senior-level</i> ) di Sekretariat ASEAN dibandingkan dengan nilai tertinggi warga negara anggota ASEAN di Sekretariat ASEAN dan posisi WNI profesional ( <i>International Professional</i> dan <i>National Professional</i> ) di PBB dibandingkan dengan rata-rata jumlah negara-negara yang dijadikan <i>benchmark</i> (Meksiko, Korea Selatan, Turki, Brazil, India, dan Afrika Selatan) pada periode tahun tertentu.
21	Tingkat Keterpilihan untuk Menjadi Tuan Rumah Event Internasional Strategis	Penilaian panel ahli terhadap jumlah <i>event</i> internasional strategis yang diselenggarakan di Indonesia. <i>Event</i> internasional strategis yaitu event yang dianggap memiliki pengaruh penting dalam hubungan internasional di tingkat global maupun kawasan. Penilaian indikator ini dilakukan melalui diskusi bersama panel ahli.
22	Posisi Strategis yang Diduduki oleh Indonesia dalam Organisasi Internasional	Penilaian panel ahli terhadap posisi strategis Indonesia (baik itu kuantitas dan kualitas) yang diketuai/diduduki/dijabat pada organisasi internasional.

Elemen Pengerahan Kemampuan Nasional		
23	Jumlah Pasukan Perdamaian (PKO) yang Dikirim Pemerintah Indonesia	Jumlah personel pasukan perdamaian yang dikirim pemerintah Indonesia atas mandat dari PBB dibandingkan dengan nilai tertinggi dan nilai terendah negara-negara <i>benchmark</i> (Meksiko, Korea Selatan, Turki, Brazil, India, dan Afrika Selatan).
24	Persentase Bantuan Internasional Pemerintah Indonesia dari Pendapatan Nasional Bruto	Persentase nilai bantuan luar negeri yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk beasiswa, bantuan teknis, bantuan keuangan, maupun bentuk bantuan lainnya dari total nilai Pendapatan Nasional Bruto.

### D.1 Tipologi Nilai IFPI

Nilai akhir dari IFPI digolongkan dalam tiga kategori:

**Tabel 2: Tipologi Nilai *Indonesia Foreign Policy Index***

No	Tipologi	Makna	Rentang Nilai
1.	Garuda Menembus Cakrawala	IFPI optimal: <i>manifest power</i> yang mewujudkan dalam rangka pencapaian tujuan nasional sama dengan atau lebih besar dari <i>potential power</i> .	> 7,5-10
2.	Garuda Mengangkasa	IFPI semi-optimal: <i>manifest power</i> yang mewujudkan dalam rangka pencapaian tujuan nasional cenderung sesuai namun masih di bawah <i>potential power</i> .	> 5-7,5
3.	Garuda Mulai Mengudara	IFPI sub-optimal: <i>manifest power</i> yang mewujudkan dalam rangka pencapaian tujuan nasional secara signifikan lebih rendah <i>potential power</i> .	1-5

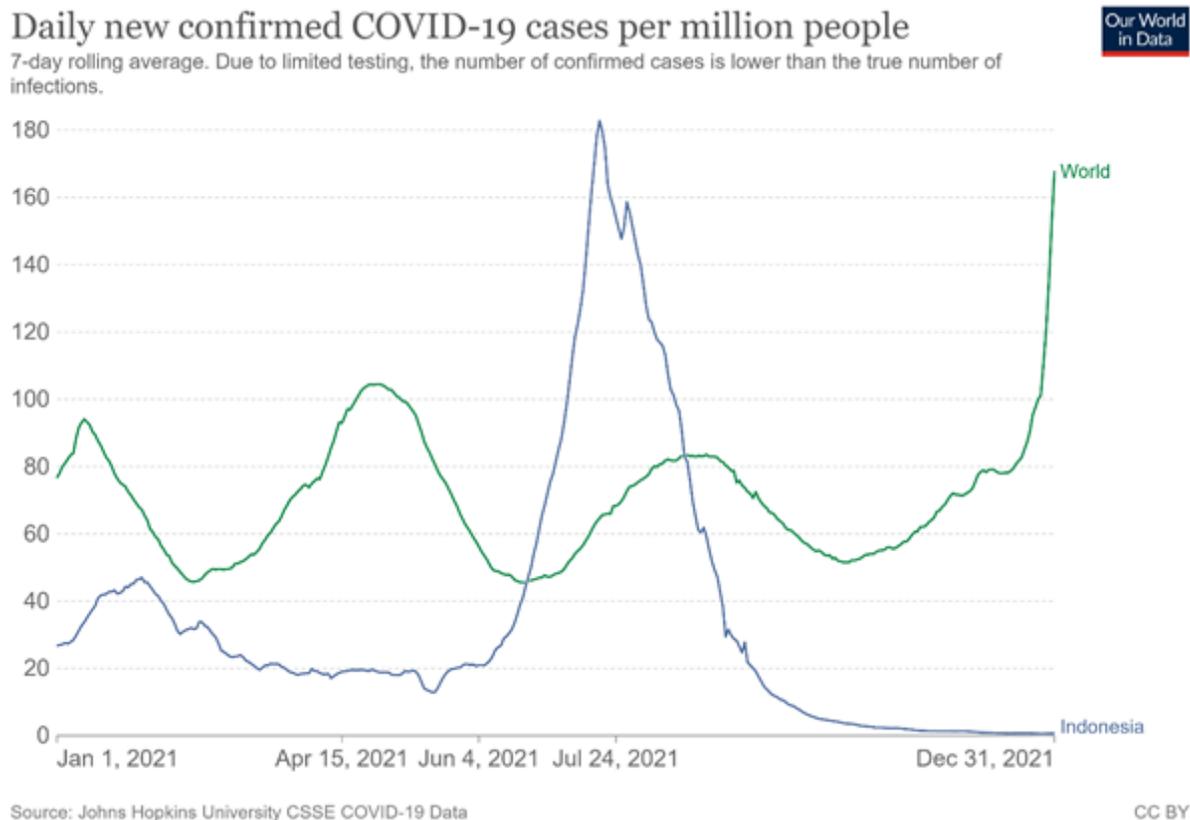
## F. Hasil Penilaian Indonesia Foreign Policy Index 2021

### F.1 Nilai IFPI 2021: Garuda Mengangkasa

Terdapat beragam kondisi internasional yang mempengaruhi pencapaian kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2021. Di antara beragam kondisi tersebut, salah satu yang paling utama tentu saja adalah kondisi pandemi COVID yang belum selesai, seiring dengan munculnya beragam varian COVID melalui mutasi yang membuatnya mampu menembus kekebalan yang disebabkan oleh infeksi maupun melalui pemberian vaksin. Indonesia sendiri mendapatkan pukulan berat ketika terjadi gelombang penyebaran COVID-19 varian B.1.617.2 atau yang lebih dikenal dengan varian Delta pada periode Juni-Juli 2021. Pada puncak periode ini, jumlah kematian harian akibat COVID-19 yang tercatat resmi mencapai 2.069 jiwa. Tentu saja, angka ini kemungkinan besar belum menggambarkan kondisi keseluruhan karena pada periode tersebut sistem kesehatan dan rumah sakit mengalami kesulitan untuk menangani melonjaknya jumlah pasien. Meski berada dalam kondisi yang berbeda, berbagai lonjakan kasus karena mutasi juga terjadi di berbagai belahan dunia.

Optimisme yang sempat menggeliat di awal tahun kemudian harus direvisi. Dunia masih dirundung ketidakpastian. Kondisi ini tentu saja memberikan pengaruh yang besar pada pergaulan internasional, yang masih ditandai dengan keterbatasan mobilitas, disrupsi pada rantai pasokan (*supply chain*), serta beragam tantangan lainnya. Tidak hanya itu, pandemi bukanlah satu-satunya persoalan yang menghadirkan ketidakpastian dalam hubungan internasional. Ketegangan geopolitik semakin meningkat. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih tajam, meskipun Presiden Donald Trump yang mengawali ‘perang dagang’ dengan Tiongkok telah berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2021. Tidak hanya itu, kerusuhan di *Capitol Hill* dan belum jelasnya arah kebijakan luar negeri AS pada masa awal pemerintahan Presiden Biden juga menambah suasana ketidakpastian tersebut. Di belahan dunia lainnya, pasukan Rusia mulai melakukan mobilisasi pasukan pada bulan April 2021 ke perbatasan Ukraina dan wilayah Krimea, mobilisasi terbesar setelah aneksasi Krimea pada tahun 2014. Belakangan, kita mengetahui bahwa hal ini akan berujung pada meletusnya ketegangan geopolitik pada tahun 2022. Sementara itu, beragam institusi internasional juga dinilai berfungsi kurang optimal karena dihambat pandemi dan rivalitas politik.

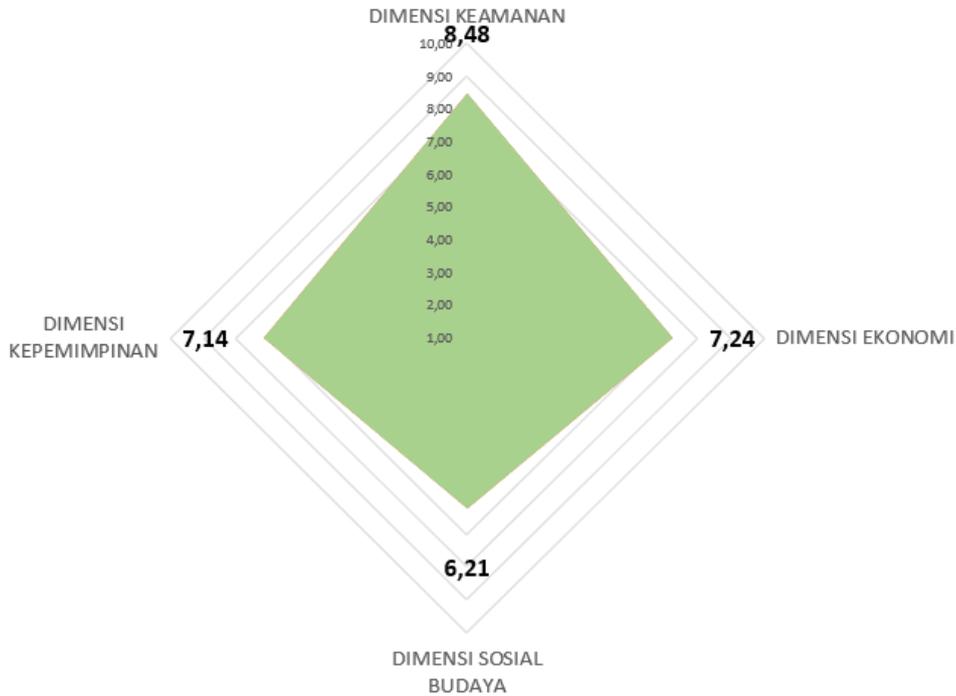
**Grafik 1: Tren Persebaran Kasus COVID-19 Sepanjang Tahun 2021**



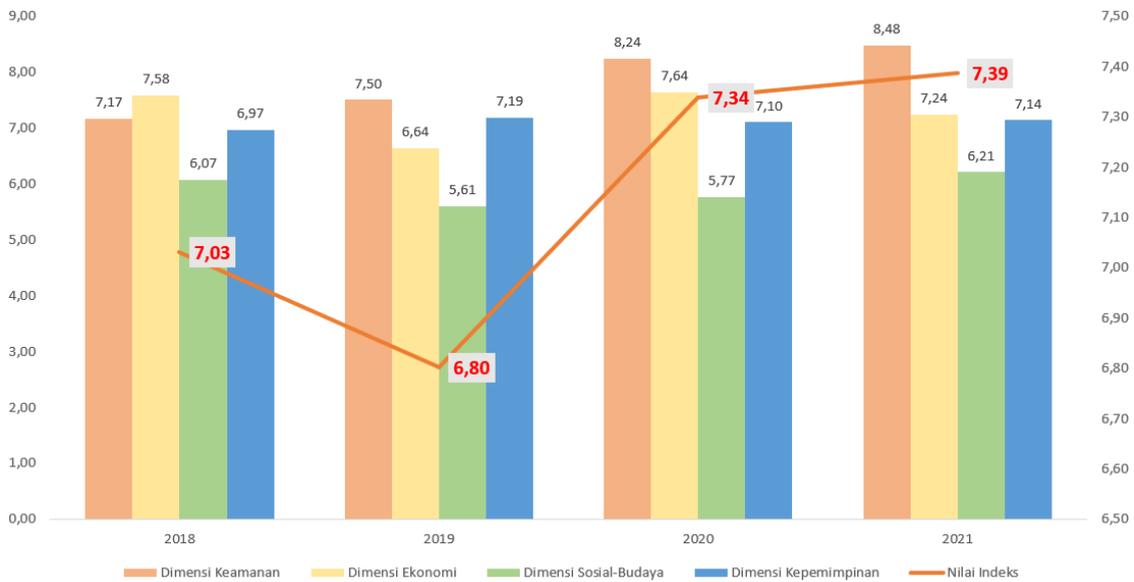
Di sisi lain, dengan segala ketidakpastian tersebut, Indonesia dan juga dunia telah belajar beradaptasi pada dunia yang diwarnai dengan pandemi. Mobilitas internasional tetap diupayakan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pandemi tidak menyurutkan langkah diplomasi Indonesia melalui forum-forum internasional yang diinisiasi Indonesia secara jarak jauh seperti beberapa pertemuan Sherpa G20 dan rangkaian pertama 4<sup>th</sup> Meeting of the Conference of the Parties to the Minamata pada 1-5 November 2021. Selain itu, sebagai bentuk peran Indonesia dalam Dewan HAM PBB, Indonesia menginisiasi konferensi internasional “Regional Conference on Humanitarian Assistance (RCHA)” pada Agustus 2021. Dalam perkembangannya, pandemi turut mengakselerasi transisi ke ekonomi digital, membantu pemulihan ekonomi dengan menjadi tuan rumah kegiatan “International Year of Creative Economy” di Bali.

Dengan kondisi tersebut, secara umum nilai IFPI 2021 cenderung stabil dan cenderung meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Nilai IFPI pada tahun 2021 adalah 7,39 meningkat dari 7,34 (grafik 2). Selama empat tahun terakhir, dimensi keamanan konsisten menempati posisi tertinggi dan dimensi sosial-budaya konsisten di posisi ke-empat (grafik 3).

**Grafik 2: Nilai Indonesia Foreign Policy Index 2021 – 7,39**



**Grafik 3: Tren Nilai Indonesia Foreign Policy Index 2018 – 2021**



Upaya mencari keseimbangan antara berdamai dengan ketidakpastian dan upaya mempercepat pemulihan ini terlihat dari nilai di berbagai indikator dalam IFPI 2021. Meskipun dihadapi akan ketidakpastian, kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan kemampuan untuk

beradaptasi, sebagaimana dunia telah menyesuaikan diri dengan kondisi yang dipenuhi ketidakpastian tersebut. Hal ini dapat dilihat adanya peningkatan di berbagai sektor seperti pertumbuhan ekspor yang mencatatkan angka lebih baik daripada rata-rata negara-negara *emerging economy* yang dijadikan *benchmark* (indikator 8), mulai menggeliatnya kembali upaya diplomasi budaya melalui jumlah penerimaan beasiswa Indonesia dan keikutsertaan dalam festival internasional bergengsi (indikator 17), serta terselenggaranya kembali berbagai *event* internasional strategis di Indonesia (indikator 21). Meskipun demikian, penting juga untuk mencatat bahwa efek dari pandemi masih berdampak signifikan di beberapa indikator lainnya, seperti di jumlah kedatangan wisatawan asing (turun dari tahun 2020 yang mencapai 4,1 juta orang menjadi sekitar 1,5-1,6 juta orang di tahun 2021)<sup>1</sup>. Di sisi lain, pandemi juga memberikan dampak positif pada beberapa indikator, khususnya pada dimensi keamanan, karena terhambatnya mobilitas juga berdampak pada turunnya tingkat ancaman di berbagai indikator.

Tentu saja, faktor eksternal berupa pandemi dan ketegangan geopolitik bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi pencapaian kebijakan luar negeri Indonesia. Faktor-faktor internal juga penting, seperti terlihat dalam indikator tingkat pemanfaatan kerja sama perdagangan internasional (terjadi penurunan persentase pemanfaatan SKA oleh para eksportir nasional), keselarasan antara peraturan domestik dengan kesepakatan internasional (terdapat catatan terkait proses ratifikasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* yang masih belum tuntas di DPR pada tahun 2021), jumlah WNI yang bekerja di institusi internasional, serta pengelolaan bantuan luar negeri (berkaitan dengan tata kelola bantuan luar negeri Indonesia).

## F.2 Nilai Dimensi Keamanan

Secara konsisten, nilai dimensi keamanan memiliki nilai tertinggi dibandingkan nilai pada dimensi ekonomi, sosial budaya dan kepemimpinan. Konsistensi tersebut juga ditunjukkan dengan peningkatan nilai dimensi keamanan sejak penilaian indeks pada tahun 2018, yakni nilai 7,17 di tahun 2018, nilai 7,50 di tahun 2019, nilai 8,24 di tahun 2020 dan 8,48 di tahun 2021. Dari segi elemen dalam dimensi keamanan, kita dapat melihat secara konsisten

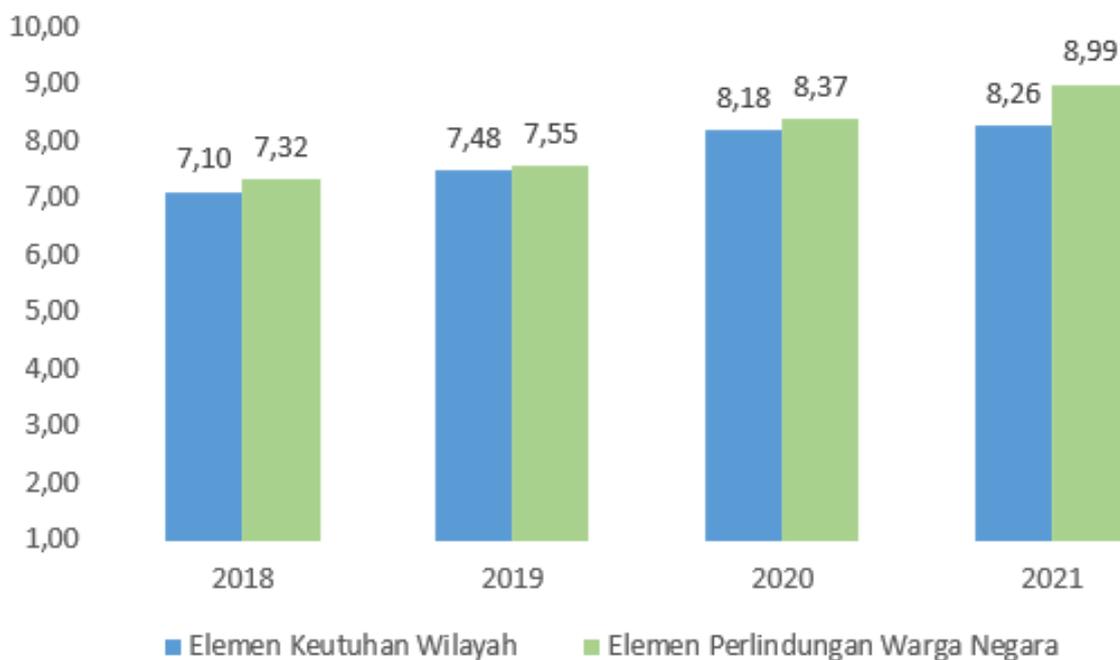
---

<sup>1</sup> Terdapat perbedaan data BPS yang mencatat jumlah kedatangan wisatawan asing sebanyak 1 557 530 orang dan data dari UN WTO yang mencatatkan sebesar 1,6 juta orang. Lihat <https://www.bps.go.id/indicator/16/1821/1/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan-2015-sekarang.html> dan <https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance>.

juga terjadi peningkatan baik elemen keutuhan wilayah maupun elemen perlindungan warga negara.

Tren peningkatan nilai dalam dimensi keamanan ini menunjukkan bahwa adanya kemampuan Indonesia dalam beradaptasi dalam lingkungan yang sangat dinamis. Hal itu ditunjukkan dengan berbagai kebijakan Indonesia yang dilahirkan pada 2019 dalam merespon Perang Dagang AS-Cina dan gejolak *me-first policy*. Kemudian, pada 2020 dan 2021, fokus pada usaha menghadapi pandemi Covid-19. Di 2021, era pandemi belum selesai tetapi kemampuan adaptif Indonesia untuk berusaha pulih penting untuk diperhatikan ditambah dengan adanya ancaman yang muncul dari persaingan geopolitik dan eskalasi tensi antara Ukraina-Rusia dilengkapi dengan ancaman perubahan iklim yang mendorong adanya ketidakpastian global. Dalam merespon berbagai kondisi tersebut, independensi para pembuat kebijakan luar negeri patut menjadi perhatian. Hal ini yang menjadi kunci dalam merespon berbagai ancaman yang ada.

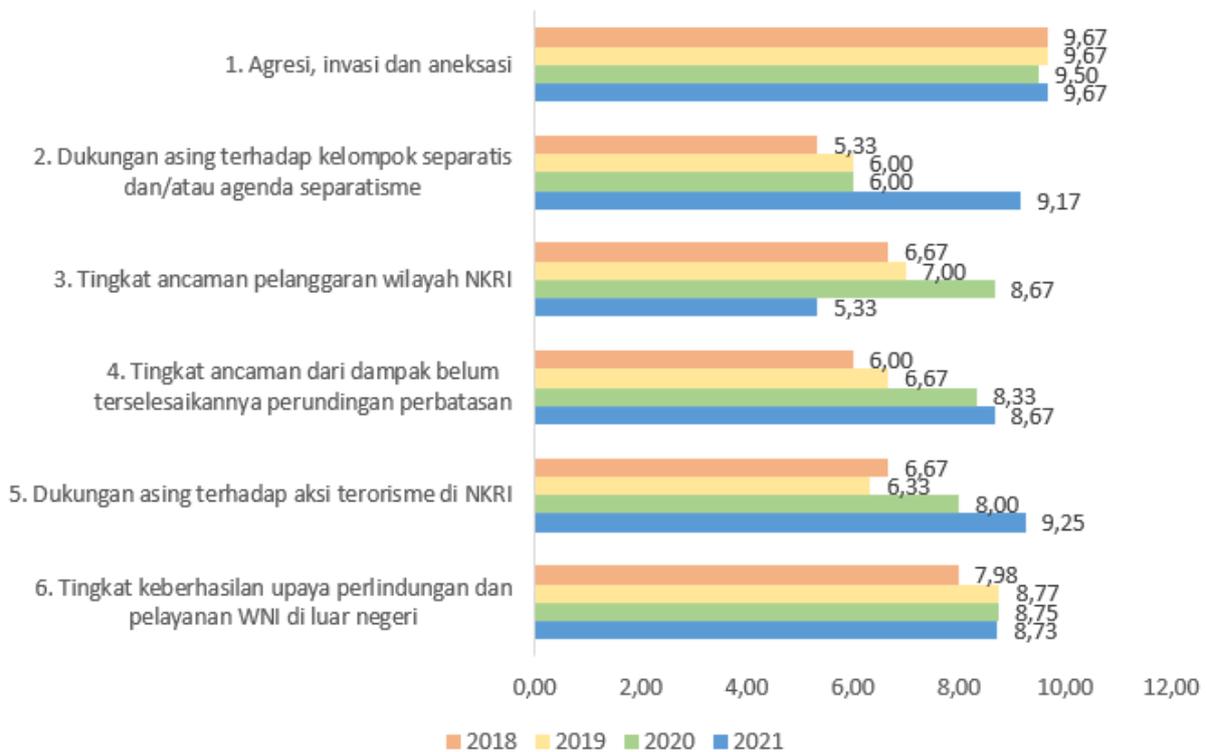
**Grafik 4: Nilai Elemen Dimensi Keamanan *Indonesia Foreign Policy Index* 2018 – 2021**



Tren peningkatan dimensi keamanan juga terlihat dari penilaian setiap indikatornya. Empat (4) indikator dalam dimensi ini mengalami peningkatan mulai dari indikator agresi, invasi dan aneksasi, dukungan asing terhadap kelompok separatis dan/atau agenda separatisme, tingkat ancaman dari dampak belum terselesaikannya perundingan perbatasan dan dukungan asing terhadap aksi terorisme di NKRI. Dua indikator mengalami penurunan penilaian yaitu

indikator tingkat ancaman pelanggaran wilayah NKRI dan tingkat keberhasilan upaya perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri.

**Grafik 5: Nilai Indikator Dimensi Keamanan *Indonesia Foreign Policy Index* 2018 – 2021**



Sepanjang tahun 2021, Indonesia tidak mengalami berbagai bentuk agresi, invasi dan aneksasi dari negara lain. Hal ini secara faktual mendorong adanya peningkatan penilaian dalam indikator 1 yaitu agresi, invasi dan aneksasi. Pasca Perang Dunia Kedua berakhir dan dimulainya era Perang Dingin, nuansa kompetisi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dominan. Hal ini didorong juga dengan negara-negara dunia ketiga memasuki masa dekolonisasi. Kondisi tersebut mendorong dunia memasuki tren invasi, aneksasi dan agresi yang mengalami penurunan signifikan dan tidak lagi populer dilakukan.

Dalam diskusi panel penilaian indikator 1 ini, ahli memandang bahwa agresi dan invasi serta aneksasi hanya mungkin terjadi dalam situasi yang ekstrim dan memiliki sifat yang *high-cost*. Artinya, ada kondisi khusus yang memang mendorong adanya itikad suatu negara untuk mengambil kebijakan yang tidak populer tersebut karena memiliki implikasi yang sangat besar.

Kemudian, penilaian penting panel ahli terkait dengan penilaian indikator 1 terkait dengan keberadaan indikator 1 ini tidak bisa dilepaskan dari bentuk kerja keras diplomasi Indonesia yang digawangi oleh Kementerian Luar Negeri dan K/L lainnya yang terkait.

Capaian ini bukanlah sesuatu hal yang instan dicapai hanya dalam 1 tahun melainkan buah dari proses panjang diplomasi yang sudah dibangun, direncanakan dan dijalankan. Indonesia berhasil dalam mendorong berbagai upaya strategis misalnya dalam penyelesaian berbagai masalah internasional dengan pendekatan yang sifatnya nirkekerasan. Indonesia terus berusaha mendorong adanya sentralitas ASEAN dalam mendukung stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan kawasan.

Usaha dalam menjaga stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan kawasan ASEAN jelas bukan hanya tugas Indonesia melainkan keseluruhan negara-negara di kawasan. Ikhtiar tersebut yang sejak 1971 diwujudkan dengan itikad menjadikan ASEAN dalam ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality). Seruan itu yang kembali didengungkan Indonesia dalam KTT ASEAN-Australia, " Kita harus mampu membangun *culture of conflict* menjadi *culture of peace, trust deficit* menjadi *strategic trust*".

Indikator 2, mengalami peningkatan yang paling signifikan dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya dalam Dimensi Keamanan. Peningkatan signifikan tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai 9,17 di tahun 2021. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya secara berturut, yaitu 5,33 di tahun 2018, 6,00 di tahun 2019 dan 6,00 di tahun 2020.

Realitas di tahun 2021 terkait dengan dukungan asing terhadap kelompok separatis dan/atau agenda separatisme jelas tidak mudah bagi Indonesia. Dominasi di tahun 2021 masih dipenuhi dengan bentuk-bentuk dukungan dalam isu Papua. Dominasi bentuk dukungan asing dalam isu Papua dilakukan oleh organisasi non pemerintah dan dalam isu-isu non-kemerdekaan Papua melainkan isu hak asasi manusia.

Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa kejadian penting di 2021. Organisasi non-pemerintah Papua New Guinea Union for Free West Papua (PNG UFFWP) memberikan dukungan kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bentuk dukungan itu yang juga diberikan oleh Organisasi Brisbane's Catholic Justice and Peace Commission yang mendesak PM Australia Scott Morrison dan pemimpin negara-negara di kawasan Pasifik untuk mendorong adanya misi HAM PBB untuk Papua Barat. Dukungan serupa juga diberikan oleh organisasi non-pemerintah West Papua Action Aotearoa yang mendesak Menteri Luar Negeri (Menlu) Selandia Baru Nanaia Mahuta untuk bersuara terkait dengan kekerasan di Papua Barat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Frank Rai, "NGO Group Supports West Papua," *Papua New Guinea Post-Courier*, diakses melalui, <https://postcourier.com.pg/ngo-group-supports-west-papua/> ; Mark Bowling, "Australia Urged to Support West Papua at Pacific Islands Forum," *The Catholic Leader*, diakses melalui <https://catholicleader.com.au/news/australia/australia-urged-to-support-west-papua-at-pacific-islands-forum/> ;

Realitas tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2020. Secara umum, panel ahli memandang dukungan asing terhadap kelompok separatis di Indonesia mengalami penurunan karena masih dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya selesai dan memerlukan perhatian prioritas.

Panel ahli juga memandang bahwa ada keberhasilan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu Papua. Penyelenggaraan PON XX di Papua memberikan dampak luar biasa dalam citra Papua di level internasional, yaitu dengan menunjukkan gambaran bahwa situasi di Papua yang aman dan kondusif. Disamping itu, Presiden Joko Widodo di sepanjang 2021 melakukan kunjungan ke Papua yang memberikan penekanan bahwa nuansa di Papua stabil. Kegiatan PON ini tercatat dalam Indonesia Pacific for Development.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berhasil dalam penanganan di level negara khususnya kelompok-kelompok politisi dan aktivis di negara-negara tertentu yang masih aktif menyuarakan isu Papua dan menggalang gerakan. Rentang isu yang diangkat mencakup isu HAM dan sosial ekonomi. Kondisi ini bergeser dari yang sebelumnya lebih memfokuskan kepada isu kemerdekaan.

Dari perkembangan di level negara, hanya Vanuatu yang masih secara konsisten memberikan dukungan kepada Papua dengan intensitas dukungan pada isu HAM. Secara rutin suara yang diberikan Vanuatu terhadap Papua dalam forum PBB tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai suatu ancaman disebabkan sifatnya yang reguler. Namun demikian, suara Vanuatu dalam Pacific Island Forum di tahun 2022 perlu menjadi perhatian serius.

Penanganan Indonesia dalam diplomasi internasional terkait isu Papua juga diberikan dengan dibentuknya Direktorat Pasifik dan Oseania di Kementerian Luar Negeri RI. Hal ini menunjukkan bentuk perhatian khusus terhadap penanganan Indonesia dalam melakukan pendekatan terhadap kawasan Pasifik.

Selanjutnya dalam Indikator 3 Tingkat Ancaman Pelanggaran Wilayah, penilaian panel ahli mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian 5,33 di tahun 2021 menurun dari yang sebelumnya 8,67 (2020), 7,00 (2019), dan 6,67 (2018).

Pada tahun 2021, tercatat beberapa capaian Indonesia dalam merespon isu pelanggaran wilayah yang terjadi di perairan Indonesia. Bakamla RI berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan Laut Natuna Utara. Kemudian, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mencatat bahwa adanya penurunan

---

"NZ Govt Urged to Speak Out on West Papua," *RNZ*, diakses melalui <https://www.google.com/search?q=nz+govt+urged+to+spek+out+on+west+papua&oq=nz+govt+urged+to+spek+out+on+west+papua&aqs=chrome..69i57.8561j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

jumlah intrusi kapal berbendera Vietnam yang melakukan penangkapan ilegal di wilayah ZEE Indonesia. Hal tersebut yang mendorong panel ahli berpandangan bahwa pelanggaran wilayah yang dilakukan kapal-kapal asing tersebut tidak secara signifikan terjadi sepanjang 2021.

Sepanjang 2021, Panel ahli menilai bahwa tingkat keasertifan dan intensitas Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap kawasan perairan di Laut Natuna Utara meningkat. Tiongkok juga secara aktif melalui Kapal Risetnya memasuki perairan Natuna. Tindakan *surveillance* dilakukan di dalam kawasan tersebut dengan menggunakan pesawat nir-awak (*drone*). Tindakan Tiongkok ini memunculkan kerisauan tersendiri karena tidak adanya dasar hukum dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dalam lingkungan ZEE di level nasional maupun internasional. Tiongkok juga secara aktif menggerakkan akademisi (sejumlah profesor) dalam klaim atau memberikan penafsiran terhadap pemahaman UNCLOS terkait *nine-dash-line*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penegakkan hukum internasional serta prinsip kebebasan navigasi.<sup>3</sup>

Indikator 4 Tingkat Ancaman Akibat Belum Tuntasnya Perundingan Perbatasan Wilayah mengalami peningkatan penilaian. Nilai 8,67 di tahun 2021 meningkat dari 6,00 (2018), 6,67 (2019) dan 8,33 (2020). Peningkatan penilaian ini seiring dengan beberapa capaian penting di tahun 2021. Indonesia telah melakukan 17 perundingan dengan Malaysia, Palau, Filipina dan Vietnam. Pertama, tim teknis Indonesia berhasil memperoleh kesepakatan untuk memulai perundingan penetapan garis batas Landas Kontinen di tingkat teknis dengan Filipina pada tahun berikutnya. Kedua, Indonesia dan Malaysia juga telah memasuki tahap negosiasi perumusan naskah perjanjian Garis Batas Laut wilayah di Selatan Malaka bagian Selatan dan Laut Sulawesi yang diharapkan dapat masuk proses finalisasi tahun 2022. Ketiga, tim teknis melakukan diskusi teknis penarikan garis batas ZEE dengan Vietnam. Keempat, eksplorasi teknis penarikan garis batas ZEE parsial di segment North Section A (West) oleh tim teknis Indonesia-Palau.

Indikator 5 Dukungan Asing terhadap Aksi Terorisme di NKRI mengalami peningkatan penilaian di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni 9,25 (2021), 8,00 (2020), 6,33 (2019), 6,67 (2018). Panel ahli menilai peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa kerja penting pemerintah dalam merespon berbagai perkembangan aksi terorisme di tanah air. Ketegasan dan pengalaman dalam pengelolaan isu ini di Indonesia menjadi keunggulan yang berimbas kepada peningkatan penilaian yang terjadi di tahun 2021.

<sup>3</sup> Data diakses dari <https://asiatimes.com/2021/09/indonesia-china-go-toe-to-toe-in-gas-rich-natunas/>.

Aksi dan ancaman terorisme di tahun 2021 masih tetap ada, hal ini ditunjukkan dengan ditangkapnya 216 teroris dari jaringan Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Selain itu, ancaman juga terjadi dengan adanya euforia dari kelompok Jamaah Islamiyah di Indonesia imbas dari kebangkitan kelompok Taliban di Indonesia. Panel ahli menilai dari perkembangan tersebut di sepanjang 2021 bahwa pandemi COVID-19 belum secara tuntas selesai. Kondisi ini yang berikan pengaruh tersendiri terhadap penurunan dukungan asing terhadap aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Mobilitas dana dan orang terhadap aksi terorisme terhambat akibat dari pandemi COVID-19.

Indikator lain dalam dimensi keamanan yang mengalami penurunan adalah indikator 6 Tingkat Keberhasilan Upaya Perlindungan dan Pelayanan WNI di luar negeri. Penurunan tidak secara signifikan terjadi (0,02) dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021 indikator ini mendapatkan nilai 8,73 dari yang sebelumnya 8,75 (2020), 8,77 (2019) dan 7,98 (2018).

Tidak bisa dipungkiri nilai yang dicapai oleh Indonesia di tahun 2021 dipengaruhi oleh sikap aktif Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap WNI di luar negeri khususnya yang terjadi di Afghanistan, Malaysia, dan belahan dunia lainnya. Aksi Pemerintah Indonesia dalam pemulangan WNI dari situasi Afghanistan penting menjadi catatan penting dalam hal perlindungan warga negara. Respon cepat yang diambil tidak hanya dalam hal pemulangan WNI dari kondisi ketidakpastian di Afghanistan melainkan juga dalam diplomasi yang dilakukan untuk menjamin keamanan bagi WNI yang tinggal disana. Perlindungan terhadap WNI di India dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan perwakilan Indonesia di India dalam pemulangan sejumlah WNI yang mayoritas adalah anggota Jemaah Tabligh (JT) di India. Hal ini terjadi di tengah-tengah peningkatan warga negara India yang terinfeksi COVID-19. Kemudian, sebanyak 74.419 WNI difasilitasi kepulangannya, termasuk di dalamnya 1.388 Anak Buah Kapal (ABK).

Peran perlindungan WNI di luar negeri tidak hanya lahir dari peran pemangku kepentingan di pusat, melainkan juga peran perwakilan RI di luar negeri. Peran Perwakilan RI terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 menjadi catatan positif tersendiri.

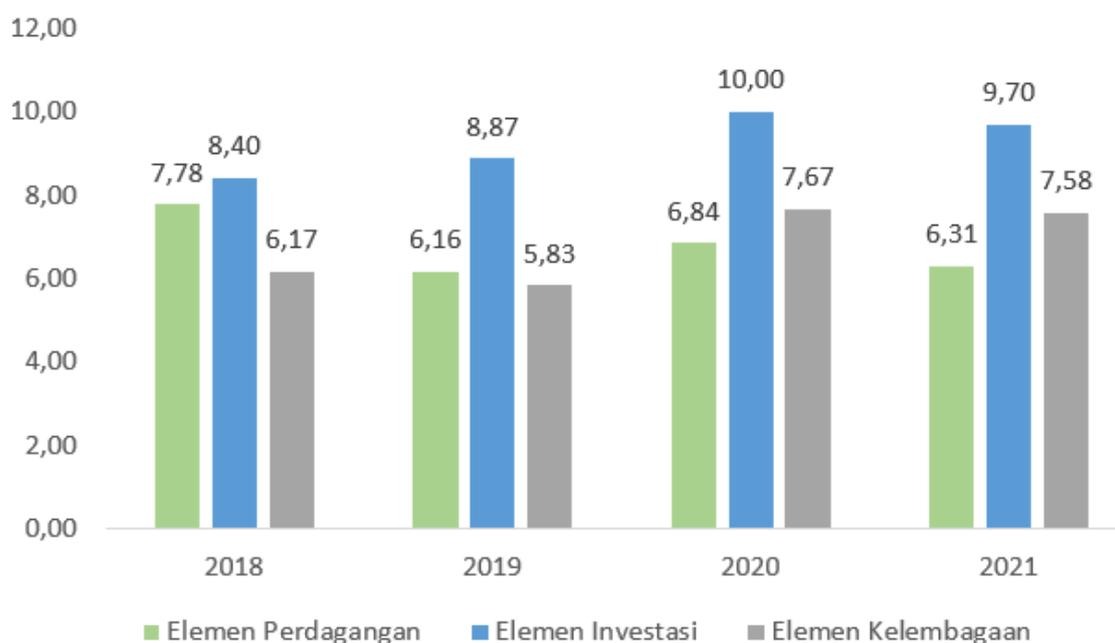
### **F.3 Nilai Dimensi Ekonomi**

Sebagai salah satu dimensi yang ditandai dengan keterhubungan dan kesalingtergantungan yang kuat, Dimensi Ekonomi merupakan salah satu dimensi yang paling sensitif terhadap perkembangan global, termasuk pada disrupsi yang dihadirkan oleh pandemi

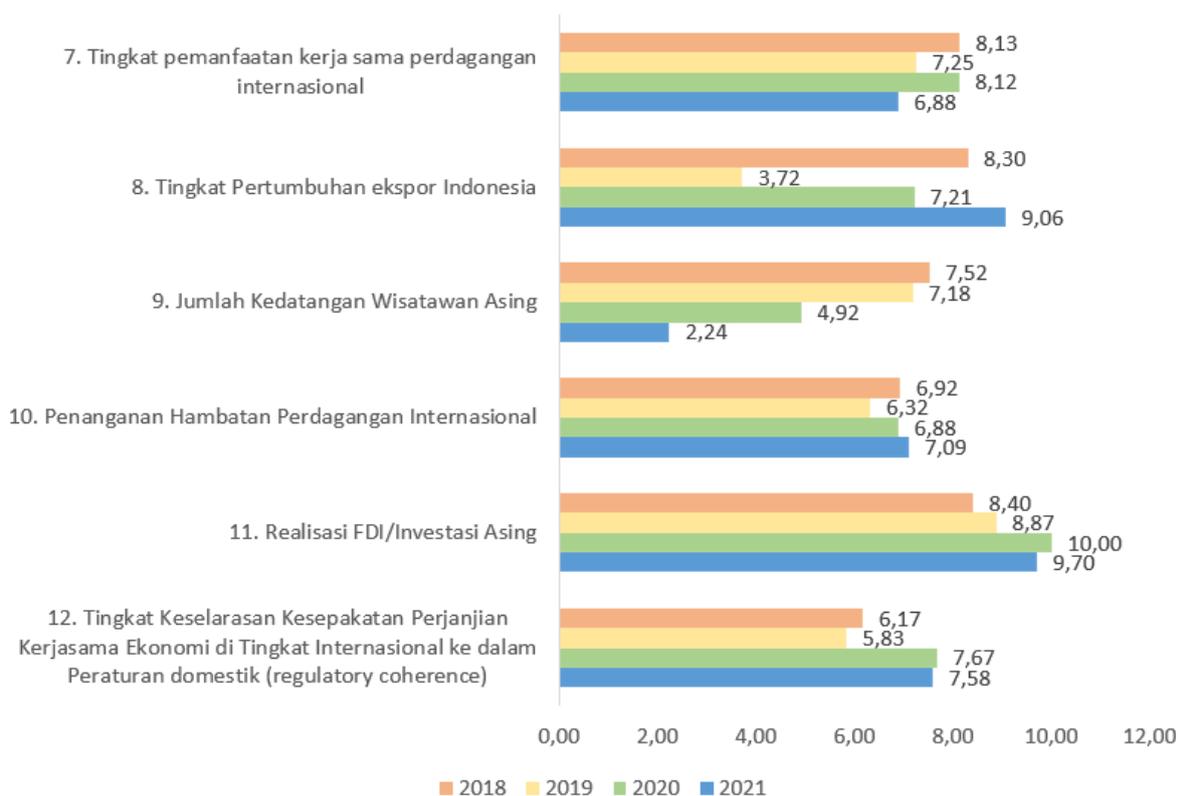
dan ketegangan geopolitik. Pada awal tahun 2021, pemerintah dan bank sentral memiliki proyeksi yang cenderung optimis terhadap perkembangan ekonomi global dan nasional, yang ditunjukkan dengan asumsi awal APBN bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 adalah 5%. Asumsi yang optimis ini akhirnya perlu dikoreksi, terutama setelah melonjaknya kasus akibat dari kehadiran varian Delta di Indonesia pada bulan Juni-Juli 2021 dan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai upaya mitigasinya. Kesenjangan antara pandangan awal yang optimis dan koreksi yang harus dilakukan berdampak pada pencapaian yang dinilai. Dalam indikator realisasi investasi (yang dilihat sebagai pencapaian diplomasi ekonomi), meskipun jumlah realisasi investasinya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun angkanya masih di bawah target yang ditetapkan.

Secara umum, nilai ketiga elemen dalam Dimensi Ekonomi (perdagangan, investasi, dan kelembagaan) relatif stabil, meskipun beberapa indikator mengalami penurunan. Jika dilihat berdasarkan indikator, kita bisa mengklasifikasikannya menjadi tiga kategori: (1) indikator-indikator yang menunjukkan peningkatan, yaitu indikator 8 (tingkat pertumbuhan ekspor Indonesia) dan 10 (penanganan hambatan perdagangan); (2) indikator-indikator yang menunjukkan penurunan nilai, yaitu indikator 7 (tingkat pemanfaatan kerja sama perdagangan internasional), 9 (jumlah kedatangan wisatawan asing), dan 11 (realisasi investasi asing); dan (3) indikator yang cenderung stabil, yaitu indikator 12 (tingkat keselarasan kesepakatan perjanjian kerja sama ekonomi di tingkat internasional ke dalam peraturan domestik).

**Grafik 6: Nilai Elemen Dimensi Ekonomi *Indonesia Foreign Policy Index* 2018 – 2021**



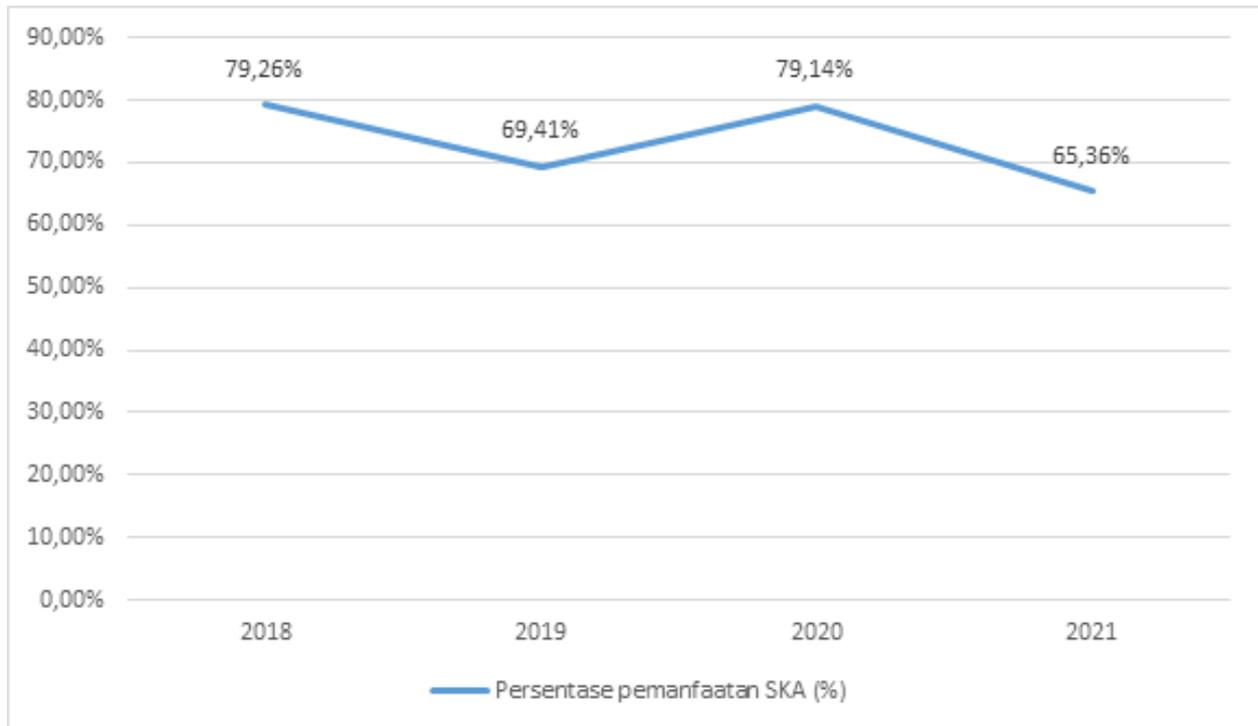
**Grafik 7: Nilai Indikator Dimensi Ekonomi *Indonesia Foreign Policy Index* 2018 – 2021**



Indikator 7, yaitu tingkat pemanfaatan kerja sama perdagangan internasional, mengalami penurunan seiring dengan penurunan persentase pemanfaatan SKA Barang Preferensi ke Negara Preferensi dibandingkan total ekspor nasional barang preferensi ke negara preferensi tersebut, yang turun dari 79,14% pada tahun 2020 menjadi 65,36% pada tahun 2021 (lihat grafik atau tabel 8). Jika dilihat angkanya, sebenarnya jumlah pemanfaatan SKA mengalami peningkatan secara nilai, namun laju peningkatannya berada di bawah laju peningkatan total ekspor nasional barang preferensi ke negara preferensi. Meskipun hal ini juga dapat dimaknai secara positif yaitu bahwa ekspor nasional tumbuh dengan pesat dan menunjukkan pemulihan dari pandemi, persentase pemanfaatan SKA yang berkisar di angka 65% menunjukkan bahwa perlu ada upaya sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi yang lebih baik

untuk mendorong pemanfaatan SKA tersebut supaya hasil-hasil dari diplomasi ekonomi dapat diperoleh secara optimal.

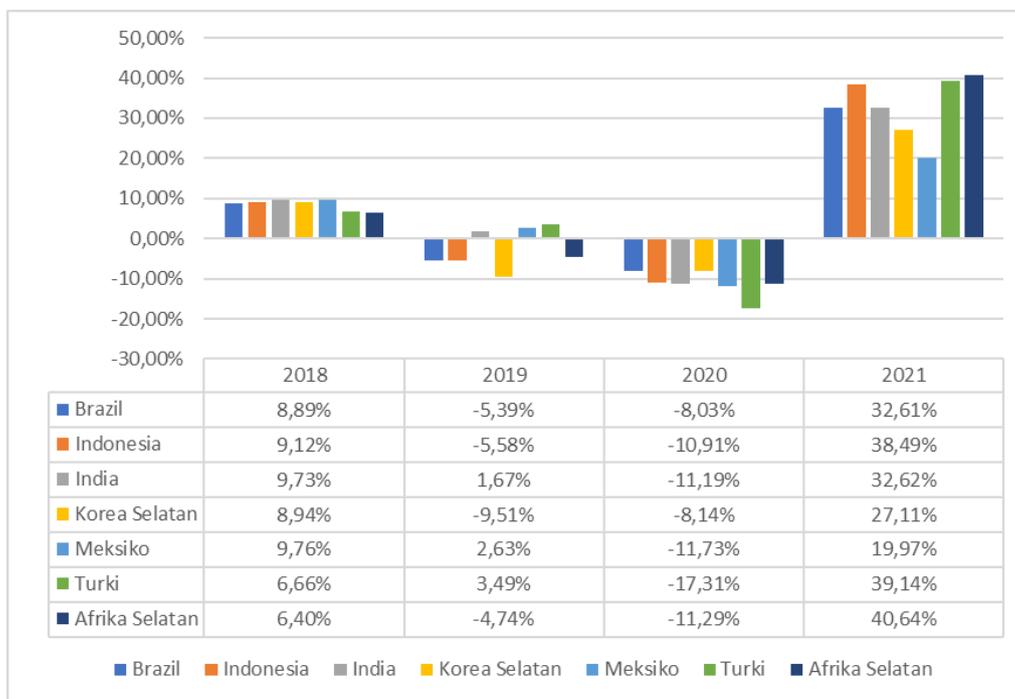
**Grafik 8: Presentase Pemanfaatan SKA Tahun 2018 - 2021**



Pulihnya ekspor Indonesia juga ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekspor yang mencapai 38,49%, bangkit dari -10,91% pada tahun sebelumnya. Nilai indikator 8 (Tingkat Pertumbuhan Ekspor Indonesia) mengalami peningkatan signifikan karena tingkat pertumbuhan ekspor ini lebih tinggi dari rata-rata negara *emerging economies* dan *middle power*<sup>4</sup> yang dijadikan sebagai *benchmark* (lihat grafik 9).

<sup>4</sup> Negara-negara yang dimaksud adalah negara-negara MIKTA dan BRICS kecuali Rusia, Tiongkok, dan Australia

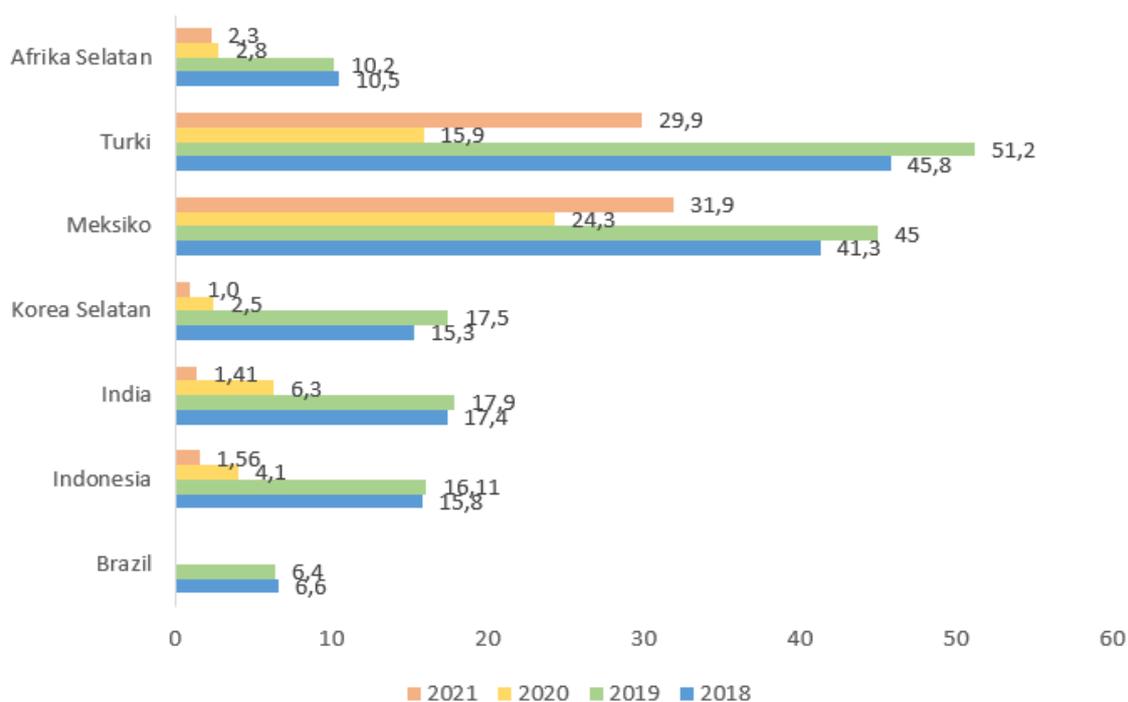
**Grafik 9: Pertumbuhan Ekspor Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Brazil, India, dan Afrika Selatan Tahun 2018-2021**



Jumlah kedatangan wisatawan asing adalah indikator yang masih paling berat terpu-  
 oleh pandemi. Upaya pemulihan sektor pariwisata, termasuk pemberian vaksinasi prioritas  
 untuk para pelaku pariwisata, yang terdampak akan peningkatan tajam akan kasus pada bulan  
 Juni-Juli 2022 dan PPKM yang mengiringinya. Jumlah wisatawan asing yang mengunjungi  
 Indonesia turun secara signifikan dari 4,1 juta pada tahun 2020 menjadi 1,5 juta wisatawan  
 pada tahun 2021.<sup>5</sup> Kondisi yang sama sebenarnya juga dialami oleh beberapa negara  
*benchmark*, seperti India (turun dari 6,3 juta menjadi 1,4 juta) dan Korea Selatan (2,5 juta  
 menjadi 1 juta). Namun, ada pula negara-negara *benchmark* yang relatif pulih, seperti Meksiko  
 (meningkat dari 24,3 juta menjadi 31,9 juta) dan Turki (meningkat dari 15,9 juta menjadi 29,9  
 juta).

<sup>5</sup> “Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan,” BPS, diakses melalui,  
<https://www.bps.go.id/indicator/16/1821/1/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan.html>.

**Grafik 10: Jumlah Kedatangan Wisatawan Asing (Juta Orang) ke Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Brazil, India, dan Afrika Selatan Tahun 2018-2021 (Juta Orang)**



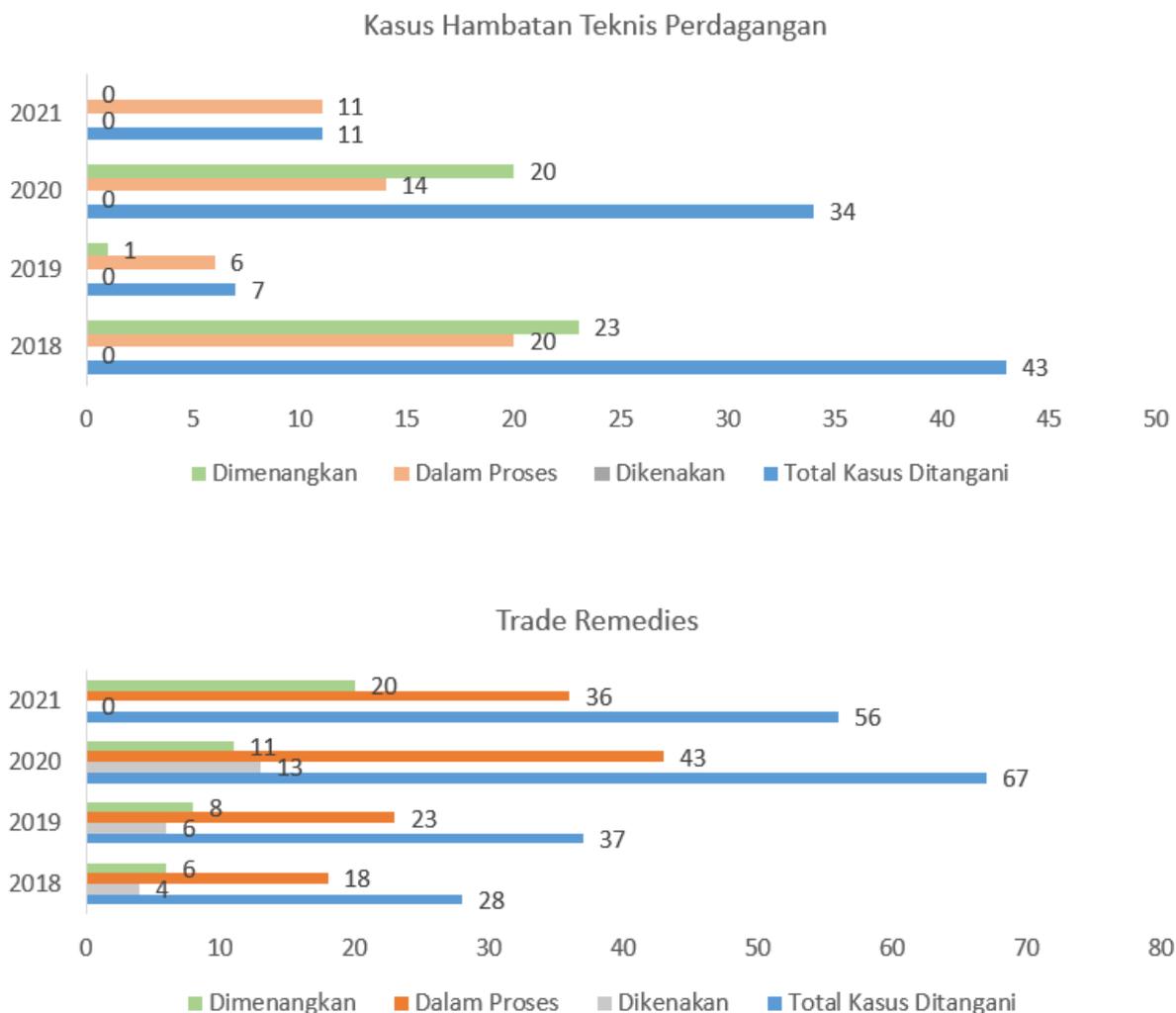
Dalam hal penanganan hambatan perdagangan internasional, terdapat apresiasi positif dari dunia usaha yang melihat bahwa responsivitas berbagai institusi yang menangani hal ini terhitung sangat baik. Pada tahun 2021, terdapat total 20 kasus *trade remedies* yang dimenangkan dan 36 kasus lainnya masih dalam proses dari total 56 kasus. Pencapaian ini meningkat dari penanganan kasus *trade remedies* pada tahun sebelumnya, yang mencatat 11 kemenangan, 43 masih dalam proses, serta 13 kasus dikenakan (kalah) dari total 67 kasus.

**Tabel 3: Jumlah Penanganan Hambatan Perdagangan Internasional (Trade Remedies, Hambatan Teknis Perdagangan, Kasus WTO) Tahun 2018-2021**

Tahun	Dimenangkan	Dalam Proses	Dikenakan (Kalah)	Tota Kasus Ditangani
2018	29	38	4	71
2019	10	31	6	47
2020	31	57	13	101
2021	20	47	0	67

Meski demikian, panel ahli menilai bahwa Indonesia masih relatif defensif dan belum proaktif dalam membela kepentingan dagang nasional. Penggunaan instrumen *safeguard* yang tinggi, alih-alih menggunakan instrumen proteksi anti-dumping maupun anti-subsidi, mengindikasikan bahwa Indonesia cenderung melakukan proteksi dari *fair competition*. Minimnya penggunaan instrumen trade remedies seperti anti-dumping dan anti-subsidi (proteksi terhadap *unfair competition*) juga di satu sisi mengindikasikan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas *market intelligence*-nya dalam rangka mengidentifikasi kecurangan dagang yang dilakukan oleh negara lain serta lebih memahami akar permasalahan daya saing usaha yang ada di dalam negeri.

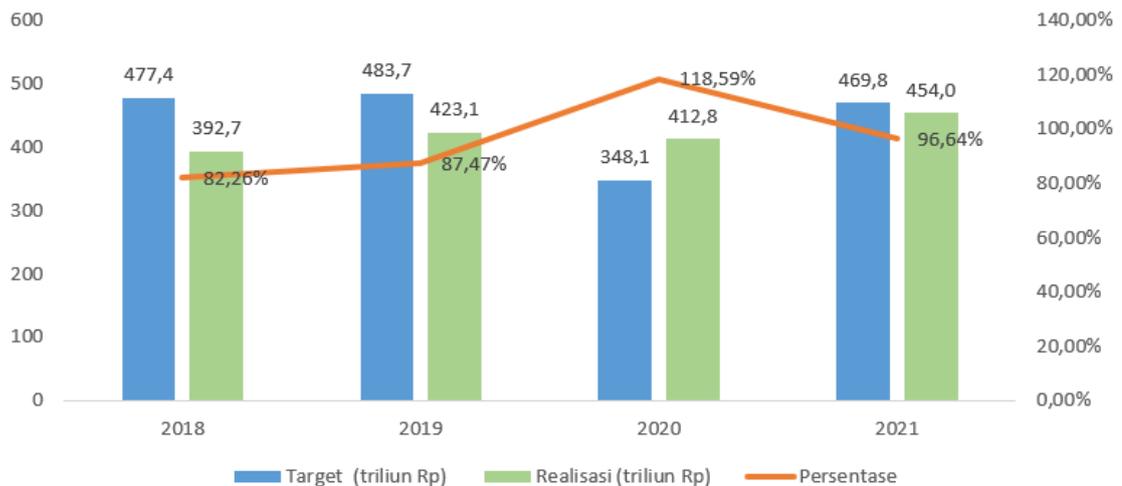
**Grafik 12: Penanganan Hambatan Perdagangan Internasional**



Dalam indikator jumlah investasi asing yang terealisasi, optimisme yang terbangun pada periode penyusunan target harus terkoreksi. Dari target 469,8 triliun rupiah, yang

teralisasi adalah 454 triliun rupiah atau sekitar 96,64%. Bukan angka yang buruk, tapi berbagai faktor disebut-sebut berpengaruh membuat pencapaiannya tidak maksimal, mulai dari pandemi yang ternyata justru berlarut dengan adanya mutasi varian baru sampai kondisi ekonomi dunia yang masih belum pulih dari resesi.

**Grafik 13: Realisasi FDI / Investasi Asing**



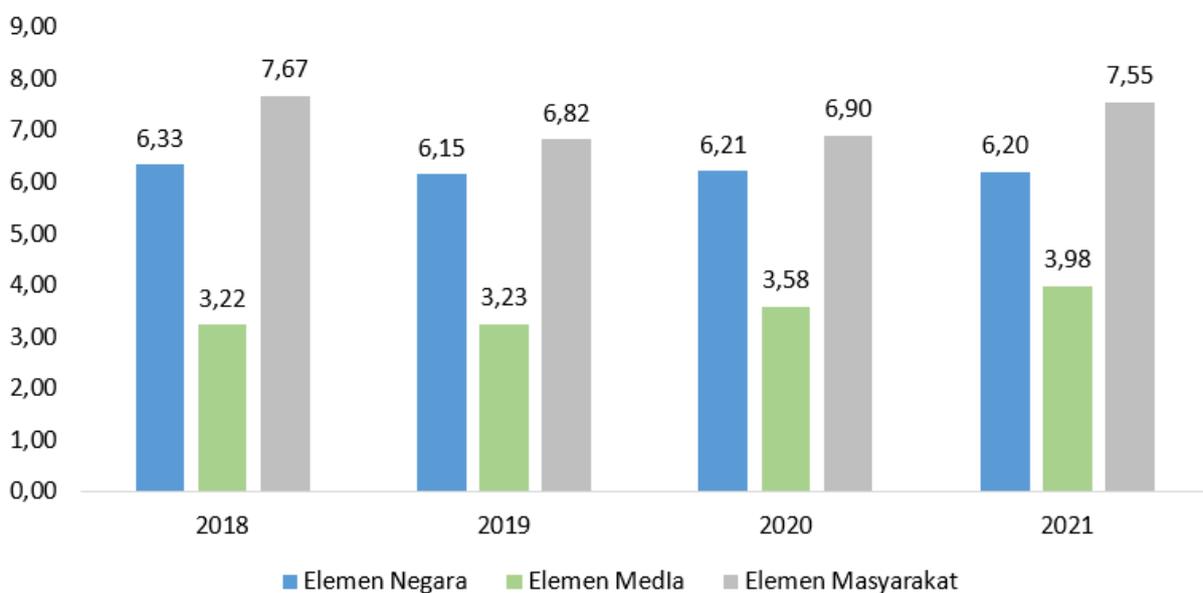
Keselarasan antara perjanjian kerja sama ekonomi internasional dengan regulasi domestik masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dibereskan dengan lebih baik. Upaya membenahi regulasi domestik dilaksanakan melalui penerbitan Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang implementasinya masih terkendala berbagai hal. Selain itu, terdapat pula catatan mengenai proses ratifikasi kesepakatan internasional yang masih cenderung berlarut di tingkat domestik, seperti dalam proses ratifikasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Belajar dari pengalaman IJEPA, proses ratifikasi yang memakan waktu hingga 5 tahun membuat Indonesia tidak berhasil secara optimal memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh kesepakatan tersebut.

#### **F.4 Nilai Dimensi Sosial-Budaya**

Nilai dimensi sosial budaya dari IFPI masih menduduki posisi terendah dibandingkan nilai dimensi keamanan, ekonomi, dan kepemimpinan. Akan tetapi, dimensi ini juga secara berturut-turut mengalami peningkatan 2 tahun terakhir, yakni dari nilai 5,61 pada tahun 2019 menjadi 5,77 di tahun 2020, dan meningkat kembali menjadi 6,21 di tahun 2021. Peningkatan

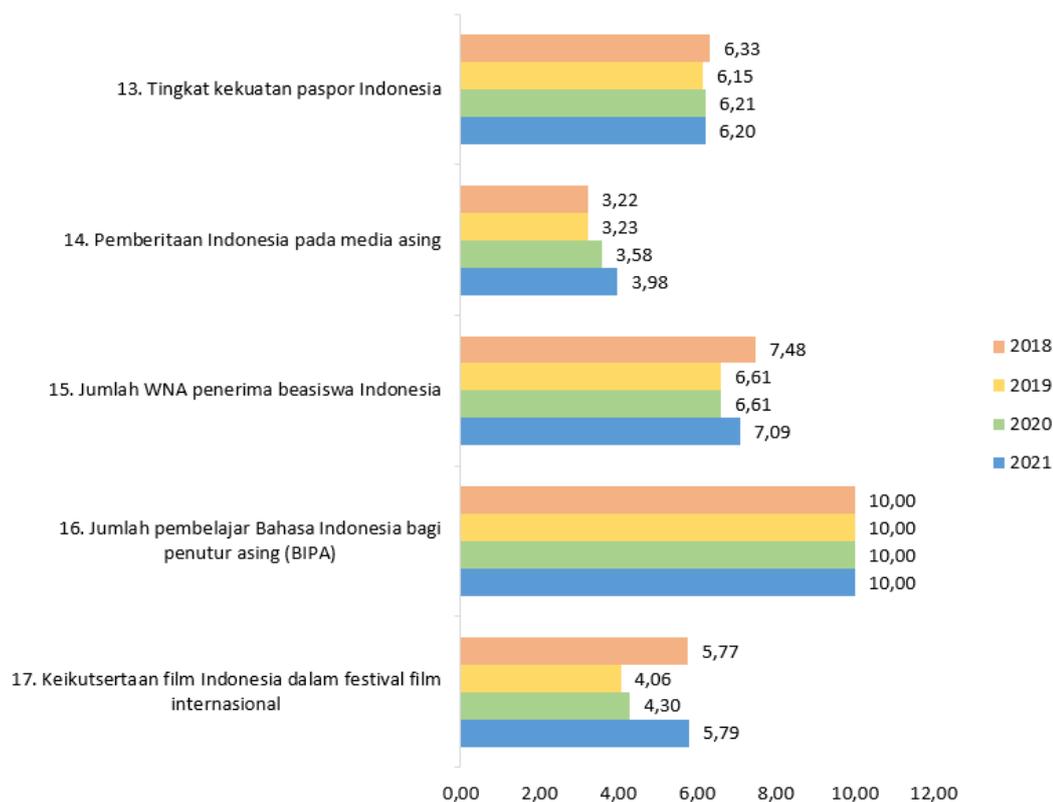
tersebut patut diapresiasi dan harus didorong lebih jauh mengingat dimensi ini berkaitan dengan jati diri bangsa. Di era *Post Truth*, dan Industri 4.0 maupun 5.0, optimalisasi dimensi sosial-budaya menjadi semakin genting. Fleksibilitas budaya yang kerap menjadi alat *soft diplomacy* sudah semestinya dapat lebih ditingkatkan guna menciptakan *total diplomacy* yang melibatkan berbagai elemen dan dimensi. Dengan demikian, harapannya Indonesia dapat mencapai kepentingan nasional serta turut berkontribusi dalam peradaban dunia sebagaimana mandat Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

**Grafik 14: Nilai Elemen Dimensi Sosial Budaya Indonesia Foreign Policy Index 2018 – 2021**



Seperti halnya dengan tahun sebelumnya, di tahun 2021, COVID-19 juga turut menjadi pertimbangan dalam keberlangsungan aktivitas sosial-budaya yang dilakukan oleh aparatur negara, pelaku bisnis, maupun masyarakat. Walaupun demikian, Indonesia mampu bangkit dan beradaptasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai dimensi sosial-budaya tahun 2021 dengan angka sebesar 7,73% dari tahun sebelumnya. Dari segi elemen juga nampak terdapat peningkatan skor pada elemen media dan masyarakat, sedangkan elemen negara cenderung statis.

**Grafik 15: Nilai Indikator Dimensi Sosial-Budaya *Indonesia Foreign Policy Index* 2018 – 2021**

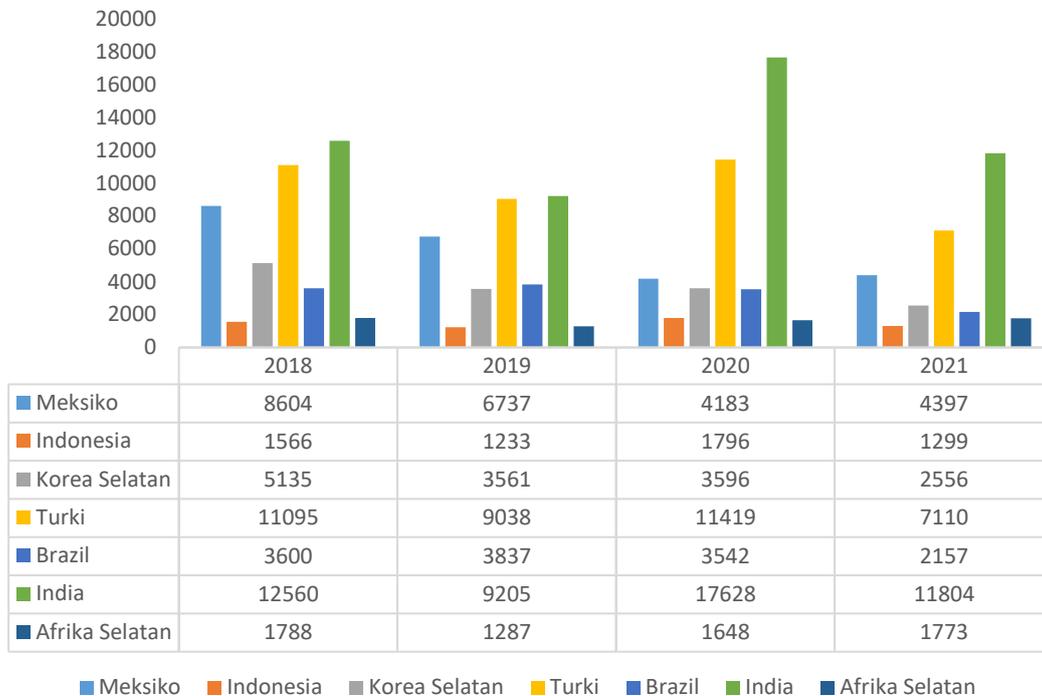


Pada elemen negara yang direpresentasikan dengan indikator kekuatan paspor Indonesia dapat ditilik dari skor yang tidak berubah dari tahun 2020, yakni 71 atau setara dengan posisi 78. Sedangkan skor negara-negara MIKTA BRICS (tanpa Australia, Russia, China) lain adalah sebagai berikut: Korea Selatan (190), Brazil (170), Meksiko (158), Turki (110), Afrika Selatan (103), dan India (58). Dengan demikian, skor paspor Indonesia merupakan salah satu negara dengan skor terendah dari negara-negara *benchmark*. Skor tertinggi dimiliki Korea Selatan tak lepas dari kemajuan ekonomi di Asia. Negara-negara Eropa yang dulu memiliki skor paspor tertinggi sejak tahun 2017 mulai dilemahkan oleh negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.<sup>6</sup> Indonesia sebagai salah satu negara *Middle Power* masih memiliki beberapa pekerjaan rumah untuk meningkatkan skor. Sebab

<sup>6</sup> Whitely & Bloomberg, “Europe once offered the world’s most powerful passports. Not anymore,” *Fortune*, diakses melalui, <https://fortune.com/2022/07/20/worlds-most-powerful-passports-japan-south-korea-singapore-europe-us/>.

kebijakan mengenai paspor tidak selalu perihal mobilitas dalam skema bisnis sebagaimana yang menjadi fokus *Henley Passport Index*, tapi juga dinilai segi keamanan, kekayaan negara, terorisme, demokrasi, dan sejarah peninggalan kolonial (Luedtke, dkk, 2010).

**Grafik 16: Pemberitaan Indonesia pada Media Asing Tahun 2018-2021**



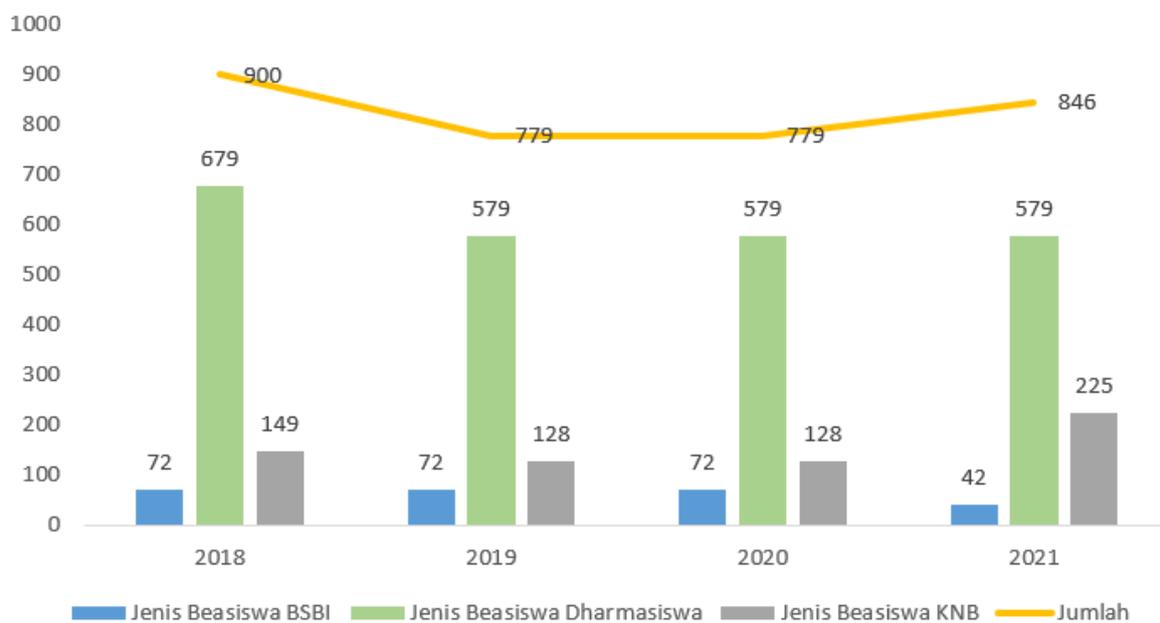
Sumber 2021: Intelligence Media Analytics, 24 Maret 2022 (1801 Media Internasional, Title Only)

Visibilitas Indonesia dalam pemberitaan media digital asing Indonesia di tahun 2021 mencapai 1.299 pemberitaan. Dari segi analisis sentimen, pemberitaan terkait Indonesia didominasi oleh pemberitaan bersentimen netral, diikuti oleh pemberitaan positif, kemudian yang terkecil berupa pemberitaan negatif. Pemberitaan positif diantaranya mencakup upaya penyediaan vaksin, FDI ke Indonesia, Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, komitmen dalam upaya perdamaian di Myanmar, kerja sama di bidang bilateral dan multilateral, peran Indonesia pada G20, upaya Indonesia menekan deforestasi. Pemberitaan netral (paling besar) mencakup isu bencana alam di Indonesia, kebijakan penanganan COVID-19, merger perusahaan di Indonesia, investigasi kecelakaan pesawat di Sriwijaya Air, dinamika konflik di Myanmar, fluktuasi harga minyak dan harga sawit dunia. Pemberitaan negatif mencakup kritik wacana perpanjangan masa jabatan presiden, peningkatan restriksi kunjungan karena kasus COVID tinggi, perundungan karena isu SARA, tragedi pengeboman gereja di Makassar, konflik di Papua yang menelan korban warga sipil, dan lainnya. Peningkatan

visibilitas Indonesia di media digital asing dapat diupayakan dengan strategi kreasi konten lewat media baru (*new media*) agar dapat meningkatkan kualitas dan persebaran yang lebih masif, setidaknya di tingkat Asia Tenggara. Usaha ini dilakukan dengan menggunakan kanal-kanal dengan *niche* khusus yang jangkauannya meliputi seluruh dunia seperti kanal *food-blogger* (Mark Wiens, Food Ranger, Best Ever Food Review Show, dst) atau travel-blogger (Dale Philip, Dan Flying Solo, A Broken Backpack, dan Lili's Travel Plan, dan Drew Binsky, dst).

Salah satu kendala akibat COVID-19 adalah masih terhambatnya fasilitasi beasiswa Dharmasiswa sejak tahun 2020. Akan tetapi jenis beasiswa Indonesia lain masih dapat dilaksanakan di tengah pandemi, yakni Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) yang diselenggarakan secara virtual. Sebanyak 42 orang dari 20 negara mengikuti kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri ini. Sedangkan beasiswa Kerja sama Negara Berkembang (KNB) dibuka kembali dan tercatat 225 orang dari 46 negara memanfaatkan beasiswa ini. Pakistan dan Afghanistan menjadi negara terbanyak yang mengirimkan warganya, di mana masing-masing mendelegasikan 20 orang, diikuti oleh Tanzania, Yemen dan Thailand.

**Grafik 16: Jumlah Penerima Beasiswa Indonesia tahun 2018-2021**



Fasilitasi beasiswa Indonesia secara kuantitas menunjukkan peningkatan dari 779 penerima menjadi 846.<sup>7</sup> Kuantitas ini diperkokoh yang optimalisasi jaringan penerima beasiswa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tengah merangkul alumni penerima beasiswa dua tahun terakhir untuk menjadi duta budaya Indonesia di negara asal. Terkait dengan penerimaan mahasiswa asing asal Pakistan dan Afghanistan, pemerintah Indonesia menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperkenalkan nilai-nilai *wasathiyah* dalam Islam. Keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan beasiswa Indonesia sebagai bagian dari diplomasi publik ini dikukuhkan dengan rencana strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2020-2024 yang juga mencakup kerja sama sosial kebudayaan lain seperti promosi kuliner, promosi nilai-nilai Indonesia, dialog lintas agama, *people-to-people contact*, serta jejaring diaspora Indonesia dan *Indonesianist*.

Dari segi kebahasaan, pembelajar BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) konsisten menunjukkan tingginya antusiasme warga negara asing (WNA) terhadap Bahasa Indonesia. Terjadi peningkatan jumlah pembelajar sebesar 21,19% di tahun 2021. Peningkatan 2 kali lipat pembelajar ini melampaui target 5,000 pembelajar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Meski demikian, menurut pakar sosial-budaya, tingginya minat terhadap Bahasa Indonesia masih kurang diimbangi dengan jumlah pengajar sehingga masih banyak ruang untuk memperkuat indikator ini kedepannya.

Elemen masyarakat dalam dimensi sosial-budaya juga direpresentasikan oleh indikator keikutsertaan film Indonesia di festival film internasional. Di tahun 2021 penyelenggaraan festival film internasional mulai kembali digelar seiring dengan relaksasi pembatasan mobilitas di masa pandemi. Pada tahun ini, Indonesia kembali mengirimkan karya-karya terbaik sineasnya ke festival film internasional seperti Berlin Film Festival, Busan Film Festival, Cannes Film Festival, Shanghai Film Festival, Sundance Film Festival, Toronto Film Festival, dan Venice Film Festival. Indonesia diwakili oleh 9 film. Terbanyak kedua setelah pada tahun 2018 mengirimkan 10 film. 5 dari 9 film Indonesia diputar di Busan Film Festival, 1 film di Shanghai Film Festival dan 3 film di Toronto Film Festival.

Adapun film-film tersebut antara lain: *Photocopier* (2021) karya Wregas Bhanuteja, *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* (2021) karya Edwin, *Yuni* (2021) karya Kamila Andini, *Laut Memanggilku* (2021) sebuah film pendek karya Tumpal Tampubolon, *Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak* (2017) karya Mouly Surya, *Preman* (2021) karya Rudolph

---

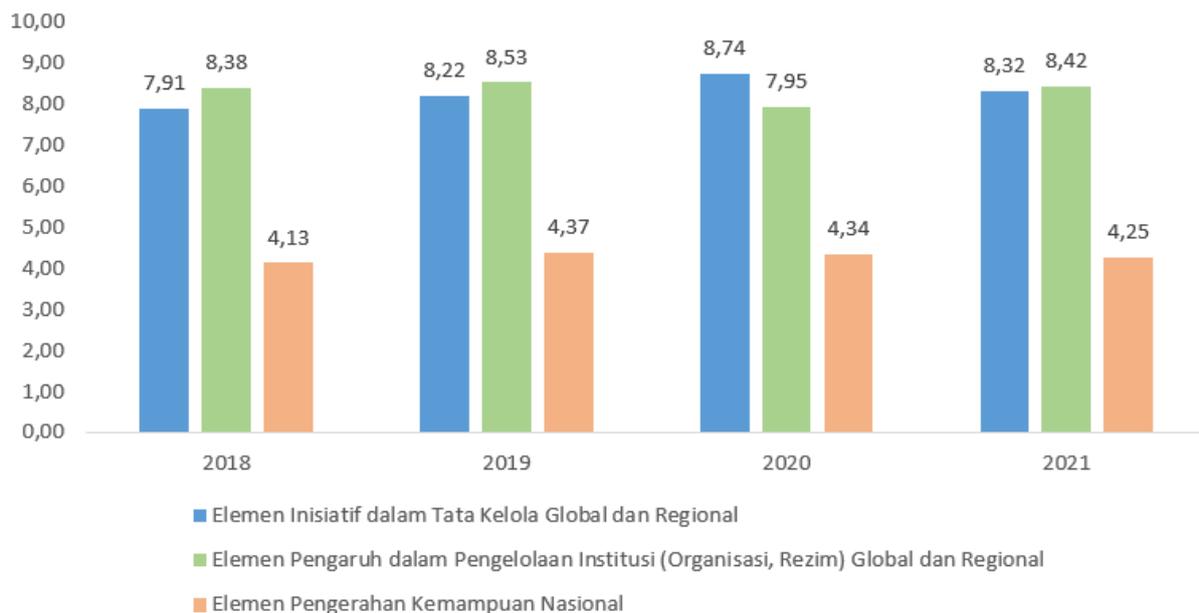
<sup>7</sup> Data penerima Beasiswa Dharmasiswa menggunakan data tahun 2019 karena tahun 2020 dan 2021 tidak diselenggarakan akibat dari Pandemi Covid-19. Data penerima BSBI, Dharmasiswa, dan KNB tahun 2020 menggunakan angka tahun 2019 karena tidak dilaksanakan akibat Pandemi Covid-19.

Zaini, dan *Srikandi* (2021) karya Andrea Widjajanto. Tidak hanya diputar dalam festival-festival film internasional di atas, film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* (2021) juga diputar di Locarno Festival dan satu-satunya dalam sepanjang sejarah perfilman Indonesia yang menerima penghargaan *Golden Leopard*. Sedangkan *Yuni* ditunjuk untuk mewakili Indonesia di Piala Oscar, walau akhirnya gagal tembus nominasi.

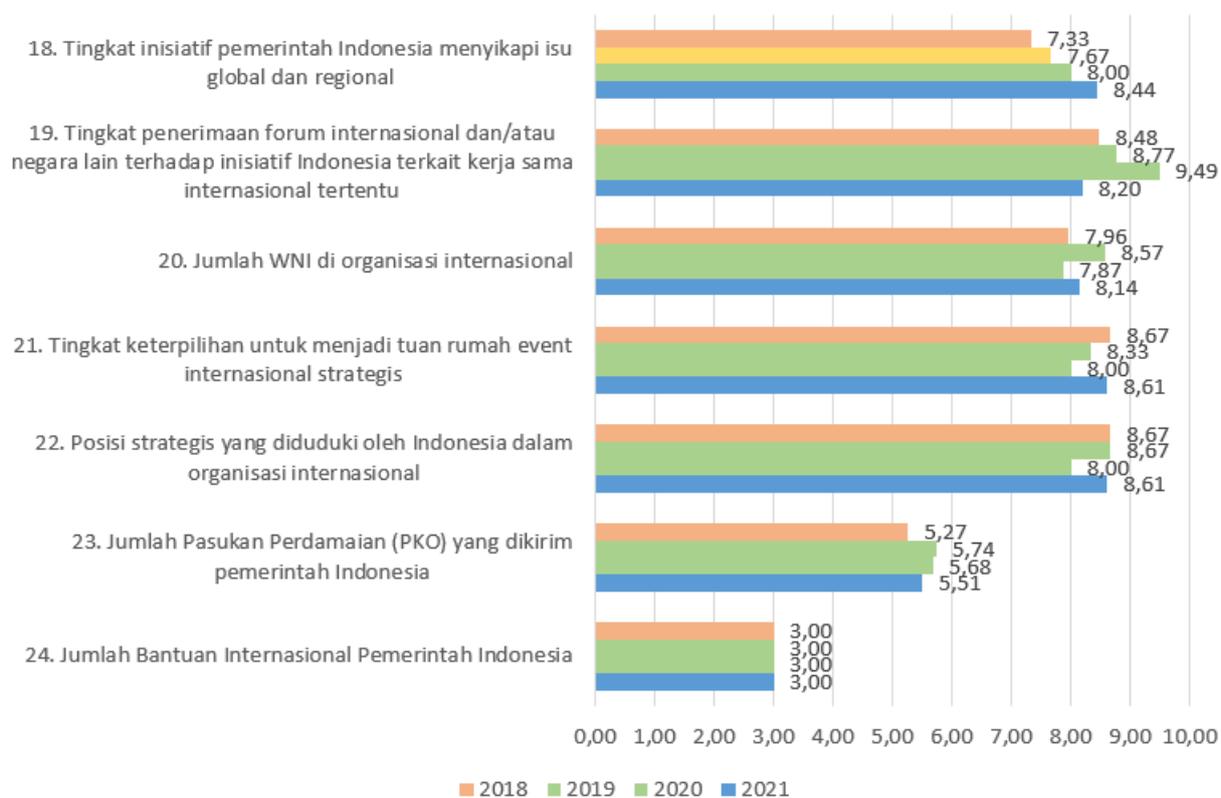
### F.5 Nilai Dimensi Kepemimpinan

Tren penilaian dimensi kepemimpinan relatif stabil sejak awal perhitungan indeks di tahun 2018. Pada tahun 2021, nilai dari dimensi kepemimpinan adalah 7,14. Nilai ini sedikit mengalami peningkatan sejumlah 0,04 poin dari yang sebelumnya 7,10 di tahun 2020. Sebelumnya, di tahun 2019 nilai dari dimensi ini adalah 7,19 dan 6,97 di tahun 2018. Penilaian yang relatif stabil tersebut berasal dari penilaian setiap elemen yang juga stabil. Fluktuasi dalam jumlah yang relatif masih wajar terlihat di elemen inisiatif dalam tata kelola global dan regional serta elemen pengaruh dalam pengelolaan institusi (organisasi, rezim) global dan regional.

**Grafik 17: Nilai Elemen Dimensi Kepemimpinan *Indonesia Foreign Policy Index* 2018 – 2021**



**Grafik 18: Nilai Indikator Dimensi Sosial Budaya Indonesia Foreign Policy Index 2018 – 2021**



Indikator 18 Tingkat Inisiatif Pemerintah Indonesia menyikapi Isu Global dan Regional mengalami peningkatan penilaian di tahun 2021 dengan nilai 8,44. Sebelumnya, di tahun 2020 nilai indikator ini 8,00. Tren peningkatan ini bahkan terlihat dari tahun 2018 dengan nilai 7,33 dan di tahun 2019 dengan nilai 7,67.

Panel ahli menilai peningkatan di tahun 2021 dipengaruhi oleh aktivitas Indonesia yang signifikan dalam peran Indonesia di level internasional. Hal ini ditandai dengan beberapa momentum penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, 2021 adalah momentum awal peralihan presidensi Indonesia dalam keketuaan G20 dari Italia.

Kedua, Indonesia menunjukkan leadershipnya di level regional melalui KTT Menlu ASEAN pada April 2021. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menjadi pionir dalam terciptanya *Five Points Consensus* dalam isu Myanmar. Lima (5) poin tersebut menjadi cerminan kepemimpinan Indonesia sebagai kekuatan yang diperhitungkan di level ASEAN.

Ketiga, isu COP26. Kehadiran Presiden Joko Widodo di Glasgow dalam pertemuan COP26 penting sebagai wujud perhatian Indonesia dalam isu perubahan iklim. Inisiatif yang disampaikan Indonesia sebagai salah satu negara selatan penting untuk disuarakan.

Keempat, Indonesia membuat pernyataan penting untuk mendorong adanya reformasi sistem kesehatan dunia melalui skema Global Pandemic Fund dan memiliki posisi yang jelas dalam isu AUKUS. *Big statement* yang diutarakan Indonesia sebagai bentuk kepemimpinan global Indonesia dalam kerangka politik luar negeri yang bebas aktif.

Namun demikian, panel ahli juga memberikan pandangan tersendiri bagi ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam Sidang Majelis Umum PBB. Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo secara fisik dalam SU PBB itu perlu menjadi perhatian. Pasalnya, momentum SU PBB merupakan momentum sakral bagi setiap kepala negara dalam menyuarakan posisi negara di tingkat internasional dalam berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian bersama.

Panel ahli berpandangan bahwa apa yang dilakukan Indonesia di tahun 2022 merupakan suatu kelanjutan/ *sustainability* di tahun 2021. *Big steps* dan *major actions* Indonesia di tahun 2021 memberikan imbas bagi perjalanan kepemimpinan Indonesia di tahun 2022. Indonesia di tahun 2021 berusaha menjadi *bridge builder* dan *consensus maker* dalam usaha memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di level internasional.

Pada indikator 19 Tingkat Penerimaan Forum Internasional dan/atau negara lain terhadap inisiatif Indonesia terkait kerja sama internasional tertentu mengalami penurunan penilaian menjadi 8,20. Penurunan ini setelah sebelumnya di tahun 2020 nilai dari indikator ini 9,49. Penilaian dalam indikator ini sebelumnya di tahun 2018 adalah 8,48 dan 8,77 di tahun 2019.

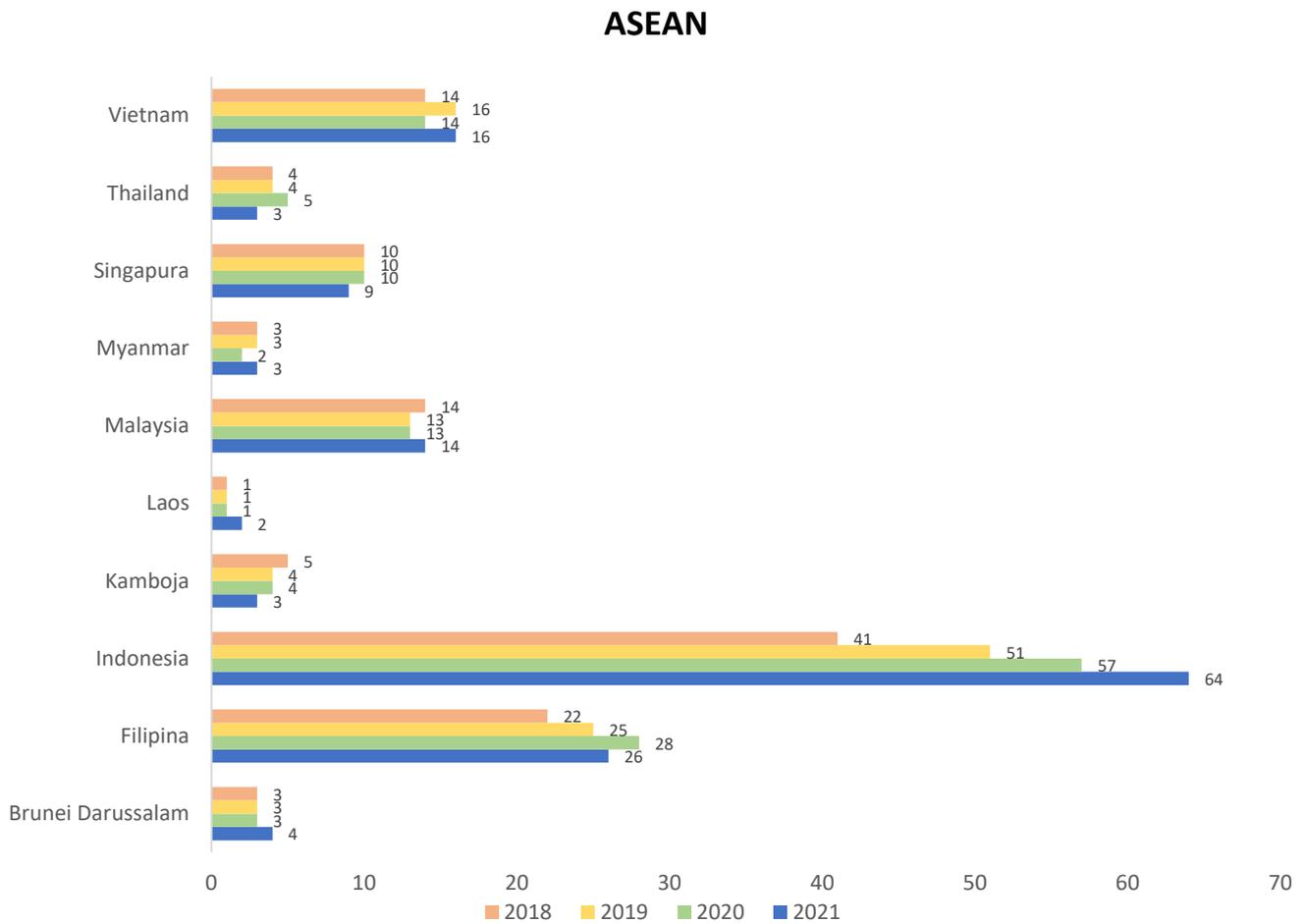
Inisiasi yang digagas Indonesia pada 2021 diantaranya adalah rancangan resolusi PBB terkait dengan *Assistance to the Palestinian People* dan rancangan resolusi DK Nomor 2564 tentang *International Cooperation to facilitate equitable and affordable access to COVID-19 vaccines in conflict areas*.

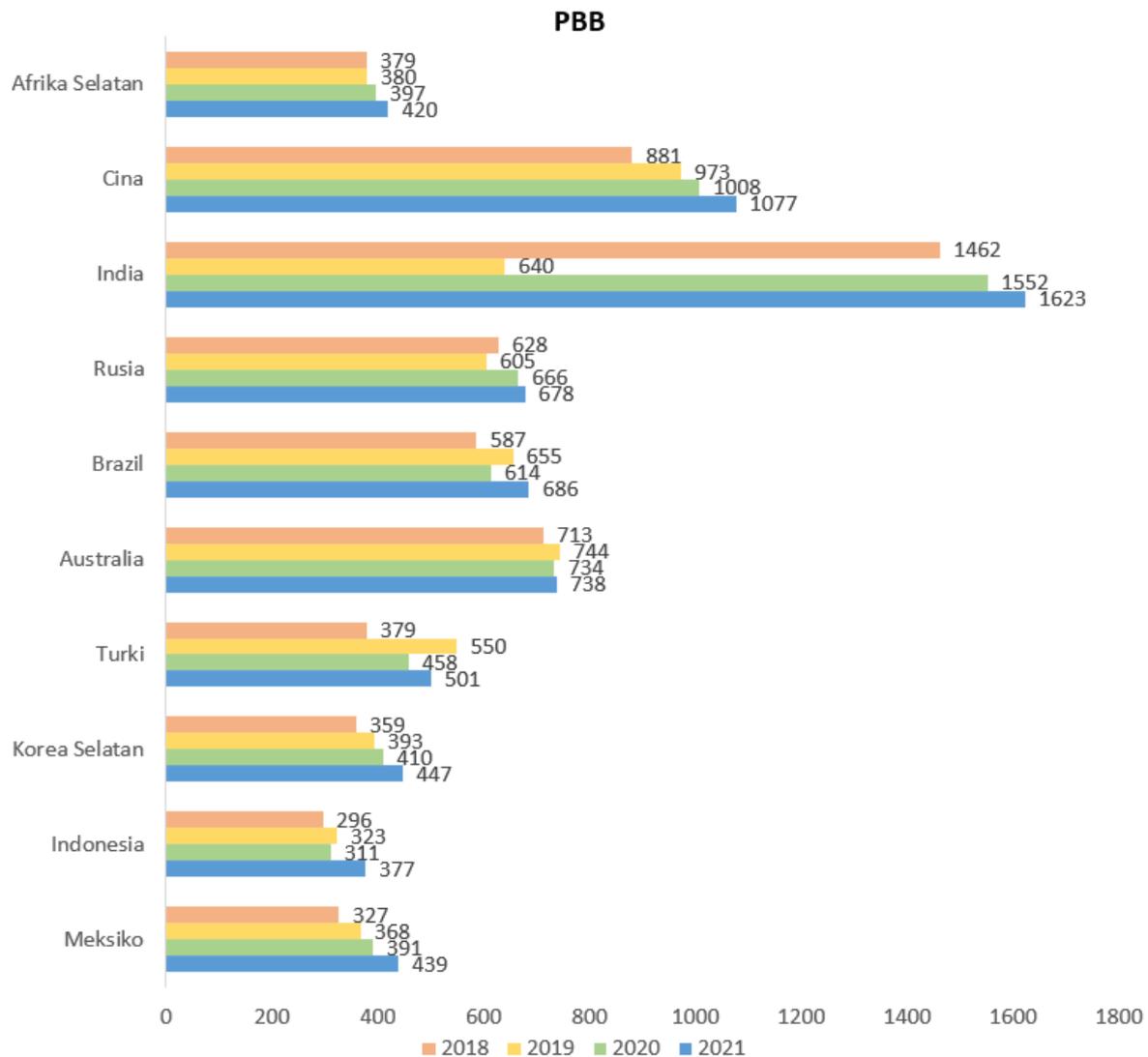
Pada indikator 20 Jumlah WNI di Organisasi Internasional mengalami penilaian yang cenderung fluktuatif. Nilai yang fluktuatif ini terlihat dari tren nilai indikator di tahun 2021 sebesar 8,14 sedangkan sebelumnya di tahun 2020 sebesar 7,87, nilai 8,57 di tahun 2019 dan 7,96 di tahun 2018.

Jumlah WNI di Organisasi Internasional dilihat dari jumlah WNI yang berada di organisasi ASEAN dan PBB. Dalam kesertaan WNI dalam organisasi ASEAN dalam grafik

terlihat bahwa jumlah WNI dapat dikatakan masih mayoritas dan mengalami tren peningkatan jumlah dari tahun 2018. Disamping itu, dalam organisasi PBB menunjukkan bahwa WNI dalam organisasi internasional tersebut menempati posisi terkecil jika dibandingkan dengan beberapa negara *benchmark*.

**Grafik 19: Jumlah Warga Negara Indonesia di Organisasi Internasional**





Pada indikator 21 Tingkat Keterpilihan untuk Menjadi Tuan Rumah Event Internasional Strategis memiliki penilaian yang fluktuatif seperti halnya indikator 20. Indikator ini mendapatkan nilai 8,61 di tahun 2021. Pada tahun 2020 skor indikator ini sebesar 8,00 sedangkan pada tahun 2019 sebesar 8,33 dan 8,67 di tahun 2018.

Panel ahli mengapresiasi usaha yang dilakukan Indonesia dalam membuat kegiatan berskala internasional di tengah pandemi covid-19. Sebagai contohnya, penyelenggaraan World Superbike di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Nusa Tenggara Barat pada November 2021. Event internasional tersebut menyita perhatian baik publik domestik maupun internasional. Tidak bisa dipungkiri bahwa gelaran Superbike di tahun 2021 tidak lebih ramai dibandingkan dengan MotoGP di tahun 2022. Namun demikian, penyelenggaraan Superbike tahun 2021 menjadi pembuka bagi kesuksesan MotoGP.

Realitas penyelenggaraan lomba balap di Mandalika pada tahun 2021 menjadi wujud keberlanjutan dalam usaha mendapatkan perhatian publik terhadap *event* internasional yang ada di Indonesia. Kegiatan tersebut tidak hanya berimbas kepada perhatian publik internasional tetapi juga terhadap animo publik internasional untuk hadir atau mendorong aspek pariwisata di Indonesia di tengah gempuran pandemi COVID-19. Meskipun demikian, tetap harus disadari bahwa penyelenggaraan perlombaan di Mandalika bukanlah suatu produk dari kebijakan luar negeri. Usaha untuk mendapatkan status tuan rumah penyelenggaraan Superbike tentu berbeda bobotnya dengan penyelenggaraan *event* seperti Asian Games, Olimpiade ataupun Piala Dunia. Selain *event* di Mandalika, 2021 juga Indonesia menjadi tuan rumah bagi konferensi COP-4 Minamata.

Momentum 2021 digunakan Indonesia untuk menjadi tuan rumah beberapa kegiatan lainnya. Presidensi Indonesia dalam G20 dimulai dengan menggagas berbagai pertemuan Sherpa G20. Selain itu, sebagai anggota Dewan HAM PBB, konferensi internasional bertajuk Regional Conference on Humanitarian Assistance (RCHA) diadakan di Indonesia dengan mengangkat isu-isu kemanusiaan seperti isu pengungsi. Kemudian, tahun 2021 dicanangkan sebagai *International Year of Creative Economy* dengan Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tersebut di Bali.

Indikator 22 Posisi Strategis yang diduduki oleh Indonesia dalam organisasi internasional memiliki nilai yang sedikit berfluktuasi. Nilai yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 8,61 merupakan peningkatan dari nilai yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 8,00. Sebelumnya di tahun 2019 nilai indikator ini sebesar 8,67 dan serupa di tahun 2018 dengan nilai yang sama.

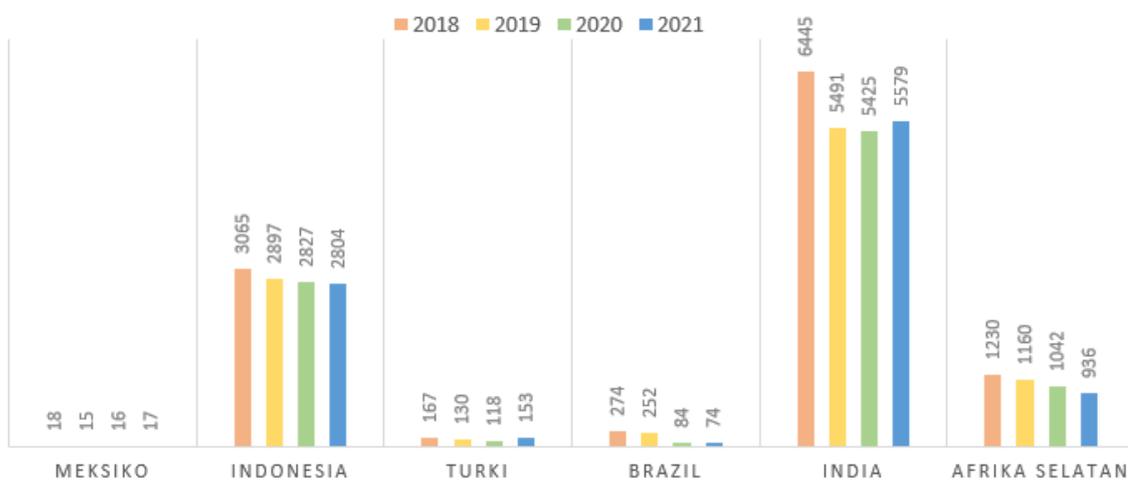
Selama tahun 2021, Indonesia mencalonkan diri di 8 organisasi internasional yang meliputi 6 pencalonan dalam kapasitas negara dan 2 pencalonan dalam kapasitas individu yang diantaranya adalah pencalonan di UNFPA, Postal Cooperation Council dan IMO. Tercatat dalam pencalonan BPK sebagai external auditory dan dalam Timber Organization mengalami kegagalan.

Dari pencalonan yang ada tersebut, fokus terbesar Indonesia dalam presidensi G20. Panel ahli berpandangan bahwa presidensi G20 menunjukkan Indonesia layak dalam posisi tersebut. Hingar bingar yang ada di tahun 2021 terkait dengan G20 tidak bisa dilepaskan dari momentum alih kepemimpinan G20 dari Italia ke Indonesia pada tahun 2020. Hal ini juga yang mendorong panel ahli berpandangan bahwa capaian 2021 tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan yang dilakukan di tahun 2020.

Indikator 23 Jumlah Pasukan Penjaga Perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia mendapatkan penilaian di tahun 2021 sebesar 5,51. Nilai ini cenderung stabil dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2019. Nilai berbeda terjadi di tahun 2018 yang mendapatkan penilaian 5,27.

Jika dibandingkan dengan Meksiko, Turki, Brazil, India dan Afrika Selatan jumlah pasukan penjaga perdamaian Indonesia merupakan yang terbesar kedua setelah India. Jumlah ini konsisten dicapai Indonesia sejak tahun 2018. Komitmen ini menunjukkan itikad Indonesia untuk terus berperan aktif dalam usaha menciptakan perdamaian dunia.

**Grafik 20: Jumlah Pasukan Perdamaian (PKO) yang dikirim pemerintah Indonesia**



Indikator 24 Persentase Bantuan Internasional Pemerintah Indonesia dari PNB merupakan indikator yang secara stabil tidak mengalami perubahan nilai. Penilaian yang diberikan terhadap indikator ini sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 adalah 3,00. Jumlah bantuan internasional Indonesia jika dibandingkan dengan Korea Selatan, Turki, Australia, Brazil dan India masih relatif kecil. Rerata persentase bantuan Internasional yang dimiliki negara-negara tersebut adalah 0,1-1% dari PNB masing-masing negara terkecuali Indonesia.

## G. Kesimpulan

Nilai IFPI 2021 menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, menggambarkan bahwa secara umum pencapaian kebijakan luar negeri Indonesia cenderung stabil dalam kategori “Garuda Mengangkasa”. Seperti juga pada IFPI 2020, IFPI 2021 juga menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia telah memberikan hasil yang baik di berbagai aspek, namun masih belum sesuai dengan potensinya yang lebih besar lagi.

Kemampuan berbagai pemangku kebijakan luar negeri Indonesia menavigasi berbagai ketidakpastian yang dihadirkan oleh pandemi serta ketegangan geopolitik, seperti ditunjukkan oleh peningkatan nilai di berbagai indikator, patut untuk diberikan apresiasi. Pada saat bersamaan, berbagai upaya untuk mendorong pencapaian yang lebih optimal di berbagai indikator perlu untuk diupayakan.

Nilai IFPI 2021 ini juga menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia turut berkontribusi pada upaya percepatan pemulihan dari pandemi. Peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama global untuk menangani pandemi, termasuk untuk mewujudkan keadilan vaksin global, merupakan kontribusi penting tidak hanya bagi Indonesia sendiri tapi juga bagi seluruh negara berkembang. Keterlibatan Indonesia sebagai Co-Chair dalam COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group (EG) adalah salah satu contoh yang patut diapresiasi. Pada tahun 2021, Indonesia juga menerima estafet presidensi G20 dari Italia, menghadirkan peluang peran internasional yang semakin besar. Beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan nilai baik secara nominal maupun nilai indeks menunjukkan bahwa tahun 2021 ditandai dengan pulihnya kembali berbagai sektor yang berkaitan dengan hubungan internasional, seperti terlihat dalam pertumbuhan ekspor yang tinggi, kembali meningkatnya partisipasi dalam festival film internasional, hingga kesuksesan penyelenggaraan berbagai *event* internasional.

Pada saat yang bersamaan, kebijakan luar negeri Indonesia juga terdampak oleh pandemi itu sendiri, yang ternyata masih enggan pergi. Optimisme percepatan pemulihan yang mewarnai awal tahun 2021 harus berhadapan dengan kenyataan bahwa virus penyebab COVID-19 bermutasi dan menghadirkan berbagai varian yang berbahaya, termasuk varian Delta yang menyebar di Indonesia pada bulan Juni-Juli 2021. Angka wisatawan asing yang turun dibandingkan tahun sebelumnya dan angka realisasi investasi yang masih di bawah target menunjukkan hal ini. Penting pula untuk mencatat bahwa pemulihan pandemi juga tidak selalu berarti positif. Beragam ancaman keamanan seperti pelanggaran wilayah serta dukungan pada terorisme dan separatisme yang relatif berkurang selama pandemi juga mulai meningkat. Tiongkok, salah satu kekuatan besar yang terlibat di kawasan, juga tercatat semakin asertif di Laut Cina Selatan.

Meskipun secara umum menunjukkan kapasitas untuk beradaptasi dengan ketidakpastian yang dihadirkan oleh berlarutnya pandemi dan peningkatan ketegangan geopolitik, ada berbagai sektor yang memerlukan perhatian dan upaya yang lebih serius. Beberapa di antaranya merupakan isu yang telah persisten bahkan sebelum pandemi, seperti visibilitas Indonesia di media internasional yang masih rendah dibandingkan negara-negara

*middle power* dan *emerging economies* lainnya, jumlah WNI yang bekerja di organisasi internasional yang masih terbatas, bantuan luar negeri yang belum terkelola dengan optimal, hingga keselarasan regulasi domestik dan kesepakatan perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang masih terkendala. Untuk mengupayakan hal ini, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di antara institusi pemerintah maupun dengan pihak-pihak di luar pemerintahan menjadi penting.

## H. Rekomendasi

Tahun 2022 dan 2023 diperkirakan akan menjadi momen yang penting bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Pada dua tahun tersebut, Indonesia berturut-turut akan memegang Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN. Terlebih momentum tersebut terjadi pada saat perkembangan global ditandai dengan masih terasa akan dampak pandemi, ketimpangan negara maju dan berkembang dalam akses vaksin, ketegangan geopolitik, serta ancaman resesi ekonomi global. Momentum ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengoptimalkan kebijakan luar negerinya untuk mencapai tujuan nasional, termasuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Indonesia memiliki kesempatan untuk “menata panggung” (*setting the stage*) hubungan internasional di dunia dan di kawasan, dengan memanfaatkan posisi Kepresidenan G20 dan Keketuaan ASEAN. Pada saat yang bersamaan, konteks global yang demikian itu juga membuat upaya memanfaatkan momentum tersebut tidak mudah.

Berdasarkan pencapaian tahun 2021 dan perkembangan global dan regional, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan kembali pencapaian kebijakan luar negeri Indonesia kedepan:

1. Mengidentifikasi agenda-agenda penting dan strategis yang harus diprioritaskan dalam G20 dan ASEAN dan menyiapkan upaya perwujudannya dengan lebih kokoh. Indonesia harus menjadi “pimpinan panggung” dan bukan hanya “pengelola *event*.”
  - a. Di G20, Indonesia dapat memanfaatkan peran Presidensi untuk menghadirkan kerangka kerja sama global yang mendorong pemulihan global dari pandemi, termasuk agenda keadilan vaksin dan kerja sama untuk akselerasi pencapaian *Sustainable Development Goals*, yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional Indonesia maupun kepentingan negara-negara berkembang

yang lebih luas. Untuk itu, Indonesia harus mampu “menata panggung” dengan membatasi dampak dari ketegangan geopolitik global.

- b. Di ASEAN, Indonesia harus menunjukkan peran kepemimpinan di tengah keraguan atas relevansi, soliditas, dan sentralitas ASEAN di tengah-tengah peningkatan persaingan kekuatan-kekuatan besar yang bersaing di kawasan. Untuk itu, Indonesia perlu mendorong penerjemahan yang lebih nyata terhadap *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*, menghadirkan terobosan dalam negosiasi *Code of Conduct (CoC)* Laut Cina Selatan, serta turut berperan dalam menyelesaikan krisis politik di Myanmar.
2. Di luar forum G20 dan ASEAN, daya ungkit yang diperoleh dari kedua momentum tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral di forum internasional yang lain. Indonesia dapat mengokohkan posisi sebagai “penyambung lidah negara berkembang” yang terdampak secara tidak adil oleh pandemi, sekaligus menjadi korban dari ketegangan geopolitik di antara negara-negara besar yang menghadirkan krisis pangan dan energi, sekaligus menyeret negara-negara berkembang dalam konflik tersebut.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi di antara institusi pemerintahan yang terlibat dalam berbagai dimensi kebijakan luar negeri, sehingga sumber daya dapat dialokasikan dengan optimal untuk pencapaian kebijakan luar negeri. Hal ini juga berkaitan dengan pendataan dan pengelolaan bantuan luar negeri Indonesia yang masih tersebar di berbagai instansi dan kurang terkonsolidasi. Selain itu, penyelarasan koordinasi untuk diplomasi budaya juga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditata dengan lebih baik.
4. Memperkuat partisipasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan luar negeri. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan luar negeri yang responsif dan sekaligus efektif karena informasi yang lebih komprehensif. Selain itu, kerja sama yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan di berbagai sektor terkait di dalam dan di luar negeri juga dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya. Sebagai contoh, kerja sama dengan pihak swasta sangat penting untuk membangun sistem penanganan hambatan perdagangan yang lebih proaktif dan responsif. Kerja sama dengan LSM dan diaspora juga dapat dioptimalkan untuk memastikan sistem perlindungan WNI di luar negeri yang lebih baik.

5. Menyelaraskan kebijakan luar negeri dengan kebijakan domestik. Berbagai tantangan kebijakan luar negeri berkaitan dengan pengelolaan kebijakan di dalam negeri.

Selain rekomendasi-rekomendasi yang bersifat lintas dimensi tersebut, tim penyusun juga menyampaikan beberapa rekomendasi berdasarkan masing-masing dimensi tersebut dibawah ini.

### ***Dimensi Keamanan***

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, Tim Penyusun memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan pemantauan serta menyusun rencana kontingensi sebagai antisipasi adanya ketegangan geopolitik baik di tingkat global dan regional. Salah satu *hotspot* yang perlu mendapatkan perhatian adalah peningkatan aktivitas Tiongkok terhadap Taiwan. Antisipasi akan situasi keamanan yang menyangkut perlindungan WNI di Taiwan perlu menjadi perhatian khusus.
2. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan fokus dan sumber daya dalam mengelola isu Papua di luar negeri. Untuk itu, Indonesia perlu membangun strategi yang lebih jelas dan terukur untuk kawasan Pasifik dengan mengembangkan dan mempertajam konsep Pacific Elevation dan penguatan dalam kerja sama di sektor pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga perlu memantau perkembangan diskursus yang muncul pada Pacific Island Forum pada 2022, khususnya dari Vanuatu.
3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak terorisme seiring dengan berkurangnya restriksi mobilitas yang tetap meningkatkan risiko dan ancaman terorisme yang relatif terbatas selama pandemi.
4. Mendorong upaya penyelesaian batas teritorial serta upaya pembentukan norma atau membangun asas legal atas berbagai tindakan *surveillance* yang dilakukan oleh pihak asing di wilayah ZEE / teritorial Indonesia.
5. Terus memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan isu yang sangat dinamis di luar negeri khususnya yang memberikan dampak langsung bagi kehidupan WNI di Luar Negeri. Pengalaman Kemenlu RI, Perwakilan dan mitra terkait terhadap perlindungan WNI tetap harus menjadi perhatian serius.

6. Penguatan kebijakan preventif Pelindungan WNI di Luar Negeri dari hulu, khususnya koordinasi dengan K/L terkait guna penanganan pemberangkatan PMI non-prosedural ke luar negeri, serta percepatan pendataan WNI dan diaspora Indonesia di Luar Negeri.
7. Mendorong penguatan tata kelola keamanan siber Indonesia dan meningkatkan kerja sama bagi di tingkat regional maupun global.

### ***Dimensi Ekonomi***

Dalam dimensi ekonomi, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sesuai dengan analisis sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan berbagai skema kerja sama internasional baru yang ditawarkan oleh negara-negara besar yang sedang mencoba meningkatkan kehadirannya di kawasan, seperti *Global Development Initiative* dan *Indo Pacific Economic Framework*. Indonesia harus secara aktif membentuk substansi dalam kerja sama tersebut sehingga dapat mendapatkan manfaat yang optimal, baik untuk peningkatan perdagangan, investasi, maupun peningkatan kapasitas.
2. Meningkatkan koordinasi dan pelayanan terhadap para pemangku kepentingan (pelaku usaha, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga yang terkait), untuk meningkatkan penggunaan fasilitas yang diperoleh dari kerja sama ekonomi internasional, termasuk dengan melaksanakan diseminasi kepada para pemangku kepentingan tersebut mengenai pemanfaatan fasilitas-fasilitas ekspor yang merupakan turunan perjanjian kerja sama ekonomi internasional serta mengenai perubahan kebijakan/peraturan negara yang terkait.
3. Memperkuat *market intelligence* dalam upaya diplomasi ekonomi untuk membuka pasar-pasar baru dan memperkuat penetrasi ke pasar-pasar potensial, serta mengidentifikasi potensi hambatan perdagangan lebih awal dan menyiapkan antisipasinya (membangun “sistem peringatan dini”) sekaligus mengidentifikasi potensi pemanfaatan instrumen *trade remedies* dengan pendekatan proteksi terhadap unfair trade practices (anti-dumping & anti subsidi). Dalam beberapa tahun ini, tercatat ada peningkatan kapasitas dalam penanganan hambatan perdagangan yang sudah semakin responsif. Namun, Indonesia masih harus lebih proaktif, tidak hanya defensif dan reaksioner.
4. Memperkuat harmonisasi dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri untuk memperkuat keselarasan regulasi domestik dengan kesepakatan kerja sama

internasional. Hal ini juga mencakup upaya percepatan proses persetujuan ratifikasi di Lembaga legislatif.

### *Dimensi Sosial-Budaya*

Untuk meningkatkan pencapaian dalam dimensi sosial-budaya yang masih menjadi salah satu bagian yang masih relatif memerlukan peningkatan dibandingkan yang lain, tim penyusun merekomendasikan beberapa upaya berikut:

1. Mengarusutamakan diplomasi budaya dan membangun strategi diplomasi budaya yang lebih sistematis dan kokoh. Selain membangun karakter dan jati diri bangsa, diplomasi budaya yang lebih sistematis dan kokoh juga merupakan pilar penting bagi peningkatan *soft power* (kekuatan lunak) Indonesia. Memanfaatkan momentum Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN untuk meningkatkan visibilitas Indonesia di media global.
2. Memperkuat hasil pelaksanaan program-program beasiswa menjadi bagian penguatan *soft diplomacy* Indonesia. Pengelolaan beasiswa ini perlu dipertajam dengan strategi yang lebih terukur dengan mempertimbangkan penerima beasiswa antara lain: wilayah prioritas, bidang prioritas beasiswa yang ditawarkan, keterlibatan dan partisipasi alumni secara berkelanjutan dalam kegiatan diplomasi budaya yang terprogram untuk mendukung *soft diplomacy* serta dapat menjadi duta budaya dan ekonomi Indonesia di negara asal.
3. Memperkuat pengelolaan alumni program-program beasiswa untuk mahasiswa asing dengan membangun database yang dapat diandalkan, ikatan alumni yang aktif, serta dukungan bagi alumni untuk berpartisipasi dalam diplomasi budaya Indonesia maupun untuk menopang kebijakan luar negeri Indonesia dalam dimensi lainnya seperti diplomasi ekonomi (mendorong pembukaan pasar, peluang investasi, dll), keamanan (memitigasi dukungan pada separatisme dan terorisme), maupun kepemimpinan (mendukung peran internasional Indonesia).
4. Membangun dukungan yang lebih sistematis dan terukur untuk promosi produk-produk budaya Indonesia, seperti film, sastra, dan musik serta memperkuat kualitas publikasi tentang Indonesia. Program *Indonesiana* untuk mendorong film Indonesia lewat program pengembangan skrip dan bantuan produksi, serta didirikannya Direktorat Film dan Media oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan inisiatif yang baik dan perlu dikembangkan.

5. Memanfaatkan berbagai media sosial dan platform baru seperti jasa *streaming* televisi kontemporer. Indonesia perlu mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produk budaya audio visual yang dapat dipromosikan melalui jalur yang sedang tumbuh ini. Contoh serial televisi yang sedikit banyak memperkenalkan Indonesia antara lain *Halfworlds* yang diproduksi oleh *HBO Asia*, serta beberapa film yang masuk dalam program *Waktu Netflix Indonesia* (WNI) milik *Netflix*.

### ***Dimensi Kepemimpinan***

Untuk memperkuat pencapaian IFPI di dalam dimensi Kepemimpinan, terdapat beberapa strategi yang dapat diupayakan bersama:

1. Mendorong penguatan kembali komitmen global pada multilateralisme dan mendorong cara-cara damai dalam penyelesaian konflik untuk mengelola beragam dampak dari peningkatan ketegangan geopolitik global serta mempercepat pemulihan dari pandemi.
2. Menentukan prioritas dalam keterlibatan di dalam beragam forum internasional yang bernilai strategis tinggi untuk dapat berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat secara optimal dalam forum-forum tersebut.
3. Membangun strategi yang lebih sistematis untuk membangun keterlibatan WNI dalam organisasi internasional. Pemerintah perlu mendorong *link-and-match* dan membangun program-program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan ketertarikan untuk berkarir dalam organisasi internasional yang strategis. Pemerintah dapat mengupayakan pemetaan kebutuhan SDM di berbagai organisasi internasional yang dipandang strategis dan melakukan pencarian talenta untuk mengisinya.
4. Indonesia juga perlu mendorong penataan kelembagaan dan regulasi, serta peran aktif dan strategis terhadap Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional khususnya terhadap negara-negara Asia Pasifik, Palestina, Afghanistan dan negara-negara di Benua Afrika.

## Referensi

### Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang Menjadi Sumber Data Primer

ASEAN Secretariat.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Badan Pusat Statistik.

Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik, dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Direktorat Pendidikan dan Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Henley Passport Index.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

United Nations (UN).

World Bank.

### Buku, Artikel dalam Buku, dan Artikel Jurnal

Freudenberg, M. (2003), "Composite Indicators of Country Performance: A Critical Assessment", *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, No. 2003/16, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/405566708255>.

Hill, C. 2016. *Foreign Policy in the Twenty Century*. UK: Palgrave.

Luedtke, A., Byrd, D. & Alexander, K. (2010). "The Politics of Visas." *The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*, 11, 147, 147-162.

Nye Jr, J. S. 1999. "Redefining the National Interest." *Foreign Affairs*, 78, 4, 22-35

Pham, J. P. 2008. "What is in the National Interest? Hans Morgenthau's Realist Vision and American Foreign Policy." *American Foreign Policy Interests*, 3 : 256-265.

- Rajan, M. S. 1953. "The Idea of National Interest." *The Indian Journal of Political Science*, 14, 3, 188-200.
- Rogers, M. 2012. "Contextualizing Theories and Practices of Bricolage Research." *The Qualitative Report*, 17, 48, 1-17.
- Shembilku, R. E. 2004. *The National Interest Tradition and the Foreign Policy of Albania*. Thesis at the Fletcher School, Tufts University.
- Soekarno. 1945. "Dasar (Beginsel) Negara Kita". Dalam *Lahirnya Pancasila*. Jogjakarta: Penerbit Guntur, 1949.
- Whitely, A. & Bloomberg, "Europe once offered the world's most powerful passports. Not anymore," *Fortune*. Diakses melalui, <https://fortune.com/2022/07/20/worlds-most-powerful-passports-japan-south-korea-singapore-europe-us/>.

### Situs Web

- "NZ Govt Urged to Speak Out on West Papua." *RNZ*. Diakses melalui <https://www.google.com/search?q=nz+govt+urged+to+speak+out+on+west+papua&aq=chrome..69i57.8561j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- "1801 Media Internasional, (Title Only), 24 Maret 2022" *Intelligence Media Analytics*. Diakses melalui <https://ima.ebdesk.com/analyze/dashboard/content/news>.
- "Beasiswa Mahasiswa Asing, Peran MUI, dan Duta-Duta Islam Wasathiyah." *MUI.com*. Diakses melalui, <https://mui.or.id/berita/32812/beasiswa-mahasiswa-asing-peran-mui-dan-duta-duta-islam-wasathiyah/>.
- "Yuni Gagal Jadi Nominasi Oscar 2022." *CNN Indonesia*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211222081117-220-737080/yuni-gagal-jadi-nominasi-oscar-2022#:~:text=Film%20Yuni%20sebagai%20perwakilan%20Indonesia,atau%20Academy%20Awards%20ke%2D94>.
- "Seperti Dendam Sabet Golden Leopard di Festival Film Locarno." *CNN Indonesia*, diakses melalui, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210815001553-220-680461/seperti-dendam-sabet-golden-leopard-di-festival-film-locarno>.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2021. *Realisasi Investasi PMA & PMDN Triwulan IV (Oktober-Desember)*. Diakses melalui, [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file\\_siaran\\_pers/Paparan\\_Bahasa\\_Indonesia\\_TW\\_IV\\_2021.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Bahasa_Indonesia_TW_IV_2021.pdf).
- Bowling, M. "Australia Urged to Support West Papua at Pacific Islands Forum." *The Catholic Leader*. Diakses melalui <https://catholicleader.com.au/news/australia/australia-urged-to-support-west-papua-at-pacific-islands-forum/>.
- Henley Passport Index. 2021. *The Henley Passport Index: Q4 2021 Global Ranking*. Diakses melalui,

[https://www.henleyglobal.com/storage/app/media/HPI/HENLEY\\_PASSPORT\\_INDEX\\_2021\\_Q4\\_INFOGRAPHIC\\_GLOBAL\\_RANKING\\_210928\\_1-1.pdf](https://www.henleyglobal.com/storage/app/media/HPI/HENLEY_PASSPORT_INDEX_2021_Q4_INFOGRAPHIC_GLOBAL_RANKING_210928_1-1.pdf) .

Mcbeth, J. “Indonesia, China go toe-to-toe in gas-rich Natunas.” *AsiaTimes*. Diakses melalui <https://asiatimes.com/2021/09/indonesia-china-go-toe-to-toe-in-gas-rich-natunas/>.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2021. *Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2021*. Diakses melalui <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTlwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWh1biUyMDIwMjEvQnVrdSUyMEklMjBMS2olMjAyMDIxJTlwS2VtZW50ZXJpYW4lMjBMdWFyJTlwTmVnZXJpLnBkZg==>.

OECD and Joint Research Center of the European Commission, 2008. *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. OECD. Diakses melalui <https://www.oecd.org/sdd/42495745.pdf>.

Rai, F. “NGO Group Supports West Papua.” *Papua New Guinea Post-Courier*. Diakses melalui <https://postcourier.com.pg/ngo-group-supports-west-papua/>.

United Nation. “*Uniformed Personnel Contributing Countries by Ranking Experts on Mission, Formed Police Units, Individual Police, Staff Officer, and Troops As of: 31/12/2021.*” United Nation Peacekeeping Operation. Diakses melalui [https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/02\\_country\\_ranking\\_45\\_dec\\_2021.pdf](https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/02_country_ranking_45_dec_2021.pdf) .

World Bank. Exports of goods and services (BoP, current US\$). Diakses melalui, <https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.GNFS.CD>.

# INDEKS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA 2021

## Penanggung Jawab

Wisnu Utomo

## Tim Penyusun

Shofwan Al Banna Choiruzzad

Nourma Nusanti

Agung Nurwijoyo

Hana Naufanita

Karina Apriladhatin

Winda Noviana

## Kontributor

Vallisa Aulia Rahmi

Sri Asfarina Murti

Aulia Cahya Islamy

Diterbitkan Oleh :



Direktorat Politik Luar Negeri dan  
Kerjasama Pembangunan Internasional

---

Jl. Taman Suropati No. 2 Menteng,  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

 polugrikpi



**Kementerian PPN/  
Bappenas**

# INDEKS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

## Ancaman Hak Berdaulat di Natuna Utara

38 KIA Vietnam Ditangkap

Sumber: Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), 2021

Sejumlah Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara, ZEE Indonesia (di wilayah sengketa RI-Vietnam, non sengketa, dan wilayah bawah garis batas LK Indonesia)

Kapal Tiongkok (kapal ikan, kapal survei / kapal riset, kapal China Coast Guard (CCG), dan kapal militer), terdeteksi melakukan intrusi di wilayah ZEE Laut Natuna Utara

### PON Papua 2021

Suksesnya penyelenggaraan PON XX Papua yang terdiri dari 64 Cabang Olahraga dan diadakan di 4 Kabupaten / Kota di Papua.

## DIMENSI KEAMANAN

### Perundingan Batas Maritim



17 Perundingan

17 Perundingan Batas Maritim dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam

Sumber: Kemenlu (2021)

### Penafsiran Ulang UNCLOS

Upaya penafsiran ulang UNCLOS terkait *nine-dash-line* oleh China menjadi tantangan penegakkan hukum internasional dan prinsip kebebasan navigasi.

Sumber: The Diplomat (2021)



## Pelindungan WNI

26 WNI Dievakuasi

dari situasi krisis di Kabul, Afghanistan

7 Dibebaskan dari Hukuman Mati

dan 4 sandera dibebaskan dari kelompok Abu Sayaff, Filipina Selatan

74.419 Kepulangan WNI Difasilitasi

1.388 diantaranya adalah ABK



Sumber: Kemenlu (2021)

## Pertumbuhan Ekspor Negara MIKTA BRICS

Russia	44,12
Afrika Selatan	40,64
Turki	39,14
Indonesia	38,49
India	32,62
Brazil	32,61
Australia	29,80
China	29,77
Korea Selatan	27,11
Meksiko	19,97

Sumber: Exports of Goods and Services, World Bank (2021)

Tahun 2021, Indonesia berhasil melakukan pengamanan nilai ekspor sebesar USD 2,2 Miliar atau Rp 31,7 Triliun.

Sumber: Kemendag (2021)



Ekspor INA tahun 2021 tumbuh sebesar 38% dibanding tahun 2020.

20 kasus hambatan perdagangan berhasil dihentikan

## DIMENSI EKONOMI

### 5 Besar Negara Asal FDI TA 2021



Sumber: BKPM (Jan, 2022)

Realisasi FDI tahun 2021 Meningkat 10% dari tahun 2020

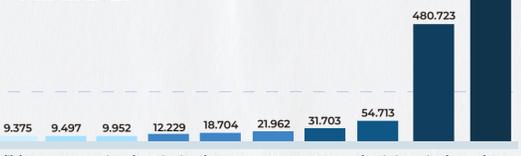
dari Rp. 412,8 Triliun menjadi Rp. 454 Triliun

Terselenggaranya the First Joint Working Group (JWG) on Palm Oil antara ASEAN dan Uni Eropa guna mengkapankan minyak sawit sebagai bagian dari minyak nabati yang berkelanjutan bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

Sumber: Kemenlu (2021)

## Upaya Pemulihan Pariwisata Indonesia

### 10 Besar Kunjungan Wisman Tahun 2021



Sumber: BPS (Per 5 Sept 2022)



## Persiapan Presidensi G-20 2022

Indonesia menduduki 26 posisi strategis di organisasi internasional, penerimaan posisi G20, Dewan HAM PBB, anggota dewan IMO, Executive board WHO & UNESCO, Anggota Dewan Badan Pangan dan Pertanian FAO, dsb.

Indonesia meneruskan estafet presidensi G20 secara simbolis pada sesi penutupan KTT G-20 Roma, di La Nuvola, Roma, Italia 31 Oktober 2021



## DIMENSI KEPEMIMPINAN

### Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia

Kepada Antigua dan Barbuda, India, Mozambik, Zimbabwe, Suriname, Madagaskar, Timor Leste, Palau, Papua New Guinea, Afghanistan, dan Saint Vincent dan Grenadine



Sumber: Lampiran Pidato (2022)

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Leaders Meeting (ALM), 24 April 2021 dan menghasilkan 5 Point Consensus guna merespon situasi di Myanmar.

US\$ 200rb Bantuan kemanusiaan melalui AHA Center sebagai tindak lanjut kesepakatan ALM

## Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

Co-chair bersama Inggris pada agenda COP 26 (UNFCCC) Forest, Agriculture and Commodity Trade Dialogue guna mempromosikan perdagangan komoditas agrikultur berkelanjutan yang mengedepankan perlindungan hutan dan ekosistem pendukungnya.

Indonesia Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050

Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih awal

Mengurangi emisi gas rumah kaca 29% (tanpa syarat dan mandiri) dan 41% (dengan dukungan internasional) pada 2030

Sumber: Indonesia LTS-LCCR 2050 (2021); Katadata (2021)

### Kategori Sektor:



## Film Indonesia Raih International Award

Indonesian Film 'Yuni' wins the Platform Prize at Toronto International Film Festival

'Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas' wins the Golden Leopard for the Best Picture at Locarno Film Festival 2021 under its International title 'Vengeance is Mine, All Other Pay Cash'

Juga ditayangkan di beberapa Festival Film Internasional Lain, seperti: Berlin, Busan, Cannes, Shanghai, Sundance, Toronto, dan Venice.



## DIMENSI SOSIAL BUDAYA

### Musisi Indonesia Go International

Beberapa musisi muda Indonesia yang saat ini berkarya di luar Negeri: Rich Brian, Niki Zefanya, Warren Hue, dan Stephanie Poetri.

Keempatnya sama-sama tergabung dalam 88Rising, salah satu label musik asal USA.



### Pemberitaan Indonesia Pada Media Asing

1.299 Pemberitaan

Indonesia memiliki jumlah pemberitaan terendah di antara negara MIKTA BRICS tahun 2021

10% Pemberitaan sentimen positif upaya dan kerja sama penyediaan vaksin Covid-19, FDI ke Indonesia, upaya perdamaian di Myanmar, Kerjasama bilateral dan multilateral, Peran di G-20, upaya menekan deforestasi

7% Pemberitaan sentimen negatif pengikatan kasus Covid-19, konflik di Papua, restriksi mobilitas dari dan ke Indonesia

Sumber: 35 Media, Kemlu (2021)



## Beasiswa

### 5 Besar Negara Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang

Afghanistan	20
Pakistan	20
Tanzania	19
Yemen	18
Thailand	12

Sumber: Kemendikbudristek (2021)



### Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)

SELAMAT SIANG

APA KABAR?

Terdapat kenaikan pembelajar BIPA sebesar 21,19% di tahun 2021, dari 8.854 menjadi 10.730 pembelajar

Timor Leste menjadi Negara dengan Pembelajar BIPA Terbanyak

Sumber: Pusat Pengembangan dan Pelatihan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2021)



# INDEKS

## KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA 2020



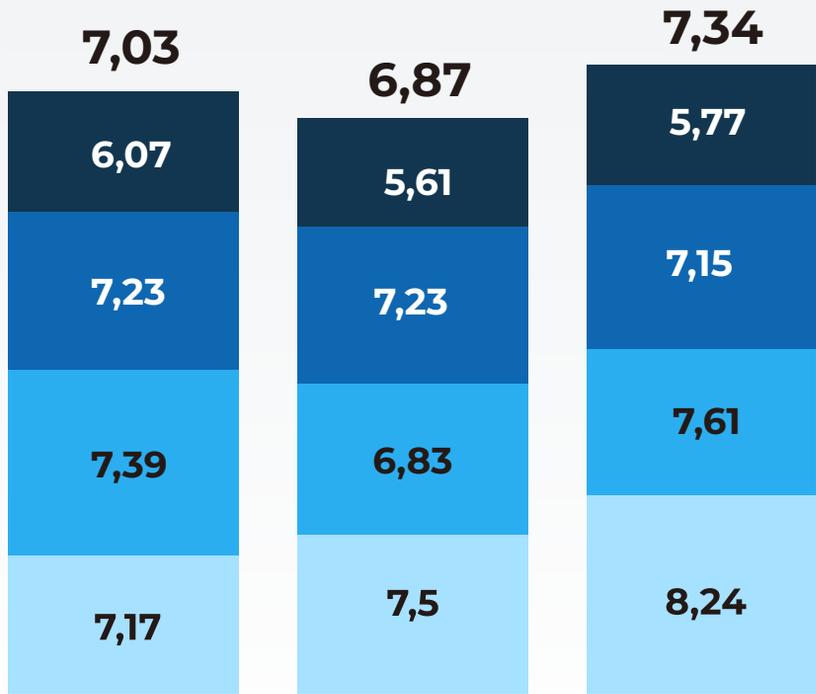
---

**Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia menggambarkan pencapaian dampak kebijakan luar negeri melalui pendekatan dimensi : Keamanan, Ekonomi, Kepemimpinan, dan Sosial Budaya.**

**Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia sebagai pertimbangan perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data.**

---

## Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2018-2020



Keamanan Ekonomi Kepemimpinan Sosial Budaya

---

# **DIMENSI KEAMANAN**

---

# Data Serangan Cyber Ke Indonesia

**2021**

**621.160.000**

**2020**

**495.000.000**

**2019**

**290.000.000**

**2018**

**232.000.001**

KE

Masalah strategis dan kepentingan nasional jika dikaitkan dengan pelanggaran wilayah dan aksi terorisme, isu cyber ini menjadi sangat bahaya. - MP



# Dimensi Keamanan

## Keutuhan Wilayah dan Perlindungan Warga Negara

**Intrusi Akibat Belum Ditetapkannya Batas Maritim**



**Kep. Natuna**  
**22 Kapal Nelayan**  
**3 Kapal Patroli**



**Selat Malaka**  
**16 Kapal Nelayan**  
**1 Kapal Patroli**

Gambar : Pemulangan ABK yang bekerja  
di Kapal Australia, 30 April 2020  
(beritabuana.co)



**535.264**

Paket Bantuan  
Dibagikan

Berisikan Sembako  
seperti beras, mi instan,  
minyak goreng, gula, dll  
(per 31 Desember 2020)



**45.378**

Kasus  
Diselesaikan

Dari Total 54.953  
Kasus di 2020



**226.344**

Kepulangan WNI  
Difasilitasi

28.008 diantaranya  
adalah ABK  
(2020 s.d 5 Juli 2021)

---

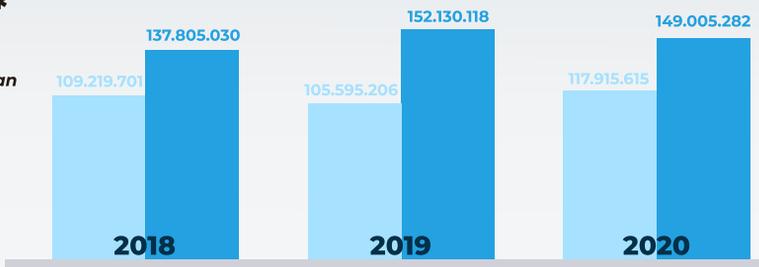
# **DIMENSI EKONOMI**

---

# Pemanfaatan

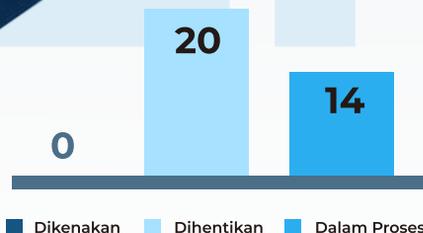
## SKA\*

\*Surat  
Keterangan  
Asal



- Ekspor SKA Barang Preferensi ke Negara Preferensi (Ribu USD)
- Total Ekspor Nasional Barang Preferensi Ke Negara Preferensi (Ribu USD)

## Penanganan Kasus Hambatan Teknis Perdagangan TA 2020

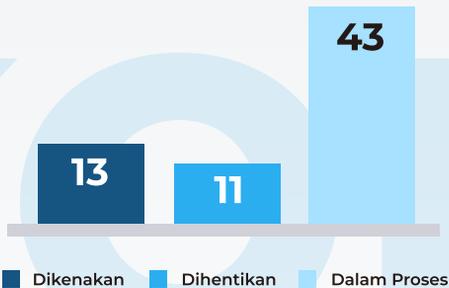


- Dikenakan
- Dihentikan
- Dalam Proses



# Dimensi Ekonomi

## Penanganan Kasus Anti Dumping, Anti Subsidi, dan Safeguards TA 2020



**India** menjadi negara dengan pengajuan tuntutan kasus terkait Anti Dumping, Anti Subsidi dan Safeguards terbanyak tahun 2020

**India** mengajukan **12** Tuntutan, **17, 91%** dari Total kasus di tahun 2020

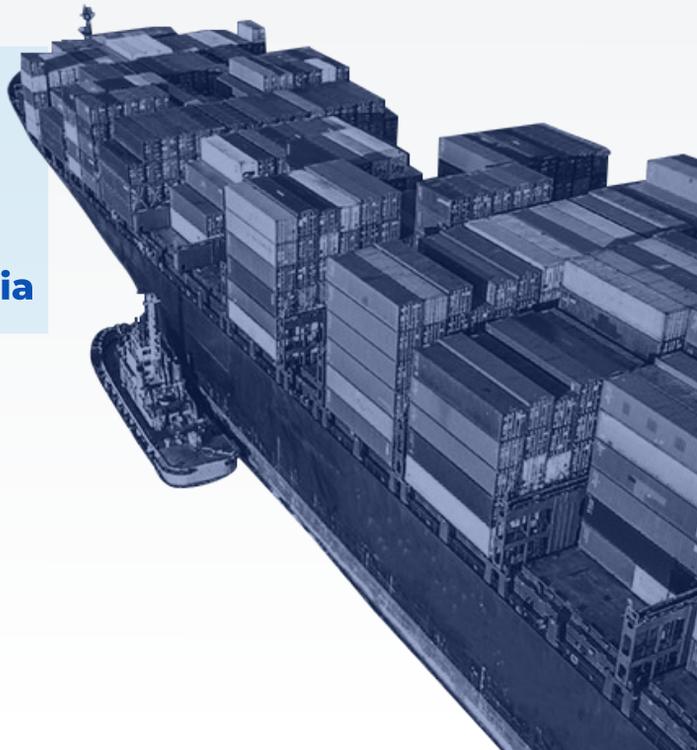
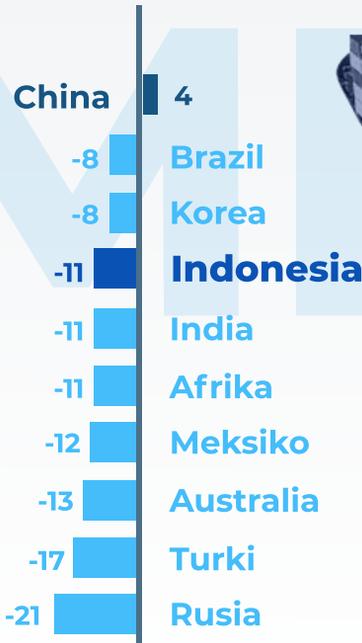
Produk :



Ditengah masa pandemi, Indonesia berhasil mencatatkan Potensi Ekspor terselamatkan pada Tahun 2020 sebesar **USD 336,2 Juta** atau **Rp 4,7 Triliun.**

# Pertumbuhan Ekspor MIKTA BRICS 2020

Pertumbuhan Ekspor INA meningkat menjadi ke-4 di tahun 2020 dari urutan Ke-9 di tahun 2019 diantara MIKTA BRICS ditengah pandemi.



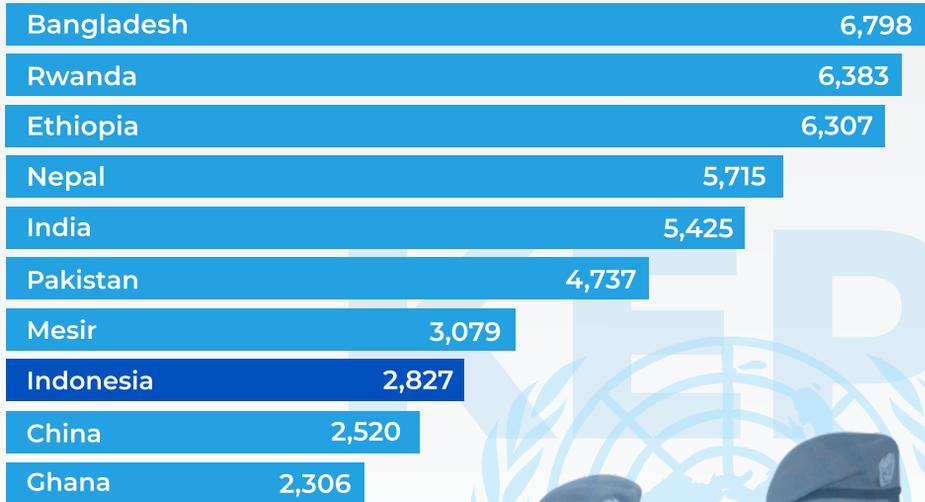
---

# **DIMENSI KEPEMIMPINAN**

---

# Personel MPP PBB Indonesia

sumber data : <https://peacekeeping.un.org/>



per 31 desember 2020

**Indonesia merupakan 10 Besar Negara dengan Jumlah Personel MPP PBB dengan total 2.827 Personel yang dikirimkan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.**



# Dimensi Kepemimpinan



## WNI yang Bekerja di Organisasi Internasional

368 Warga Negara Indonesia bekerja di PBB dan ASEAN

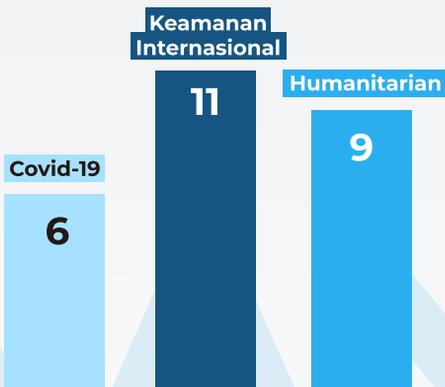
Indonesia menduduki 25 posisi strategis di organisasi internasional, diantaranya anggota tidak tetap DK PBB, anggota Dewan HAM, dan Dewan Eksekutif UNESCO.

Kepemimpinan Indonesia juga terefleksikan atas inisiatif yang disampaikan dalam fora internasional dengan memperoleh dukungan 94%\* dari negara mitra pada tahun 2020.

*\*total agregat dari seluruh negara yang mendukung inisiatif Indonesia dari target negara sasaran*



# Respon Indonesia atas Isu Strategis Global dan Regional Tahun 2020



**20**  
Respons di  
Isu Lainnya\*

*\*mencakup isu solidaritas palestina, demokrasi, papua, islamophobia, dll)*

Di 2020, Indonesia setidaknya telah menyampaikan 46 respons atas isu strategis global dan regional



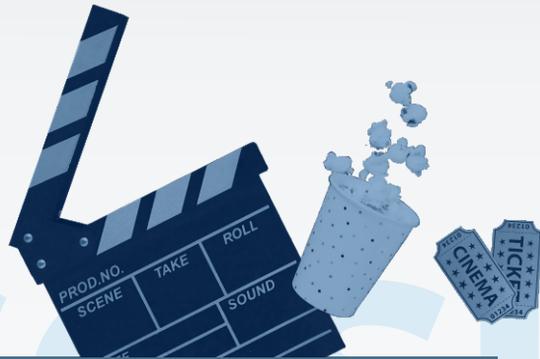
---

# **DIMENSI SOSIAL BUDAYA**

---

## Film Indonesia dalam Project Market Internasional

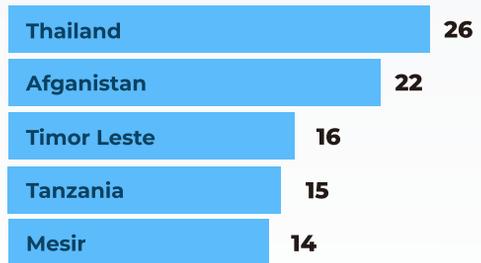
Periode 2018-2020, Terdapat **5 Film Indonesia** yang beredar di Project Market Internasional, diantaranya : *Autobiography*, *Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas*, *Yuni*, *Crocodile Tears*, dan *This City is a Battlefield*.



## WNA Penerima Basiswa Indoensia

Terdapat **256 Mahasiswa WNA** dari **55 Negara** yang menjadi pelamar Beasiswa Indonesia Kemitraan Negara Berkembang (KNB) di tahun 2020.

### 5 Negara Pelamar Beasiswa Indonesia Terbesar



\*256 Mahasiswa tersebut hanya mencakup mahasiswa lanjutan(on-going). Tidak ada rekrutmen baru di tahun 2020.



# Dimensi Sosial Budaya

Indonesia menempati peringkat ke-71 di daftar negara dengan paspor terkuat di dunia. Paspor Indonesia memiliki akses VoA / Visa Free ke 71 Negara.

## Kekuatan Paspor Indonesia

Jepang menjadi negara dengan paspor terkuat di dunia dengan VoA / Visa Free ke 191 Negara!

71

*\*Indonesia menempati peringkat ini bersama dengan beberapa negara lain seperti China dan Kenya.*



# 10 Besar Negara Pembelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) 2020

 **Uzbekistan** 294

 **Austria** 215

 **Vietnam** 206

 **Kamboja** 200

 **India** 191

 **U.S.A**  
224

 **Mesir**  
492

3

 **Papua Nugini**  
563

2

 **Filipina**  
758

1

 **Timor Leste**  
5020



*Kementerian PPN/  
Bappenas*



**polugrikpi**

# INDEKS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

TA 2021



LIKUPANG



# Latar Belakang dan Tujuan

## Latar Belakang :

**01**

Entitas pelaksana hubungan luar negeri dan diplomasi beragam

**02**

Alat ukur *outcome* kinerja kebijakan luar negeri belum terdita

**03**

Kebutuhan alat ukur kebijakan luar negeri yang komprehensif

**04**

Kebutuhan *evidence-based policy making tool* bagi penguatan perencanaan kebijakan luar negeri

## Tujuan :

Instrumen guna menggambarkan *outcome* Kebijakan Luar Negeri Indonesia (IKLNI) bagi pencapaian Tujuan Nasional.

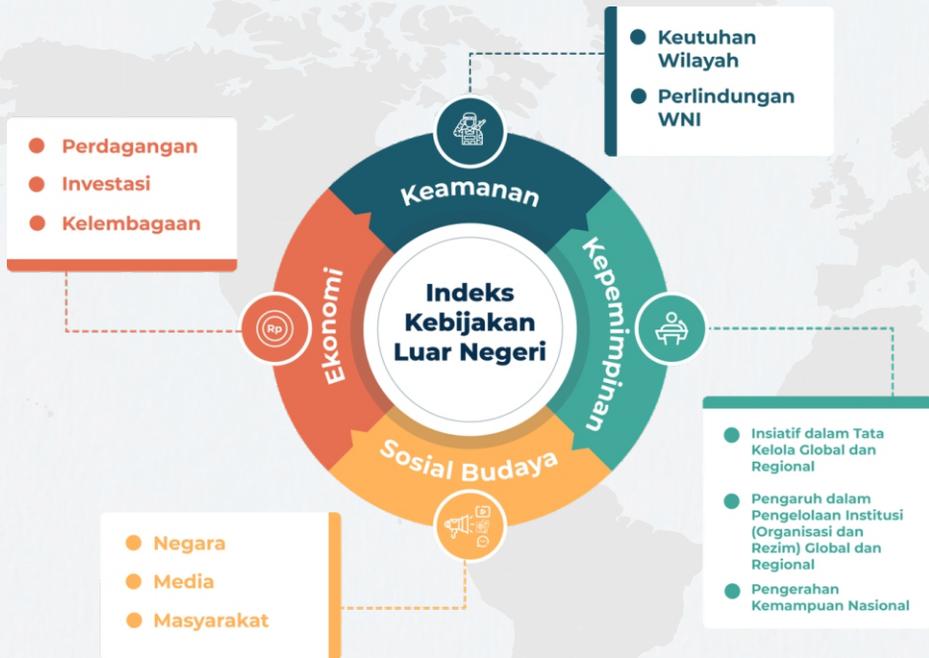
# Definisi dan Metodologi

**Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia merupakan alat ukur pencapaian dampak kebijakan luar negeri dari berbagai spektrum (Keamanan, Ekonomi, Kepemimpinan, dan Sosial-budaya).**

**Indeks ini selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh pelbagai pemangku kepentingan, baik dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data dan fakta ataupun dalam pembahasan wacana publik.**



# Anatomi Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia



04

DIMENSI

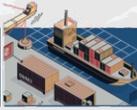
11

ELEMEN

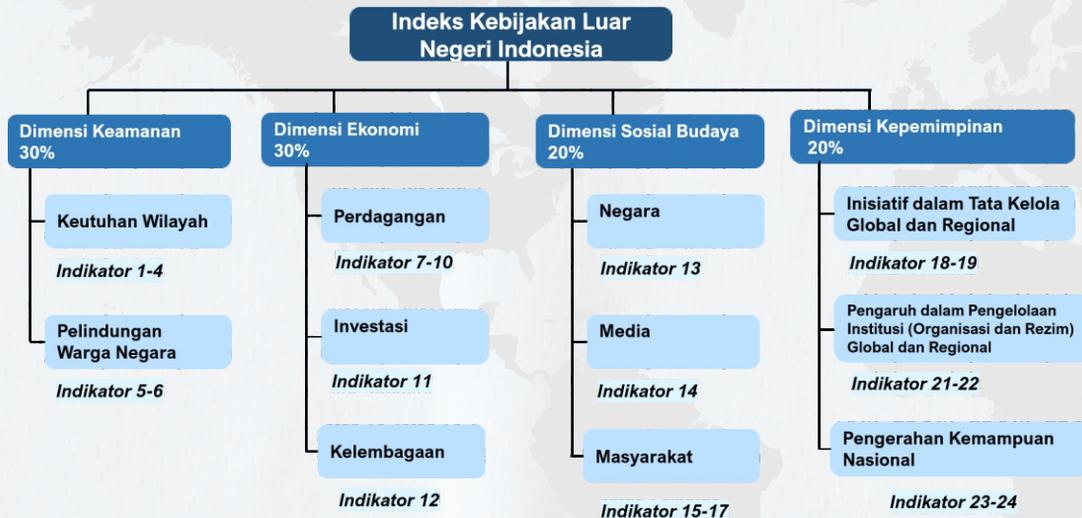
24

INDIKATOR

# Anatomi Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia

 <b>Dimensi Keamanan</b>	 <b>Dimensi Ekonomi</b>	 <b>Dimensi Sosial-Budaya</b>	 <b>Dimensi Kepemimpinan Global dan Regional</b>
<b>Elemen Keutuhan Wilayah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agresi, invasi dan aneksasi militer</li> <li>2. Dukungan asing terhadap kelompok separatis dan/atau agenda separatisme</li> <li>3. Tingkat ancaman pelanggaran wilayah NKRI</li> <li>4. Tingkat ancaman dari dampak belum terselesaikannya perundingan perbatasan</li> </ol>	<b>Elemen Perdagangan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Nilai pemanfaatan kerja sama perdagangan internasional</li> <li>8. Tingkat pertumbuhan ekspor Indonesia</li> <li>9. Jumlah kedatangan wisatawan asing</li> <li>10. Penanganan hambatan perdagangan internasional</li> </ol>	<b>Elemen Negara</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Tingkat Kekuatan Paspor Indonesia</li> </ol> <b>Elemen Media</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Pemberitaan Indonesia pada media asing</li> </ol>	<b>Elemen Inisiatif dalam Tata Kelola Global dan Regional</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>18. Tingkat inisiatif pemerintah Indonesia menyikapi isu global dan regional</li> <li>19. Tingkat penerimaan forum internasional dan/atau negara lain terhadap <b>inisiatif Indonesia terkait kerja sama internasional tertentu</b></li> </ol> <b>Elemen Pengaruh dalam Pengelolaan Institusi (Organisasi dan Rezim) Global dan Regional</b>
<b>Elemen Pelindungan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dukungan asing terhadap aksi terorisme di NKRI</li> <li>6. Tingkat keberhasilan upaya pelindungan dan pelayanan WNI di luar negeri</li> </ol>	<b>Elemen Investasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Realisasi FDI/ Investasi Asing</li> </ol> <b>Elemen Kelembagaan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Tingkat keselarasan kesepakatan perjanjian kerja sama ekonomi di tingkat internasional ke dalam peraturan domestik (<i>regulatory coherence</i>)</li> </ol>	<b>Elemen Masyarakat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Jumlah Warga Negara Asing (WNA) penerima beasiswa Indonesia</li> <li>16. Jumlah pembelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)</li> <li>17. Keikutsertaan film Indonesia dalam festival film internasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>20. Jumlah WNI di organisasi internasional</li> <li>21. Tingkat Keterpilihan untuk menjadi tuan rumah event internasional strategis</li> <li>22. Posisi strategis yang diduduki oleh Indonesia dalam organisasi internasional</li> </ol> <b>Elemen Pengerahan Kemampuan Nasional</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>23. Jumlah pasukan kedamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia</li> <li>24. Persentase Bantuan Internasional Pemerintah Indonesia dari PNB</li> </ol>

# Pembobotan Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia



# Sumber Data

## ***Dimensi Ekonomi***

### **Panel Ahli:**

- 1. Plt. Dirjen Daglu , Kemendag**
- 2. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekon Internasional, Kemenkoekon**
- 3. Shinta W. Kamdal, Waketum Koordinator KADIN bidang Maritim Investasi dan Luar Negeri, KADIN**
- 4. Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif, CSIS**

**Sumber Lainnya: Kemendag, World Bank, UN WTO, BPS, BKPM**

## ***Dimensi Keamanan***

### **Panel Ahli:**

- 1. Akademisi, Pakar Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia**
- 2. Direktur Jenderal Hukum Perjanjian Internasional, Kemenlu**
- 3. Direktur Utama LKKBN Antara**

**Sumber Lainnya: Dit, PWNI, Kemenlu**

# Sumber Data

3

## ***Dimensi Sosial Budaya***

Panel Ahli:

1. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud Dikti
2. Ketua Umum, APROFI
3. Guru Besar, FIB UI

Sumber Lainnya: Henley Passport Index, Provetic, Dit Infomed & Diplik Kemenlu, Kemdikbud, Website Film Festival

4

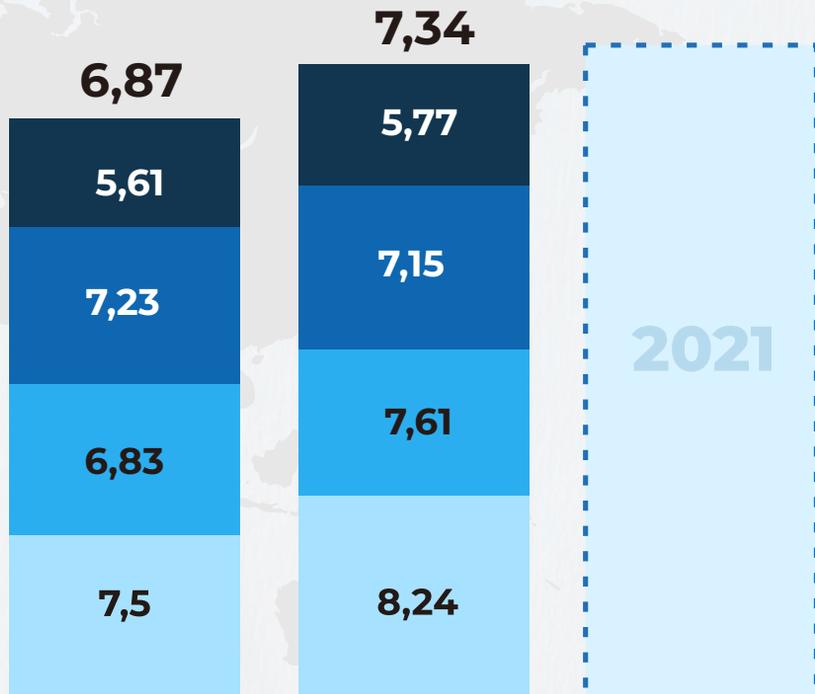
## ***Dimensi Kepemimpinan***

Panel Ahli:

1. Dirjen KS Multilateral, Kemenlu
2. Dewi Fortuna Anwar, Profesor Riset, Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional
3. M. Tauffiqurrahman, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post

Sumber Lainnya: Kemenlu, ASEAN Secretariat, UN System, UN Peacekeeping, KSST Bappenas, BPS

# Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2019-2021



Keamanan Ekonomi Kepemimpinan Sosial Budaya

---

# **DIMENSI KEAMANAN**

---

# Ancaman Hak Berdaulat di Natuna Utara



# 38

KIA Vietnam  
Ditangkap

Sumber: Indonesia Ocean Justice  
Initiative (IOJI), 2021



Sejumlah **Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam** melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara, ZEE Indonesia (di wilayah sengketa RI-Vietnam, non sengketa, dan wilayah bawah garis batas LK Indonesia)

**Kapal Tiongkok** (kapal ikan, kapal survei / kapal riset, kapal China Coast Guard (CCG), dan kapal militer), terdeteksi melakukan intrusi di wilayah ZEE Laut Natuna Utara

## PON Papua 2021

Suksesnya penyelenggaraan **PON XX Papua** yang terdiri dari **64 Cabang Olahraga** dan diadakan di **4 Kabupaten / Kota** di Papua.

Sumber : Indonesiabaik.id (2021)

# DIMENSI KEAMANAN

## Perundingan Batas Maritim



**17 Perundingan Batas Maritim**  
dengan Filipina, Malaysia, Palau,  
dan Vietnam

*Sumber: Kemenlu (2021)*

## Penafsiran Ulang UNCLOS

Upaya penafsiran ulang UNCLOS terkait *nine-dash-line* oleh China menjadi tantangan penegakkan hukum internasional dan prinsip kebebasan navigasi.

*Sumber: The Diplomat (2021)*



# Pelindungan WNI



**74.419**

Kepulauan WNI  
Difasilitasi

**1.388** diantaranya  
adalah ABK



**26**

WNI  
Dievakuasi

dari situasi krisis  
di Kabul, Afghanistan



**7**

Dibebaskan  
dari Hukuman  
Mati

dan 4 sandera dibebaskan  
dari kelompok Abu Sayaff,  
Filipina Selatan



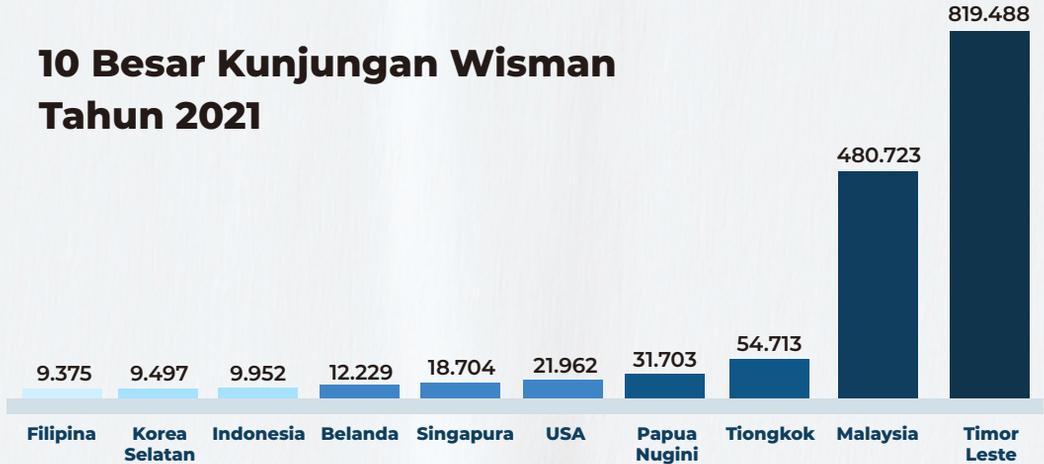
---

# **DIMENSI EKONOMI**

---

# Upaya Pemulihan Pariwisata Indonesia

## 10 Besar Kunjungan Wisman Tahun 2021



Sumber : BPS (Per 5 Sept 2022)



# Pertumbuhan Ekspor Negara MIKTA BRICS

Russia	44,12
Afrika Selatan	40,64
Turki	39,14
Indonesia	38,49
India	32,62
Brazil	32,61
Australia	29,80
China	29,77
Korea Selatan	27,11
Meksiko	19,97

Tahun 2021, Indonesia berhasil melakukan pengamanan nilai ekspor sebesar USD 2,2 Miliar atau Rp 31,7 Triliun.

Sumber : Kemendag (2021)



Ekspor INA tahun 2021 tumbuh sebesar 38% dibanding tahun 2020.

20 kasus hambatan perdagangan berhasil dihindarkan

# DIMENSI EKONOMI

## 5 Besar Negara Asal FDI TA 2021



Realisasi FDI tahun 2021  
Meningkat 10%  
dari tahun 2020

dari  
Rp. 412,8 Triliun  
menjadi  
Rp. 454 Triliun

Sumber : BKPM (Jan, 2021)

Terselenggaranya the  
**First Joint Working  
Group (JWG) on Palm  
Oil** antara ASEAN dan

**Uni Eropa** guna mengkampanyekan minyak  
sawit sebagai bagian dari minyak nabati  
yang berkelanjutan bagi pencapaian Tujuan  
Pembangunan Berkelanjutan 2030

Sumber : Kemenlu (2021)

---

# **DIMENSI KEPEMIMPINAN**

---

# Persiapan Presidensi G-20 2022

**Indonesia** menduduki **26 posisi strategis** di organisasi internasional, penerimaan posisi G20, Dewan HAM PBB, anggota dewan IMO, Executive board WHO & UNESCO, Anggota Dewan Badan Pangan dan Pertanian FAO, dsb.

**Indonesia** meneruskan **estafet presidensi G20** secara simbolis pada sesi penutupan **KTT G-20 Roma**, di La Nuvola, Roma, Italia 31 Oktober 2021



**G20**  
INDONESIA  
2022



# DIMENSI KEPEMIMPINAN

## Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia

Kepada Antigua dan Barbuda, India, Mozambik, Zimbabwe, Suriname, Madagaskar, Timor Leste, Palau, Papua New Guinea, Afghanistan, dan Saint Vincent dan Grenadine



Peningkatan  
Kapasitas



Bantuan  
Infrastruktur



Mitigasi Dampak  
Bencana Alam



Bantuan  
Kemanusiaan

Sumber : Lampiran Pidato (2021)



Berkembang  
0,3

OECD  
0,7

Rata-Rata Persentase  
Jumlah Bantuan dari  
PNB Per Kapita

### Regional Initiative

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan **ASEAN Leaders Meeting (ALM)**, 24 April 2021 dan menghasilkan 5 Point Consensus guna merespon situasi di Myanmar.

**US\$ 200rb**

Bantuan kemanusiaan melalui AHA Center sebagai tindak lanjut kesepakatan ALM



# Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

Co-chair bersama Inggris pada agenda **COP 26 (UNFCCC) Forest, Agriculture and Commodity Trade Dialogue** guna mempromosikan perdagangan komoditas agrikultur berkelanjutan yang mengedepankan perlindungan hutan dan ekosistem pendukungnya.

COP26

## Indonesia Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050



Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih awal



Mengurangi emisi gas rumah kaca 29% (tanpa syarat dan mandiri) dan 41% (dengan dukungan internasional) pada 2030

Sumber : Indonesia LTS-LCCR 2050 (2021); Katadata (2021)



## Kategori Sektor :



Kehutanan



Energi



Agrikultur



IPPU (Industrial Processes & Product Use)



Limbah

---

# **DIMENSI SOSIAL BUDAYA**

---

# Film Indonesia

## Raih International Award

Indonesian Film 'Yuni'  
wins the Platform Prize  
at Toronto International  
Film Festival

Debate about new city regulations

'Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas'  
wins the Golden Leopard for the Best Picture at  
Locarno Film Festival 2021 under its International  
title 'Vengeance is Mine, All Other Pay Cash'

Juga ditayangkan di beberapa Festival Film  
Internasional Lain, seperti : Berlin, Busan,  
Cannes, Shanghai, Sundance, Toronto,  
dan Venice.



# DIMENSI SOSIAL BUDAYA

## Musisi Indonesia *Go International*

Beberapa musisi muda Indonesia yang saat ini berkarya di luar negeri: Rich Brian, Niki Zefanya, Warren Hue, dan Stephanie Poetri.

Keempatnya sama-sama tergabung dalam 88Rising, salah satu label musik asal USA.

88+



## Pemberitaan Indonesia Pada Media Asing

1.299  
Pemberitaan

Indonesia memiliki jumlah pemberitaan terendah di antara negara MIKTA BRICS tahun 2021

**10% Pemberitaan** sentimen **positif** upaya dan kerja sama penyediaan vaksin Covid-19, FDI ke Indonesia, upaya perdamaian di Myanmar, Kerjasama bilateral dan multilateral, Peran di G-20, upaya menekan deforestasi



**7% Pemberitaan** sentimen **negatif** peningkatan kasus Covid-19, konflik di Papua, restriksi mobilitas dari dan ke Indonesia



Indonesia and UNICEF Sign Agreement to Procure Affordable Vaccine



Sumber : 35 Media, Kemlu (2021)

# Beasiswa

## 5 Besar Negara Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang

Afghanistan	20
Pakistan	20
Tanzania	19
Yemen	18
Thailand	12



Sumber : Kemendikbudristek (2021)

SELAMAT  
SIANG

APA  
KABAR?

## Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)

Terdapat kenaikan pembelajar BIPA sebesar **21,19%** di tahun **2021**, dari **8.854** menjadi **10.730** pembelajar

**Timor Leste** menjadi Negara dengan Pembelajar BIPA Terbanyak



Sumber : Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2021)



[linktr.ee/polugrikpi](https://linktr.ee/polugrikpi)

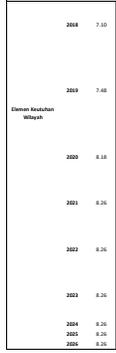


16. Jumlah penyelenggara pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia bagi pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia	Statistik	Jumlah penyelenggara pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia bagi pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia	Statistik	Jumlah penyelenggara pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia bagi pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia	0-100 ditunjukkan ke 1	0,31	642,90	424,80	177,08	214,40	(2,25 nilai indikator) 21 + 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Jumlah pameran film Indonesia	Statistik	Jumlah pameran film Indonesia	Statistik	Jumlah pameran film Indonesia	0-100 ditunjukkan ke 1	0,31	13,03	31,98	4,30	5,79	(2,25 nilai indikator) 21 + 1	5,77	4,06	4,30	5,79	3,55	3,13	2,72	2,30	1,88

**DIKNO**

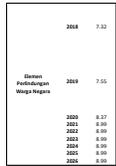
<b>Elemen Kearifan dalam Tata Kelola Keber dan Rantai Pasok</b>																				
18. Tingkat inovasi	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan pengembangan	Nilai rata-rata dari penelitian dan pengembangan	1,50	0,50	7,33	7,67	8,00	8,44	Rumus + nilai indikator	7,33	7,67	8,00	8,44	8,00	8,00	8,00	8,00
19. Tingkat inovasi	Statistik	Tingkat inovasi	Statistik	Tingkat inovasi	0-100 ditunjukkan ke 1	2,00	0,50	83,00	85,31	96,32	79,95	(2,25 nilai indikator) 21 + 1	8,48	8,77	9,49	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
<b>Elemen Pengaruh dalam Pengembangan Industri (Organisasi, Rantai Pasok)</b>																				
20. Jumlah inovasi	Statistik	Jumlah inovasi	Statistik	Jumlah inovasi	0-100 ditunjukkan ke 1	0,40	77,34	88,16	76,34	79,37	(2,25 nilai indikator) 21 + 1	7,96	8,17	7,87	8,48	7,83	7,80	7,77	7,70	7,70
21. Tingkat inovasi	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan pengembangan	Nilai rata-rata dari penelitian dan pengembangan	0,30	8,67	8,33	8,00	8,01	Rumus + indikator	8,67	8,33	8,00	8,01	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
22. Inovasi dalam industri	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan pengembangan	Nilai rata-rata dari penelitian dan pengembangan	0,30	8,67	8,67	8,00	8,61	Rumus + indikator	8,67	8,67	8,00	8,61	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>Elemen Penguatan Kemampuan Nasional</b>																				
23. Jumlah inovasi	Statistik	Jumlah inovasi	Statistik	Jumlah inovasi	0-100 ditunjukkan ke 1	0,50	5,27	5,74	5,68	5,51	Rumus + indikator	5,27	5,74	5,68	5,51	6,05	7,17	7,40	7,27	7,96
24. Jumlah Bantuan	Statistik	Jumlah bantuan	Statistik	Jumlah bantuan	1 + harga maksimum bantuan, tapi tidak melebihi bantuan	0,50	3,00	3,00	3,00	3,00	Rumus + indikator	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Time data  
 Jumlah data statistik  
 Jumlah data awal dan  
 Jumlah data statistik dan awal dan

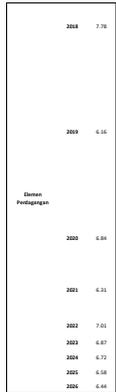


Beban Dimensi  
0.7

Misi Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0.3	7.17	7.50	8.24	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48



Beban Dimensi  
0.3



Beban Dimensi  
0.6

Misi Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0.3	7.58	6.64	7.64	7.26	7.32	7.40	7.55	7.46



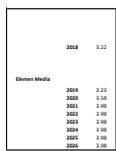
Beban Dimensi  
0.2



Beban Dimensi  
0.3



Beban Dimensi  
0.2



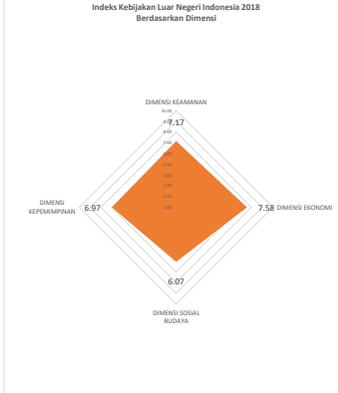
Beban Dimensi  
0.3

Misi Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0.2	6.07	5.61	5.37	6.22	5.87	5.82	5.77	5.70

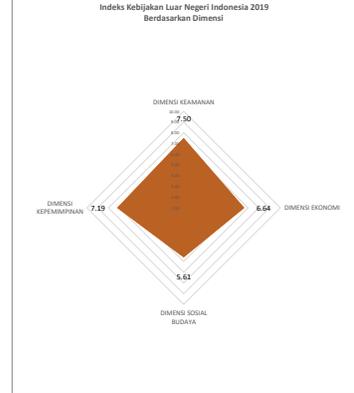


Beban Dimensi

Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2018 7.03



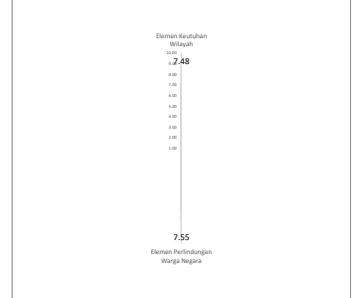
Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2019 6.80



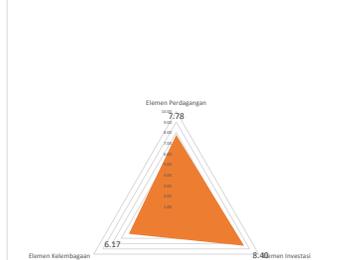
Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2018 Dimensi Keamanan



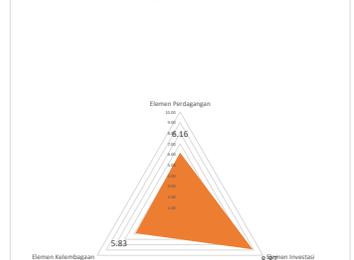
Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2019 Dimensi Keamanan



Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2018 Dimensi Ekonomi



Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2019 Dimensi Ekonomi



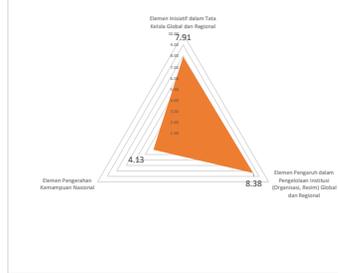
Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2018 Dimensi Sosial Budaya



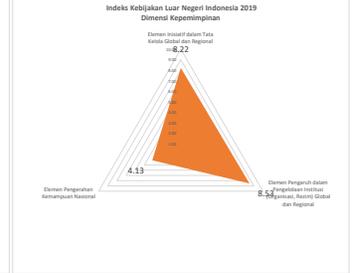
Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2019 Dimensi Sosial Budaya



Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2018 Dimensi Kepemimpinan



Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2019 Dimensi Kepemimpinan



2019	6,82	0,5
<b>Elemen Masyarakat</b>		
2020	6,50	
2021	7,55	
2022	6,91	
2023	6,27	
2024	6,54	
2025	6,40	
2026	6,26	

2018	7,91
<b>Elemen Unsurif Gubernur, Bupati, Walikota Gubernur dan Walikota</b>	
2019	8,22
2020	8,74
2021	8,32
2022	8,20
2023	8,10
2024	8,10
2025	8,10
2026	8,10

Substansi  
Daerah

Substansi  
Daerah

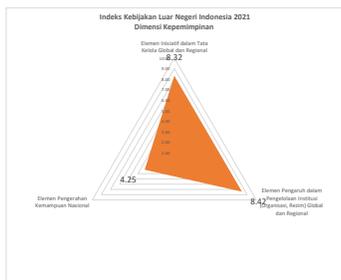
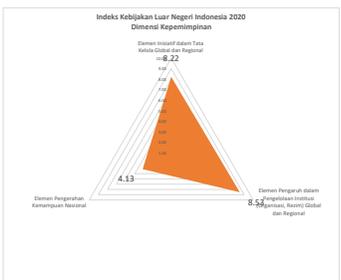
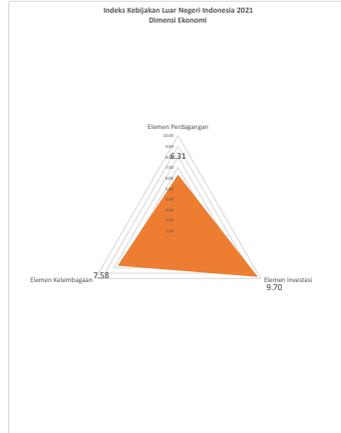
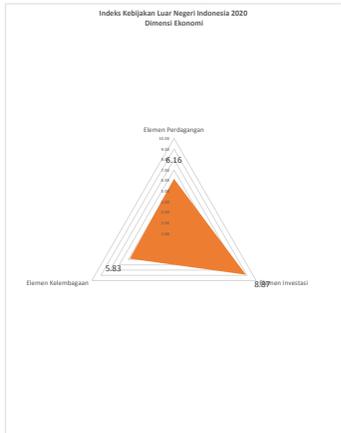
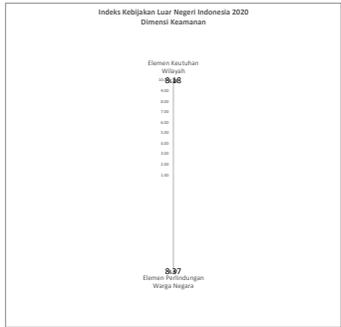
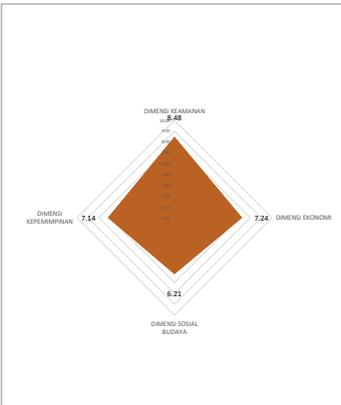
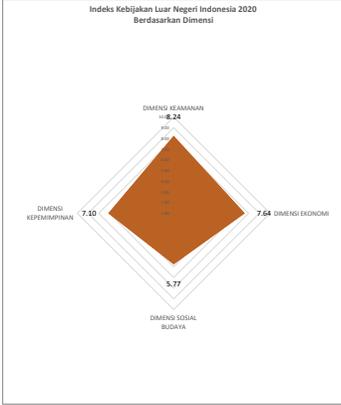
Substansi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,2	6,97	7,19	7,30	7,34	7,08	7,12	7,15	7,19	7,22

2018	8,38
<b>Elemen Pengaruh Jalan Pengalihan Mall (Gubernur Bupati) Gubernur dan Walikota</b>	
2019	8,53
2020	7,95
2021	8,42
2022	7,93
2023	7,92
2024	7,91
2025	7,89
2026	7,88

Substansi  
Daerah

Substansi  
Daerah

2018	4,13
<b>Elemen Pengaruh Kementerian Nasional</b>	
2019	4,27
2020	4,24
2021	4,23
2022	4,22
2023	4,21
2024	4,20
2025	4,19
2026	4,18









**Direktorat Politik Luar Negeri dan  
Kerjasama Pembangunan Internasional**

Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta



[polugrikpi@bappenas.go.id](mailto:polugrikpi@bappenas.go.id)



[polugrikpi](https://www.instagram.com/polugrikpi)



[polugrikpi](https://twitter.com/polugrikpi)